BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mei 2025

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mei 2025

Tim Penyusun

PENANGGUNG JAWAB

Rommy S. Tamawiwy

KOORDINATOR PENYUSUN

Beny Okta Tutuarima

TIM PENULIS

Arief Setyowidodo

Febiola Napitupulu

Gemma Giacinta Nugroho

Kinanti Aryadianti Angganararas

Melly Anggraini

Imam Zulfian

Edisi Mei 2025

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diterbitkan oleh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Telp: 0717 – 422411. Fax: 0717 – 422311

Gambar *cover:*

Cover depan : Pulau Penyusuk, Bangka.

Cover belakang : Pulau Batu Berlayar, Belitung.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya ”Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2025” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Pangkalpinang, Mei 2025
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

Rommy S. Tamawiwy
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Tim Penyusun II
Kata Pengantar III
Daftar Isi IV
Daftar Tabel VI
Daftar Gambar VII
Daftar Grafik VIII
Tabel Indikator XII
Ringkasan Eksekutif XIV
Daftar Istilah 95

Bab I
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 2
1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha 4
1.2 PDRB Menurut Pengeluaran 10
BOKS 1
5th Bekisah: Sinergi & Inovasi Ekonomi Keuangan Syariah Untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi Bangka Belitung 17

Bab II
KEUANGAN PEMERINTAH 22
2.1 Gambaran Umum 23
2.2 APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 25
2.3 APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 29
2.4 Belanja APBN Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 32

Bab III
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 36
3.1 Inflasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 37
3.2 Inflasi Kelompok Pengeluaran 38
3.3 Inflasi Spasial 42
3.4 *Tracking* Inflasi Triwulan II 2025 44
3.5 Upaya Pengendalian Inflasi Daerah 45
BOKS 2
Jelang Ramadan Dan Idulfitri, TPID Se-Bangka Belitung Tegaskan Komitmen Jaga Inflasi 47

Bab IV
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 50
4.1 Kinerja Perbankan 51
4.2 Pembiayaan Daerah 54
4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM 58

Bab V
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 62

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai 63
5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai 66
5.3 Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya 67
5.4 Penyediaan Uang Layak Edar 67
5.5 Upaya Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Kelancaran Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai 67

BOKS 3
Sang Depati QRIS: Kolaborasi BI x Perbankan Berhasil Raih *Outcome* Signifikan pada Perluasan QRIS 69

Bab VI
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 72

6.1 Kondisi Ketenagakerjaan 73
6.2 Kondisi Kesejahteraan Petani 76
6.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Survei Konsumen 77
6.4 Indeks Pembangunan Manusia 79
6.5 Tingkat Kemiskinan 80

Bab VII
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 84

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 87
7.2 Prospek Inflasi Tahun 2025 88
7.3 Rekomendasi Kebijakan 90

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%yoy) 5

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai dan Volume Komoditas Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6

Tabel 1.3 Pertumbuhan Tahunan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (% yoy) 10

Tabel 2.1 Ringkasan Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025 24

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025 27

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025 28

Tabel 2.4 Ringkasan Pagu dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025 30

Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha 54

Tabel 5.1 Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 63

Tabel 5.2 *Inflow – Outflow* Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 66

Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak, Feb 2022-Feb 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 74

Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Feb 2022-Feb 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 75

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Feb 2022-Feb 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 75

Tabel 6.4 Perbandingan NTP Berdasarkan Subsektor, 2022–2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 76

Tabel 6.5 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Triwulanan, 2022-2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 77

Tabel 6.6 Pendapat Konsumen Terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dan Enam Bulan YAD (2022-2024) 78

Tabel 6.7 Pendapat Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini dan Penghasilan Enam Bulan YAD (2022-2025) 78

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 80

Tabel 6.9 Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung September 2024 81

Tabel 7.1 *Outlook* Perekonomian Global 85

Daftar Gambar

Gambar B1.1 Tabligh Akbar bersama Ustadz Dr. H. Das'ad Latif 17

Gambar B1.2 *Talkshow* Ekonomi Syariah Bersama Ustadz Abdul Mughni 18

Gambar B1.3 Peluncuran Program Wakaf Digital Bangka Belitung Kerja Sama dengan Satu Wakaf dan Rumah Wakaf 19

Gambar B2.1 *High Level Meeting* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26 Februari 2025 47

Gambar B2.2 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama pada HLM TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 26 Februari 2025 48

Daftar Grafik

Grafik 1.1 PDRB Nominal dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3
Grafik 1.2 Struktur PDRB Triwulan I 2025 5
Grafik 1.3 Distribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB 2021 – Triwulan I 2025 5
Grafik 1.4 Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 5
Grafik 1.5 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6
Grafik 1.6 Perkembangan Harga Lada Internasional 6
Grafik 1.7 Perkembangan Harga Karet Internasional 7
Grafik 1.8 Perkembangan Harga CPO Internasional 7
Grafik 1.9 Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian 8
Grafik 1.10 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 8
Grafik 1.11 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9
Grafik 1.12 Perkembangan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Baru 9
Grafik 1.13 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) Kendaraan Bermotor 9
Grafik 1.14 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi 9
Grafik 1.15 Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen 10
Grafik 1.16 Pertumbuhan Kredit Kepemilikan Tempat Tinggal 10
Grafik 1.17 Andil Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran 11
Grafik 1.18 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 11
Grafik 1.19 Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL Rumah Tangga (RT) 11
Grafik 1.20 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat Ini (IKE) 11
Grafik 1.21 Perkembangan Konsumsi Pemerintah 12
Grafik 1.22 Perkembangan PMTB 13
Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa 14
Grafik 1.24 Perkembangan Volume Ekspor Timah 14
Grafik 1.25 Perkembangan Nilai Ekspor Timah 14
Grafik 1.26 Perkembangan Volume Ekspor Lada 14
Grafik 1.27 Perkembangan Nilai Ekspor Lada 15
Grafik 1.28 Perkembangan Volume Ekspor Perikanan 15
Grafik 1.29 Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan 15
Grafik 1.30 Perkembangan Volume Ekspor Karet 15
Grafik 1.31 Perkembangan Nilai Ekspor Karet 15
Grafik 1.32 Perkembangan Volume Ekspor CPO 15
Grafik 1.33 Perkembangan Nilai Ekspor CPO 16
Grafik 1.34 Perkembangan Impor Barang dan Jasa 16
Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor 16
Grafik 1.36 Pangsa Barang Impor 16
Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 23
Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 23
Grafik 2.3 Pangsa Sumber Pagu Pendapatan Daerah Tahun 2025 25
Grafik 2.4 Pangsa Sumber Pagu Belanja Daerah Tahun 2025 25
Grafik 2.5 Perkembangan Pagu APBD Provinsi 2020-2025 25
Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi 2020-Triwulan I 2025 25
Grafik 2.7 Pangsa Pagu Pendapatan APBD Provinsi Tahun 2025 26
Grafik 2.8 Pangsa Pagu PAD APBD Provinsi Tahun 2025 26
Grafik 2.9 Pangsa Pagu Belanja APBD Provinsi Tahun 2025 26
Grafik 2.10 Pangsa Pagu Belanja Operasi APBD Provinsi Tahun 2025 26
Grafik 2.11 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Triwulan I Tahun 2025 28
Grafik 2.12 Pangsa Realisasi PAD APBD Provinsi Triwulan I Tahun 2025 28
Grafik 2.13 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan I 2025 29
Grafik 2.14 Pangsa Realisasi Belanja Operasi APBD Provinsi Triwulan I 2025 29
Grafik 2.15 Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025 30
Grafik 2.16 Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025 30
Grafik 2.17 Pangsa Total Pendapatan Kabupaten/Kota Triwulan I 2025 31
Grafik 2.18 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Triwulan I 2025 31
Grafik 2.19 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Triwulan I 2025 31

Daftar Grafik

Grafik 2.20 Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Triwulan I 2025 31

Grafik 2.21 Pangsa Total Belanja Kabupaten/Kota Triwulan I 2025 32

Grafik 2.22 Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2025 Menurut Jenis Belanja 33

Grafik 2.23 Pangsa Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2025 Menurut Jenis Belanja 33

Grafik 2.24 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025 33

Grafik 2.25 Pangsa Realisasi Dana Transfer Triwulan I 2025 33

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 37

Grafik 3.2 Inflasi Kawasan Sumatera Triwulan I 2025 37

Grafik 3.3 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%) 38

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 38

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 39

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 39

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 40

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Subkelompok Kesehatan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 40

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Subkelompok Transportasi Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 41

Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Subkelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 41

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Subkelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 41

Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pendidikan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 42

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 42

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota IHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 43

Grafik 3.15 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kota Pangkalpinang 43

Grafik 3.16 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kota Tanjungpandan 43

Grafik 3.17 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kabupaten Bangka Barat 44

Grafik 3.18 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kabupaten Belitung Timur 44

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan 51

Grafik 4.2 Indeks Orientasi Bisnis Perbankan 51

Grafik 4.3 Perkembangan Penghimpunan DPK 51

Grafik 4.4 Perkembangan DPK Berdasarkan Komponen 52

Grafik 4.5 Pangsa DPK Perbankan 52

Grafik 4.6 Pangsa DPK Menurut Kabupaten/Kota 52

Grafik 4.7 Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Nasabah 52

Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Perbankan 53

Grafik 4.9 Pertumbuhan Jenis Kredit Perbankan 53

Grafik 4.10 Pangsa Kredit Perbankan 53

Grafik 4.11 Perkembangan Pangsa Jenis Kredit Perbankan 53

Grafik 4.12 *Non-Performing Loan* (NPL) 54

Grafik 4.13 *Loan to Deposit* (LDR) 54

Grafik 4.14 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi 55

Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit 55

Grafik 4.16 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi berdasarkan LU 56

Grafik 4.17 NPL Kredit Total dan Kredit Korporasi 56

Grafik 4.18 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 56

Grafik 4.19 Perkembangan Kredit Rumah Tangga 57

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit 57

Grafik 4.21 Pangsa Kredit Konsumsi Rumah Tangga 57

Grafik 4.22 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga 57

Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM 58

Grafik 4.24 Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Kredit 58

Grafik 4.25 Pangsa Kredit UMKM Secara Sektoral 58

Daftar Grafik

Grafik 4.26	NPL Kredit UMKM	59
Grafik 5.1	Perkembangan Transaksi RTGS	63
Grafik 5.2	Pertumbuhan Nominal Transaksi BI-RTGS	63
Grafik 5.3	Pertumbuhan Frekuensi Transaksi BI-RTGS	63
Grafik 5.4	Perkembangan Perputaran Kliring	64
Grafik 5.5	Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64
Grafik 5.6	Persebaran Jumlah *Merchant* QRIS per wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64
Grafik 5.7	Perkembangan Pengguna QRIS wilayah Bangka Belitung	64
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65
Grafik 5.9	Sebaran *Merchant* QRIS wilayah Bangka Belitung	65
Grafik 5.10	Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Rp Juta)	65
Grafik 5.11	Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Volume)	65
Grafik 5.12	Jumlah Transaksi Kartu Debit (Rp Miliar)	66
Grafik 5.13	Jumlah Transaksi Kartu Debit (Volume)	66
Grafik 5.14	Jumlah Transaksi Uang Elektronik	66
Grafik 5.15	Perkembangan Aliran Uang Kartal Bangka Belitung	66
Grafik 5.16	Penemuan Jumlah Lembar Uang Palsu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
Grafik 6.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran, Feb 2022-Ags 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73
Grafik 6.2	Persentase Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Kerja periode Februari 2025 (%)	74
Grafik 6.3	Perkembangan Nilai Tukar Petani	76
Grafik 6.4	Nilai Tukar Petani dan *Growth*	77
Grafik 6.5	Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	78
Grafik 6.6	Indeks Penghasilan	79
Grafik 6.7	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79
Grafik 6.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	80
Grafik 6.9	Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan	80
Grafik 6.10	Perkembangan Gini Ratio	81

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tabel Indikator

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI																
INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024				2024	2025
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
PDRB ADHB (Rp Triliun)	**22,81**	**24,11**	**23,77**	**24,59**	**95,29**	**24,23**	**25,75**	**26,09**	**26,46**	**102,53**	**25,19**	**27,11**	**27,05**	**28,15**	**107,50**	**27,37**
PDRB ADHK (Rp Triliun)	**13,73**	**14,46**	**14,62**	**15,00**	**57,80**	**14,33**	**15,20**	**15,20**	**15,60**	**60,34**	**14,48**	**15,35**	**15,22**	**15,75**	**60,80**	**15,14**
PDRB (%yoy)	3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	4,40	5,13	4,00	4,00	4,38	1,01	1,02	0,13	0,94	0,77	4,60
Lapangan Usaha (%yoy)																
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,40	0,45	-1,72	7,60	0,99	8,84	4,96	3,12	-1,26	3,73	4,94	4,06	0,62	2,95	3,13	2,01
2. Pertambangan dan Penggalian	-1,24	6,00	-0,03	-2,30	0,51	-2,43	-0,76	-0,40	-1,28	-1,19	-8,91	-7,74	-1,96	1,98	-4,00	12,22
3. Industri Pengolahan	-1,36	6,26	5,54	10,24	5,14	2,30	0,90	1,44	3,08	1,92	-5,12	-5,82	-4,88	-0,03	-3,93	10,16
4. Pengadaan Listrik, Gas	6,15	0,02	-4,74	-14,27	-3,39	-14,89	-2,14	7,80	21,63	2,40	17,45	0,97	2,76	0,73	5,03	10,81
5. Pengadaan Air	-0,01	2,20	5,83	8,04	4,05	-0,03	-0,23	0,28	1,21	0,33	7,91	5,32	2,46	0,21	3,84	1,03
6. Konstruksi	1,99	-3,90	-2,19	-0,16	-1,06	2,19	7,95	14,20	11,47	8,94	-1,86	-0,01	-0,05	-0,43	-0,57	-2,16
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,51	15,06	10,36	2,18	10,77	-0,78	-1,27	1,19	10,42	2,36	0,04	0,67	-0,77	-1,22	-0,34	2,78
8. Transportasi dan Pergudangan	23,69	22,11	32,58	8,70	20,98	9,89	14,31	7,40	6,42	9,47	6,92	4,91	2,31	-4,37	2,38	-1,03
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,77	13,25	6,87	7,36	10,39	13,00	9,45	15,76	2,48	9,92	5,23	8,60	-0,33	1,14	3,64	-3,29
10. Informasi dan Komunikasi	8,83	9,52	12,48	8,66	9,86	10,84	13,60	15,05	15,59	13,82	17,50	12,49	8,37	1,93	9,83	2,26
11. Jasa Keuangan	-4,57	4,02	10,54	12,47	5,57	22,75	14,14	13,88	6,14	13,91	6,84	3,22	-3,81	-2,76	0,81	-1,22
12. *Real Estate*	4,28	6,15	5,40	4,64	5,11	5,20	3,83	3,76	3,78	4,14	2,37	4,99	3,64	3,16	3,54	2,99
13. Jasa Perusahaan	6,24	11,31	11,57	14,71	10,99	7,93	5,02	10,00	12,23	8,86	17,41	14,57	5,77	-7,94	6,90	-9,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,91	-4,70	9,17	-5,51	-1,37	6,30	23,15	-1,14	-1,24	6,63	11,54	8,79	12,49	3,28	8,82	9,98
15. Jasa Pendidikan	16,28	-1,16	-0,95	0,67	3,02	15,85	22,49	4,07	2,42	10,74	4,53	18,08	9,77	9,98	10,70	6,12
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,15	1,79	1,39	8,53	2,16	9,32	9,83	6,34	9,87	8,82	8,60	-1,01	-0,20	-0,21	1,64	7,01
17. Jasa lainnya	13,38	9,31	9,36	0,55	7,88	1,28	11,77	18,70	13,39	10,97	11,97	7,98	9,98	3,20	8,13	3,15
Permintaan (%yoy)																
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,85	4,92	5,65	3,60	4,99	3,01	1,87	3,75	4,35	3,25	4,25	2,82	1,26	0,61	2,21	1,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,92	4,63	5,58	4,31	4,61	3,81	5,05	1,04	12,16	5,54	17,00	8,35	-0,56	6,42	7,73	3,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,16	-0,97	2,87	8,76	2,53	8,33	3,18	0,08	11,07	5,67	17,32	3,23	2,96	-0,38	4,31	-4,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,54	0,56	2,89	3,39	3,32	1,98	5,37	8,04	4,19	4,88	-0,27	0,25	-1,79	-1,25	-0,78	-2,85
5. Ekspor Barang dan Jasa	10,38	24,20	-13,57	-18,26	-1,32	-30,79	-18,48	-14,99	-8,19	-17,74	-37,86	-33,26	-0,11	1,83	-16,21	87,86
6. Impor Barang dan Jasa	16,13	23,36	-19,29	-24,65	-4,42	-48,26	-28,08	-21,19	-9,98	-26,19	-57,75	-45,55	0,77	-0,38	-22,25	184,00
Ekspor																
Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	680,92	896,04	403.045	483,02	2.463.027	312,16	627,75	533,11	525,30	1.998,32	164,86	387,45	525,48	561,49	1.639,29	418,65
Volume Ekspor Non Migas (Juta Ton)	80,33	128,45	115,51	108,47	466,60	75,98	138,80	153,34	166,22	592,70	132,57	140,56	169,22	153,96	596,31	192,08
Indeks Harga Konsumen																
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	109,62	113,25	113,78	114,33	114,33	115,10	116,43	117,82	117,36	117,36	104,04	103,95	103,76	104,25	104,25	105,22
Pangkalpinang	109,08	111,75	112,68	115,54	115,54	113,49	114,62	115,72	115,94	115,94	104,46	104,90	104,67	104,83	104,83	105,91
Tanjungpandan	110,61	115,97	115,80	113,66	113,66	118,03	119,72	121,63	119,93	119,93	105,00	104,76	105,87	106,46	106,46	105,75
Bangka Barat											102,97	102,25	101,29	101,88	101,88	103,88
Belitung Timur											103,81	103,64	103,46	104,40	104,40	105,19
Laju Inflasi (%yoy)																
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,92	6,52	6,67	5,38	5,38	5,00	2,81	3,55	2,65	2,65	1,80	1,08	0,49	0,75	0,75	1,13
Pangkalpinang	4,70	6,46	7,33	6,07	6,07	4,04	2,57	2,70	2,01	2,01	2,24	1,77	0,82	0,76	0,76	1,39
Tanjungpandan	2,56	6,61	5,52	4,17	4,17	6,71	3,23	5,03	3,80	3,80	1,80	0,05	-0,22	1,68	1,68	0,72
Bangka Barat											1,78	0,27	0,42	-0,30	-0,30	0,88
Belitung Timur											0,88	1,75	0,61	1,38	1,38	1,33

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel Indikator

PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN

INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024				2024	2025
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
ASET																
Aset Perbankan (Rp Triliun)	27,48	28,95	28,21	27,51	27,51	26,45	27,11	28,47	27,42	27,42	25,93	26,96	27,37	27,84	27,84	28,18
Pertumbuhan (%yoy)	25,33	20,48	9,61	6,33	6,33	-3,74	-6,36	0,92	-0,34	-0,34	-1,99	-0,54	-3,84	1,53	1,53	8,67
DPK																
Dana Pihak Ketiga Lokasi KC/KCP (Rp Triliun)	26,62	28,07	27,09	26,42	26,42	25,23	25,68	26,42	25,44	25,44	23,79	23,78	24,98	25,36	25,36	26,55
Giro (Rp Triliun)	5,25	5,49	4,80	5,20	5,20	4,60	4,72	4,57	4,50	4,50	3,95	4,11	4,49	4,16	4,16	5,12
Tabungan (Rp Triliun)	13,73	14,34	13,78	13,98	13,98	12,79	13,20	13,16	13,31	13,31	12,59	12,77	12,97	13,66	13,66	14,20
Deposito (Rp Triliun)	7,64	8,24	8,51	7,24	7,24	7,84	7,77	8,69	7,63	7,63	7,24	6,90	7,52	7,54	7,54	7,24
Pertumbuhan																
Dana Pihak Ketiga (%yoy)	26,46	21,11	2,95	6,79	6,79	-5,25	-8,52	-2,49	-3,72	-3,72	-5,71	-7,39	-5,46	-0,32	-0,32	11,63
Giro (%yoy)	70,35	42,90	0,05	25,79	25,79	-12,45	-14,14	-4,89	-13,54	-13,54	-14,09	-12,83	-1,76	-7,46	-7,46	29,53
Tabungan (%yoy)	26,91	20,90	5,88	4,10	4,10	-6,85	-8,00	-4,52	-4,78	-4,78	-1,54	-3,24	-1,46	2,62	2,62	12,76
Deposito (%yoy)	6,86	10,23	0,09	0,87	0,87	2,59	-5,68	2,16	5,40	5,40	-7,61	-11,15	-13,45	-1,24	-1,24	-0,10
KREDIT																
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek (Rp Triliun)	17,16	17,63	18,18	18,62	18,62	19,28	20,11	21,44	23,89	23,89	22,94	23,64	25,00	25,63	25,63	25,28
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,42	6,43	6,76	6,90	6,90	7,33	7,86	9,01	10,64	10,64	9,37	9,59	10,02	10,22	10,22	9,87
Investasi (Rp Triliun)	3,29	3,62	3,62	3,74	3,74	3,83	3,96	3,98	4,42	4,42	4,60	4,96	5,70	5,83	5,83	5,71
Konsumsi (Rp Triliun)	7,45	7,58	7,80	7,98	7,98	8,12	8,31	8,44	8,82	8,82	8,97	9,08	9,27	9,59	9,59	9,70
Pertumbuhan																
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek (%yoy)	-21,91	-17,14	-4,23	5,89	5,98	12,36	14,07	17,96	28,30	28,30	19,01	17,57	16,60	7,31	7,31	10,21
Modal Kerja (%yoy)	-45,86	-41,58	-21,03	-4,72	-4,72	14,11	23,57	33,31	54,09	54,09	27,91	20,70	11,24	-3,93	-3,93	5,36
Investasi (%yoy)	17,03	24,96	24,55	25,79	25,79	16,41	8,26	10,06	18,42	18,42	19,96	26,80	43,16	31,70	31,70	24,27
Konsumsi (%yoy)	2,01	2,84	3,77	8,52	8,52	9,05	9,64	8,31	10,60	10,60	10,53	10,17	9,79	8,64	8,64	8,06
LDR Lokasi Proyek (%)	64,45	62,80	67,09	70,46	70,46	76,42	78,30	81,16	93,88	93,88	96,45	99,40	100,10	101,07	101,07	95,22
NPL *Gross* Lokasi Proyek (%)	3,21	3,17	3,06	2,74	2,74	2,80	4,49	4,20	2,93	2,93	3,18	3,09	2,96	2,85	2,85	4,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024				2024	2025
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
BI-RTGS																
Volume (Lembar)	3.134	3.262	3.054	2.978	12.428	2.446	3.030	2.783	2.708	10.967	1.813	2.001	2.150	2.812	8.776	2.385
Nilai (Rp Miliar)	7.600	7.191	7.654	10.839	33.284	7.280	9.472	8.598	11.036	36.386	5.852	7.336	6.173	15.149	34.511	11.288
Pertumbuhan																
Volume (%yoy)	15,73	2,02	-12,49	-20,12	-5,30	-21,95	-7,13	-8,87	-9,07	-11,76	-25,88	-33,96	-22,57	3,84	-19,98	31,55
Nilai (% yoy)	30,73	3,53	-1,06	33,42	16,30	-4,20	31,71	12,33	1,82	9,32	-19,61	-22,55	-28,20	37,27	-5,15	92,88
SKNBI																
Perputaran Kliring																
a. Nominal (Rp Miliar)	1.643,18	1.604,55	1.329,02	1.518,78	6.095,53	1.144,81	1.095,73	1.350,53	1.617,76	5.208,84	978	959,48	1.015,18	1.218,40	4.171,16	838.236,94
Pertumbuhan (%yoy)	21,90	1,36	-2,36	-2,36	18,54	-30,33	-31,71	1,62	6,52	-53,90	-14,56	-12,44	-24,83	-24,69	-19,92	-14,30
b. Warkat (lembar)	47.297	47.059	43.747	45.201	183.304	36.697	37.269	40.192	44.873	159.031	32.020	35.358	35.084	33.614	136.076	24.698
Pertumbuhan (%yoy)	1,65	-8,02	-13,41	-20,07	15,14	-23,97	-21,54	-8,99	-3,28	-57,77	-10,96	-5,06	-11,96	-25,09	-14,43	-22,87
Perputaran Per Hari																
a. Nominal (Rp Juta)	26.937	29.174	20.137	110.730	186.978	87.394	99.775	100.496	115.923	403.588	82.690	89.452	73.349	85.246	330.737	69.936
b. Warkat (lembar)	783	863	669	2.290	4.605	1.739	2.141	1.925	2.233	8.038	1.667	2.022	1.616	1.610	6.915	1.279
Inflow - Outflow																
Inflow (Rp miliar)	1.271,84	1.370,79	1.082,18	396,39	4.121,20	1.494,61	713,99	671,55	358,08	3.238,24	1.627,50	1.183,57	430,22	228,99	3.470,27	964,18
Pertumbuhan (% yoy)	90,69	(24,09)	(20,88)	(79,05)	(28,12)	17,52	(47,91)	(37,94)	(9,67)	(21,42)	8,89	65,77	(35,94)	(36,05)	7,17	(0,41)
Outflow (Rp miliar)	1.273,20	1.761,87	483,37	1.722,27	5.240,71	517,78	1.575,71	794,07	1.915,22	4.802,78	772,83	1.165,15	865,14	2.210,24	5.013,36	1.096,42
Pertumbuhan (% yoy)	128,36	227,03	99,86	47,50	109,14	(59,33)	(10,57)	64,28	11,20	(8,36)	49,26	(26,06)	8,95	15,40	4,38	0,42
Inflow + *Outflow* (Rp miliar)	2.545,04	3.132,66	1.565,55	2.118,67	9.361,91	2.012,39	2.289,70	1.465,62	2.273,30	8.041,01	2.400,33	2.348,72	1.295,36	2.439,23	8.483,63	-132,24
Pertumbuhan (% yoy)	107,84	33,61	(2,74)	(30,76)	13,63	(20,93)	(26,91)	(6,38)	7,30	(14,11)	19,28	2,58	(11,62)	7,30	5,50	(1,06)
Netflow (Rp miliar)	-1,36	-391,08	598,81	-1.325,88	-1.119,51	976,83	-861,72	-122,51	-1.557,14	-1.564,54	854,67	18,42	-434,92	-1.981,25	-1.543,09	-132,24
Pertumbuhan (% yoy)	(101,25)	(130,86)	(46,82)	(282,94)	(134,69)	(71.767,72)	120,34	(120,46)	17,44	39,75	(12,51)	(102,14)	255,00	27,24	(1,37)	(115,47)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ringkasan Eksekutif

I. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 utamanya berasal dari lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan; serta LU Pertambangan dan Penggalian, seiring dengan meningkatnya produksi dan ekspor logam timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya disumbang oleh Ekspor Barang dan Jasa, khususnya komoditas strategis timah, serta diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga yang didukung oleh meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri serta Cengbeng.

Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada LU Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 12,22% (yoy); diikuti LU Pengadaan Listrik, Gas sebesar 10,81% (yoy); serta LU Industri Pengolahan sebesar 10,16% (yoy).

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh 4,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,94% (yoy). Kinerja LU Industri Pengolahan menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan laporan, seiring dengan meningkatnya ekspor komoditas unggulan timah dibandingkan periode yang sama sebelumnya dimana tidak terdapat realisasi ekspor timah dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada Januari – Februari 2024. Selain itu, kondisi ini juga mendorong peningkatan andil LU Pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian pada triwulan I 2025. Pada triwulan laporan, sebagian besar LU tumbuh positif. Meski demikian, terdapat beberapa LU yang mengalami kontraksi, khususnya LU Konstruksi, sejalan dengan turunnya realisasi proyek fisik pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang Jasa yang tumbuh 87,86% (yoy); diikuti Konsumsi LNPRT sebesar 3,35% (yoy); serta Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,74% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, kinerja Ekspor Barang dan Jasa menjadi sumber terbesar perekonomian, sejalan dengan meningkatnya ekspor komoditas timah. Pertumbuhan positif triwulan I 2025 tercatat pada komponen pengeluaran antara lain Impor Barang dan Jasa; Ekspor Barang dan Jasa; Konsumsi Rumah Tangga; dan Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Hal ini turut didorong oleh meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri serta Cengbeng. Sementara itu, komponen Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melanjutkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan laporan. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja pemerintah atas barang dan jasa, maupun belanja modal, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

II. KEUANGAN PEMERINTAH

Sampai dengan triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,92 triliun atau lebih rendah 3,47% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara dengan 21% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp1,61 triliun atau setara dengan 16,21% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja daerah tersebut tumbuh 20,36% (yoy). Sementara realisasi belanja APBN kementerian/lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp521,94 miliar atau setara dengan 17,61% dari pagu.

Realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi hingga triwulan I 2025 mencapai Rp463,64 miliar atau 19,39% dari pagu atau alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Secara persentase realisasi, kinerja realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan I 2024 yang mencapai 19,85% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja tingkat provinsi pada triwulan I 2025 mencapai Rp386,93 miliar atau setara dengan 15,51% dari pagu. Kinerja persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja tingkat provinsi pada triwulan I 2024 yang mencapai 12,90% dari pagu.

Hingga akhir triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah (APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 21% dari pagu, sementara realisasi belanja (mencapai 16,53% dari pagu keseluruhan belanja APBD dan APBN.

Di tingkat kabupaten/kota, realisasi pendapatan daerah pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,46 triliun atau 21,57% dari pagu, lebih rendah dibandingkan capaian realisasi pada triwulan I 2024 sebesar 21,91% dari pagu. Di sisi lain, realisasi belanja daerah sebesar Rp1,23 triliun atau setara dengan 16,44% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan realisasi hingga triwulan I 2024 yaitu 12,38% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota tersebut didorong oleh kenaikan realisasi belanja operasi dan belanja transfer terhadap pagu.

Realisasi belanja APBN kementerian/lembaga (K/L) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga triwulan I tahun 2025 sebesar 17,61% dari pagu. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi belanja APBN K/L pada periode yang sama tahun lalu mencapai 22,14% dari pagu.

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan I 2025, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam level yang terjaga sebesar 1,13% (yoy). Capaian inflasi tersebut didorong oleh terkendalinya komoditas utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok transportasi menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025. Seluruh Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi, antara lain Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,39% (yoy), Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,33% (yoy), Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,88% (yoy), dan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0.71% (yoy). Dengan demikian, capaian inflasi tahunan Provinsi serta 4 Kabupaten/Kota IHK Kepulauan Bangka Belitung tercatat masih terkendali di bawah sasaran 2,5 ± 1%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi tahunan terbesar pada triwulan I 2025 utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,30% dengan inflasi 5,01% (yoy), diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta kelompok transportasi yang masing-masing memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,24%. Sementara itu, inflasi lebih lanjut tertahan oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi dengan andil deflasi tahunan sebesar 0,01%.

Dari sisi komoditas, andil inflasi tahunan (yoy) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar pada triwulan I 2025 berasal dari komoditas emas perhiasan sebesar 0,23%. Andil terbesar selanjutnya berasal dari sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,19%, minyak goreng 0,13%, cumi-cumi 0.13%, bawang merah 0,11%, dan kopi bubuk 0,10%. Sementara itu, andil deflasi tahunan (yoy) terbesar berasal dari beras 0,41%, sawi hijau 0,10%, cabai merah 0,08%, kangkung 0,08% dan tomat 0,07%.

Inflasi tahunan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh inflasi komoditas emas perhiasan ditengah berlanjutnya tren peningkatan harga emas global, sejalan dengan permintaan emas sebagai aset *safe-haven* yang meningkat akibat ketidakpastian global. Sementara itu, peningkatan harga komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dipengaruhi oleh transmisi kebijakan peningkatan harga jual ecerah (HJE) produk

tembakau yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas minyak goreng dan kopi bubuk dipengaruhi oleh adanya gangguan produksi akibat kondisi cuaca di wilayah penghasil dunia yang menyebabkan harga secara global mengalami peningkatan. Sementara itu, terdapat peningkatan harga komoditas hortikultura pangan seperti cumi-cumi dan bawang merah. Peningkatan harga cumi-cumi dan bawang merah didorong oleh pengaruh kondisi cuaca sehingga menyebabkan ketersediaan pasokan menjadi terbatas.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta dalam kerangka kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I 2025 secara umum semakin membaik dan tetap berdaya tahan. Kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terpantau tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, disertai dengan rasio *Loan to Deposit* (LDR) yang turut membaik. Kualitas penyaluran kredit juga tercatat tetap baik, seiring dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang tetap terjaga di bawah *threshold*.

Kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan 11,63% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,32% (yoy).

Kinerja pembiayaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 terus mengalami perbaikan. Hal ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang terus tumbuh positif dari periode triwulan sebelumnya, terutama pada kredit korporasi dan rumah tangga.

Kinerja pembiayaan pada sektor rumah tangga tetap tumbuh lebih tinggi disertai dengan risiko kredit yang terjaga, tecermin dari risiko kredit yang masih rendah.

Kinerja kredit korporasi tetap tumbuh tinggi dan membaik dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, kualitas kredit korporasi perlu menjadi perhatian sejalan dengan nilainya meningkat dan telah berada di atas batas *threshold* 5%.

Di sisi lain, kinerja kredit UMKM pada triwulan laporan terkontraksi. Meskipun demikian, perlambatan kinerja kredit UMKM ini diiringi dengan risiko kredit yang masih terjaga dan berada di bawah *threshold* 5%.

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I tahun 2025, transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pertumbuhan yang positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi selama momen Ramadan dan Idulfitri. Peningkatan ini tecermin pada pertumbuhan transaksi melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Sementara itu, meskipun mengalami kontraksi, nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi tunai mencatatkan arus keluar bersih (*net outflow*),

yang disebabkan oleh tingginya permintaan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Pada triwulan I 2025, nominal transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan. Nominal transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 mencapai Rp11,29 triliun atau tumbuh sebesar 92,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,27% (yoy). Transaksi kliring tercatat mencapai Rp838,24 miliar atau terkontraksi 14,30% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,69% (yoy). Di sisi lain, transaksi QRIS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 meningkat signifikan dengan nominal transaksi sebesar Rp390,64 miliar (tumbuh 118,51% (yoy)) dan volume transaksi mencapai 3.152.123 transaksi (tumbuh 188,31% (yoy)).

Selama triwulan I 2025, transaksi nontunai tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi tunai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net outflow* selama triwulan I 2025.

Dari sisi transaksi tunai, pengedaran uang dari Bank Indonesia pada triwulan I 2025 yang didistribusikan melalui perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net outflow* sebesar Rp132,24 miliar. Kondisi *net outflow* pada triwulan I 2025 mengindikasikan aktivitas perekonomian yang meningkat sejalan dengan momen Ramadan dan Idulfitri.

VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

Pada triwulan I 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melemah dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun disertai dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dari sisi indikator kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meskipun persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Namun demikian, berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia masyarakat tetap optimis baik untuk kondisi saat ini ataupun kondisi 6 bulan yang akan datang.

Nilai TPAK menurun dari 70,66% pada Februari 2024 menjadi 67,67% pada Februari 2025. Lebih lanjut, angka TPT juga turut meningkat dari 3,85% pada Februari 2024 menjadi 4,17% pada Februari 2025. Sejalan dengan penurunan TPAK, jumlah tenaga kerja pada Februari 2025 mencapai 762.980 orang atau turun sebesar 3,07% dibandingkan Februari 2024 sebesar 787.140 orang. Penurunan jumlah tenaga kerja tersebut sejalan dengan hasil survei kondisi dunia usaha yang menunjukan perkembangan penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2025 yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Distribusi tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 28,09% atau sebanyak 214.350 tenaga kerja.

Peningkatan jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan sebanyak 2.836 orang, meningkat 6,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi LU utama dengan pengurangan tenaga kerja terbanyak 8.545 orang.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2025 sebesar 152,83 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 124,80. Peningkatan ini disumbang oleh subsektor perkebunan rakyat dan peternakan. Sementara itu, persentase penduduk miskin September 2024 naik menjadi 5,08% dari 4,55% pada Maret 2024.

Ringkasan Eksekutif

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan akan membaik secara bertahap, pasca dinamika komoditas unggulan timah pada tahun sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian diprakirakan ditopang oleh LU utama, antara lain LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diprakirakan berasal dari komponen Ekspor Barang dan Jasa, serta kuatnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan tumbuh menguat pada kisaran 2,3% – 3,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,77% (yoy).

Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024, terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy).

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan akan membaik secara bertahap, pasca mengalami perlambatan akibat dinamika komoditas unggulan timah yang terjadi pada tahun 2024. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 utamanya akan ditopang oleh LU utama antara lain LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini sebagaimana sejalan dengan pemulihan komoditas unggulan timah, dan berlanjutnya kinerja positif komoditas kelapa sawit serta perikanan. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diprakirakan utamanya berasal dari komponen Ekspor Barang dan Jasa; serta Konsumsi Rumah Tangga. Meski demikian, terbatasnya kemampuan fiskal daerah pada tahun 2025 diprakirakan berisiko menahan kinerja perekonomian lebih lanjut. Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan tumbuh menguat, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan berada pada kisaran 2,3% – 3,1% (yoy).

Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, serta berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Prakiraan capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat seiring normalisasi kondisi perekonomian masyarakat pasca mengalami perlambatan akibat ketidakpastian sektor unggulan logam dasar timah pada 2024. Dari sisi perkembangan harga, tekanan inflasi pada tahun 2025 diprakirakan terutama bersumber dari peningkatan indeks harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; dan kelompok transportasi. Ke depan, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Pulau Burung Garuda, Belitung

BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 utamanya berasal dari lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan; serta LU Pertambangan dan Penggalian, seiring dengan meningkatnya produksi dan ekspor logam timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya disumbang oleh Ekspor Barang dan Jasa, khususnya komoditas strategis timah, serta diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga yang didukung oleh meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri serta Cengbeng.

Pertumbuhan Ekonomi

Tw IV 2024	Tw I 2025
0,94	4,60

PDRB menurut Lapangan Usaha

	Tw IV 2024	Tw I 2025
Pertanian	2,95	2,01
Pertambangan	1,98	12,22
Industri Pengolahan	-0,03	10,16
Perdagangan	-1,22	2,78
Konstruksi	-0,43	-2,16

PDRB menurut Pengeluaran

	Tw IV 2024	Tw I 2025
Konsumsi Rumah Tangga	0,61	1,74
Konsumsi LNPRT	6,42	3,35
Konsumsi Pemerintah	-0,38	-4,68
PMTB	-1,25	-2,85
Ekspor	1,83	87,86
Impor	-0,38	184,00

Satuan dalam % YOY

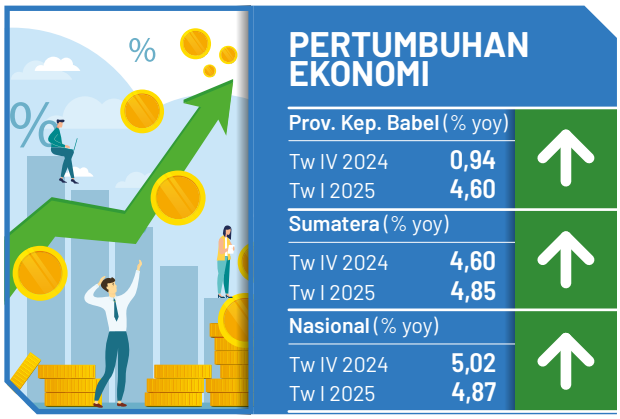

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh 4,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,94% (yoy) (Grafik 1.1). Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp27.373,99 miliar. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 disumbang oleh kinerja LU utama, yakni LU Industri Pengolahan; LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Pertambangan dan Penggalian. Selain itu, LU lainnya, yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Real Estat; LU Jasa Pendidikan; LU Informasi dan Komunikasi; LU Jasa Kesehatan; LU Jasa Lainnya, LU Pengadaan Listrik; serta LU Pengadaan Air turut menopang perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih lanjut. Namun demikian, terdapat beberapa LU yang mengalami kontraksi, yaitu LU Konstruksi, LU Transportasi dan Pergudangan; LU Jasa Keuangan; serta LU Jasa Perusahaan.

Tumbuhnya LU Industri Pengolahan ditopang oleh meningkatnya industri logam dasar timah, dimana ekspor timah yang sudah dapat dimulai sejak Januari 2025. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercatat tidak terdapat realisasi ekspor timah dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Januari - Februari 2024 dampak belum diperolehnya persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan timah di tengah dinamika kasus hukum tata kelola dan tata niaga timah. Selain itu, pertumbuhan LU ini juga berasal dari komoditas CPO yang mengalami kenaikan. Di samping itu, industri makan minum olahan ikan turut memberikan kontribusi positif terhadap capaian LU Industri Pengolahan.

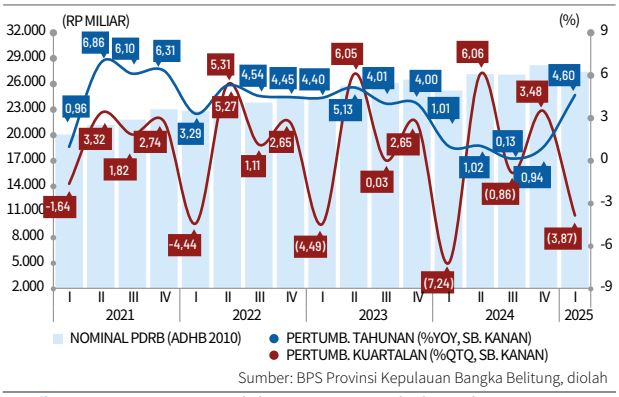

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.1 PDRB Nominal dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejalan dengan LU Industri Pengolahan, pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian berasal dari kinerja bijih timah. Seiring dengan telah diperolehnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan timah untuk 3 tahun (2024 – 2026) maka aktivitas ekspor logam timah telah dimulai sejak Januari 2025. Kondisi ini mendorong tingginya permintaan terhadap bijih timah.

LU Pertanian yang tumbuh positif utamanya didorong oleh subkategori Perikanan, seiring meningkatnya jumlah produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, kinerja LU Pertanian didorong oleh subkategori Perkebunan seperti produksi kelapa sawit dan karet yang tumbuh positif sehingga mendorong kinerja LU lebih lanjut.

LU Perdagangan tumbuh positif, dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan volume barang yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka momentum HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri. Lebih lanjut, membaiknya jumlah pembelian kendaraan baru pada triwulan laporan turut mendorong pertumbuhan LU Perdagangan.

Pada triwulan laporan, LU Konstruksi terkontraksi lebih dalam. Perlambatan kinerja LU Konstruksi utamanya dipengaruhi oleh turunnya realisasi proyek fisik oleh pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti jalan, jembatan, maupun perumahan. Penurunan tersebut seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran dan prioritasi belanja, sehingga dilakukan *tagging* dan efisiensi rekening belanja modal dalam rangka menjaga likuiditas keuangan.

Berdasarkan komponen pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 adalah komponen pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa. Selain itu, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi LNPRT turut menjadi salah satu sumber positif pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Di sisi lain, komponen Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025.

Meningkatnya ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi faktor utama yang mendorong capaian komponen pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa. Hal ini seiring dengan tidak terdapat ekspor timah pada awal triwulan I 2024, dampak belum diperolehnya persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan timah seiring dengan pengusutan kasus hukum tata kelola dan tata niaga timah. Dari sisi impor, impor tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini turut dipengaruhi oleh pulihnya kinerja komoditas utama Bangka Belitung, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas yang didatangkan dari luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perayaan HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri, serta Cengbeng.

Positifnya pertumbuhan komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga didukung oleh meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat dalam rangka perayaan HBKN Imlek, Ramadan dan menjelang Idulfitri, serta Cengbeng. Konsumsi masyarakat yang mulai pulih juga didorong oleh kinerja harga berbagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tetap kuat pada triwulan laporan.

Sementara itu, kinerja Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya realisasi anggaran Pemerintah untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Hal ini seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah pusat dan daerah melakukkan *tagging* dan menetapkan efisiensi terhadap rekening belanja tertentu. Selain itu, pagu anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi dibandingkan pagu anggaran tahun 2024, masing-masing sebesar 0,87% (yoy) dan 4,88% (yoy).

Realisasi PMTB pada triwulan I 2025 melanjutkan kontraksi yang lebih dalam dibandingkan kontraksi sebelumnya. Sejalan dengan Konsumsi Pemerintah, melambatnya kinerja realisasi PMTB dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja modal Pemerintah, baik dalam bentuk bangunan maupun nonbangunan, dampak kebijakan efiensi anggaran. Kontraksi lebih lanjut turut tercatat pada realisasi investasi swasta di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025.

1.1 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 didominasi oleh 5 lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Industri Pengolahan (21,29%); LU Pertanian (21,19%); LU Perdagangan (15,58%); LU Konstruksi (8,25%); serta LU Pertambangan (7,24%) (Grafik 1.2). Kelima LU tersebut memiliki pangsa 73,55% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selama 7 tahun terakhir, LU utama tersebut mengalami perubahan komposisi (Grafik 1.3). LU Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi seiring berkembangnya industri pengolahan logam dasar timah dan CPO sebagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, sejak tahun 2018, distribusi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB cenderung meningkat seiring besarnya potensi perikanan tangkap dan budidaya serta tren perbaikan harga kelapa sawit. Sebaliknya, tren pangsa LU Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun. Sementara itu, LU Perdagangan dan LU Konstruksi memberikan kontribusi yang relatif stabil.

Pada triwulan laporan, sebagian besar LU tumbuh positif, kecuali LU Konstruksi; LU Transportasi dan Pergudangan; LU Akomodasi dan Makan Minum; LU Jasa Keuangan; serta LU Jasa Perusahaan (Tabel 1.1). Andil terbesar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh

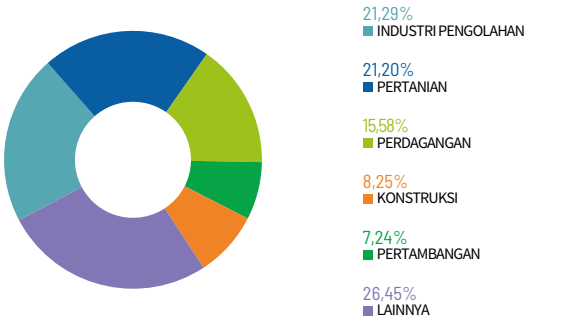

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.2 Struktur PDRB Triwulan I 2025

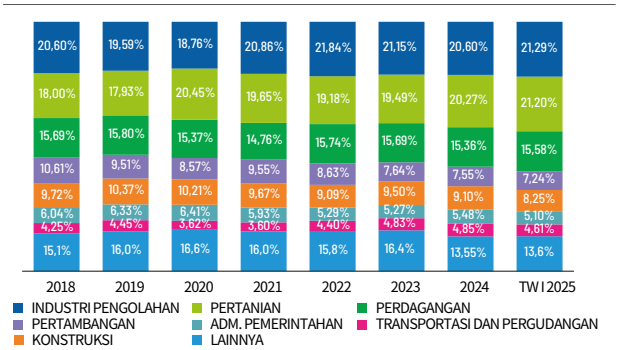

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.3 Distribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB 2021 – Triwulan I 2025

pertumbuhan LU Industri Pengolahan, yaitu sebesar 1,98%; LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,14%; LU Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,54%; LU Perdagangan sebesar 0,41% (yoy); serta LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,40% (yoy) (Grafik 1.4).

Sementara itu, LU Konstruksi sebagai salah satu LU utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung LU Konstruksi memberikan andil negatif terhadap PDRB. Pada triwulan I 2025, LU Konstruksi memberikan andil -0,18% terhadap pertumbuhan, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberikan andil sebesar -0,04%.

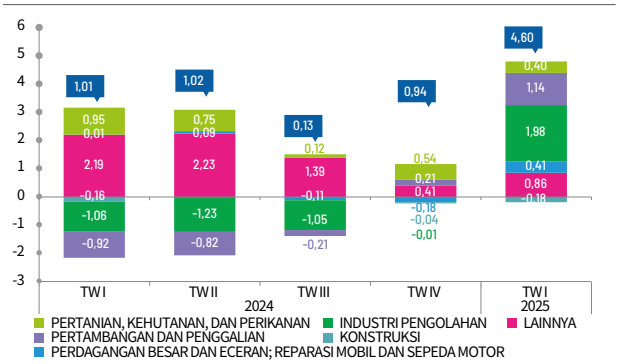

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.4 Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025

Tabel 1.1 Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%yoy)

NO	KOMODITAS	2022				2023				2024				2025
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(2,40)	0,45	(1,72)	7,60	8,84	4,96	3,12	(1,26)	4,94	4,06	0,62	2,95	2,01
2	Pertambangan dan Penggalian	(1,24)	6,00	(0,03)	(2,30)	(2,43)	(0,76)	(0,40)	(1,28)	(8,91)	(7,74)	(1,96)	1,98	12,22
3	Industri Pengolahan	(1,36)	6,26	5,54	10,24	2,30	0,90	1,44	3,08	(5,12)	(5,82)	(4,88)	(0,03)	10,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,15	0,02	(4,74)	(14,27)	(14,89)	(2,14)	7,80	21,63	17,45	0,97	2,76	0,73	10,81
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0,01)	2,20	5,83	8,04	(0,03)	(0,23)	0,28	1,21	7,91	5,32	2,46	0,21	1,03
6	Konstruksi	1,99	(3,90)	(2,19)	(0,16)	2,19	7,95	14,20	11,47	(1,86)	(0,01)	(0,05)	(0,43)	(2,16)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,51	15,06	10,36	2,18	(0,78)	(1,27)	1,19	10,42	0,04	0,67	(0,77)	(1,22)	2,78
8	Transportasi dan Pergudangan	23,69	22,11	32,58	8,70	9,89	14,31	7,40	6,42	6,92	4,91	2,31	(4,37)	(1,03)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,77	13,25	6,87	7,36	13,00	9,45	15,76	2,48	5,23	8,60	(0,33)	1,14	(3,29)
10	Informasi dan Komunikasi	8,83	9,52	12,48	8,66	10,84	13,60	15,05	15,59	17,50	12,49	8,37	1,93	2,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(4,57)	4,02	10,54	12,47	22,75	14,14	13,88	6,14	6,84	3,22	(3,81)	(2,76)	(1,22)
12	Real Estat	4,28	6,15	5,40	4,64	5,20	3,83	3,76	3,78	2,37	4,99	3,64	3,16	2,99
13	Jasa Perusahaan	6,24	11,31	11,57	14,71	7,93	5,02	10,00	12,23	17,41	14,57	5,77	(7,94)	(9,42)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(2,91)	(4,70)	9,17	(5,51)	6,30	23,15	(1,14)	(1,24)	11,54	8,79	12,49	3,28	9,98
15	Jasa Pendidikan	16,28	(1,16)	(0,95)	0,67	15,85	22,49	4,07	2,42	4,53	18,08	9,77	9,98	6,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(3,15)	1,79	1,39	8,53	9,32	9,83	6,34	9,87	8,60	(1,01)	(0,20)	(0,21)	7,01
17	Jasa lainnya	13,38	9,31	9,36	0,55	1,28	11,77	18,70	13,39	11,97	7,98	9,98	3,20	3,15
Pertumbuhan PDRB		3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	5,13	4,00	4,00	1,01	1,02	0,13	0,94	4,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan I 2025 melanjutkan pertumbuhan positif. LU Pertanian tumbuh 2,01% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,95% (yoy) (Grafik 1.5). Positifnya pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan utamanya didorong oleh kinerja subkategori perikanan, seiring dengan peningkatan jumlah produksi komoditas perikanan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selanjutnya turut didorong oleh subkategori perkebunan tahunan seperti produksi kelapa sawit dan karet, sejalan dengan tingginya harga komoditas tersebut.

Pada triwulan laporan, subsektor perikanan menjadi kontributor utama kinerja pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, seiring dengan meningkatnya produksi perikanan. Peningkatan tersebut tecermin dari nilai ekspor perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh 29,07% (yoy) pada triwulan I 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2024 sebesar 33,92% (yoy). Hal ini disebabkan normalisasi hasil tangkapan ikan pasca-musim puncak ikan pada akhir tahun (Tabel 1.2). Negara tujuan ekspor ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama ke negara Asia, yaitu Malaysia sebesar 69,17%, Vietnam sebesar 15,37%, dan Singapura sebesar 13,06% dari total ekspor sepanjang triwulan I 2025. Jenis perikanan

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai dan Volume Komoditas Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KOMODITAS	NILAI (RIBU USD)				VOLUME (TON)			
	Tw IV 2024	% YOY	Tw I 2025	% YOY	Tw IV 2024	% YOY	Tw I 2025	% YOY
Karet	6.776,59	56,11	6.529,10	44,90	3.528	15,64	3.199,14	8,88
CPO	56.182,42	4,36	59.708,87	14,50	52.469	(21,58)	55.173,37	(11,44)
Lada	11.299,23	105,18	11.925,68	48,14	1.276	45,61	1.273,83	(3,20)
Ikan	11.285,65	72,93	7.414,47	29,07	3.768	33,92	2.888,05	13,94

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

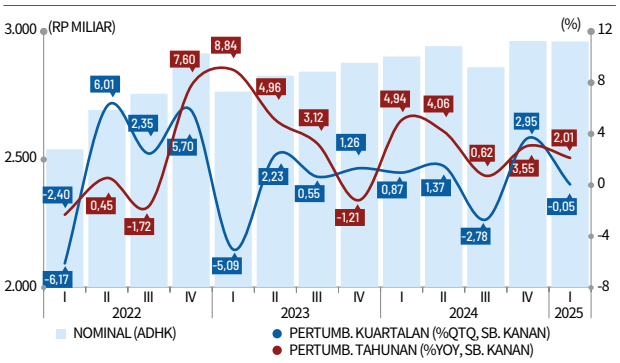

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.5 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

tangkap unggulan ekspor dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain ikan manyung, ikan sembilang, ikan sebelah, ikan bawal, cumi-cumi, dan ikan kakap[1].

Selain perikanan, subkategori perkebunan tahunan seperti komoditas kelapa sawit dan karet juga menjadi pendorong kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada triwulan laporan, produksi TBS secara umum masih terus berlanjut seiring dengan faktor cuaca yang masih mendukung produksi. Berdasarkan informasi liaison Bank Indonesia kepada pelaku usaha, panen TBS diprakirakan masih terus berlanjut hingga pertengahan triwulan II tahun 2025. Kinerja produksi tersebut, selanjutnya turut didukung oleh perkembangan harga global CPO yang terus melanjutkan kenaikan yang tinggi. Pada triwulan I 2025, harga rata-rata global CPO mencapai 1.059,70 USD/Mt, atau tumbuh sebesar 25,00% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 40,73% (yoy). Dari sisi ekspor, nilai ekspor CPO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 59,71 juta USD, tumbuh 14,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 4,36% (yoy).

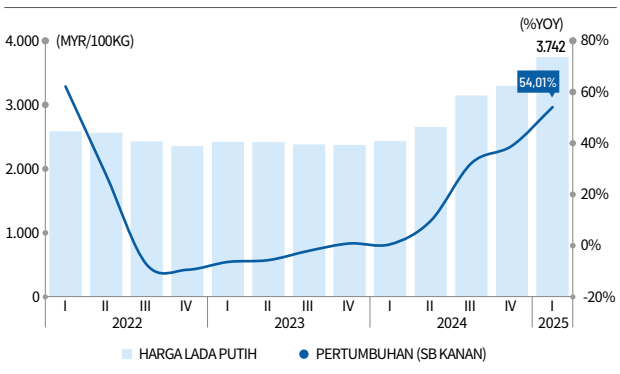

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.6 Perkembangan Harga Lada Internasional

1 Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025.

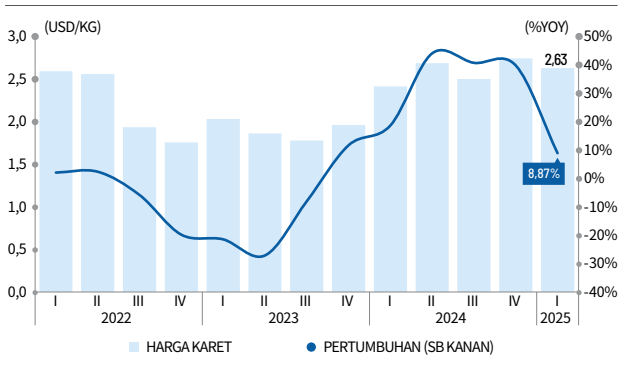

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.7 Perkembangan Harga Karet Internasional

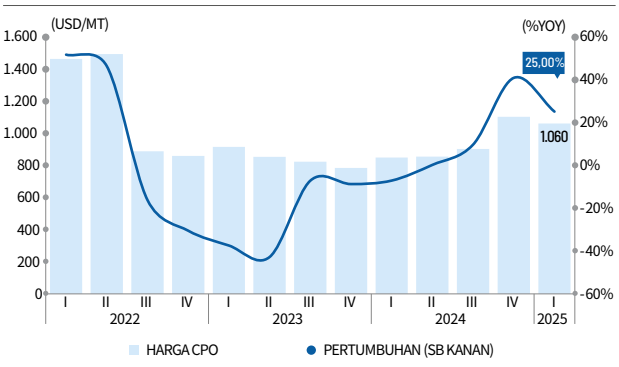

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Harga CPO Internasional

Sementara itu, membaiknya kinerja karet didukung oleh tingginya permintaan karet global, di tengah berkurangnya ketersediaan bahan baku di sejumlah negara penghasil karet dan produk turunannya. Selain itu, berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia terhadap sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan karet, meningkatnya produksi karet turut dipengaruhi oleh beralihnya pekerja dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam timah ke sektor perkebunan karet. Hal ini tecermin pada nilai ekspor karet yang tetap tumbuh tinggi pada triwulan I 2025, yaitu mencapai 44,90% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 56,11% (yoy). Dari sisi harga, harga global komoditas karet pada triwulan I 2025 mencapai 2,63 USD/kg, atau meningkat 8,88% (yoy) (Grafik 1.7).

Lebih lanjut, komoditas perkebunan tahunan lainnya, yaitu lada masih mencatatkan kinerja yang positif, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai ekspor lada dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh mencapai 48,14% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 105,18% (yoy). Tetap tumbuhnya nilai ekspor lada ditopang oleh kinerja harga lada global yang meningkat sebesar 54,01% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,92% (yoy). Sebagai salah satu komoditas unggulan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kenaikan harga lada tersebut menjadi angin segar bagi para petani untuk terus memperkuat produksi lada dan mendorong subsektor tanaman perkebunan yang sebelumnya mulai banyak mengalami peralihan tanaman.

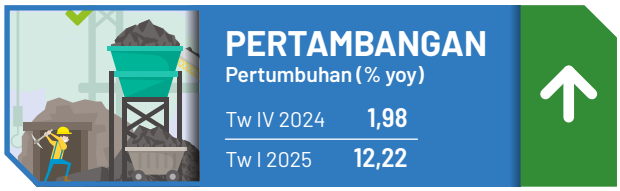

LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh 12,22% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,98% (yoy) (Grafik 1.9). Akselerasi LU Pertambangan utamanya berasal dari komoditas strategis bijih timah. Hal ini disebabkan aktivitas produksi bijih timah telah dimulai sejak bulan Januari 2025, sejalan dengan telah diperolehnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk 3 tahun (2024 – 2026). Penerbitan RKAB tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana perizinan RKAB pertambangan mineral dan batubara, termasuk timah akan diterbitkan untuk per 3 tahun, dari sebelumnya per 1 tahun.

Kinerja positif LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I 2025 turut didukung *baseline* aktivitas produksi bijih timah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak adanya realisasi produksi maupun ekspor timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Januari – Februari 2024, akibat masih belum disetujuinya RKAB berbagai perusahaan timah. Capaian ini tecermin pada volume ekspor logam timah. Pada triwulan I 2025, volume ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh mencapai 274,17% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2024.

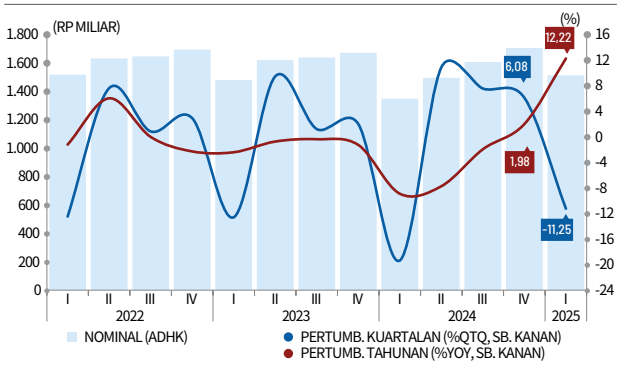

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.9 Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian

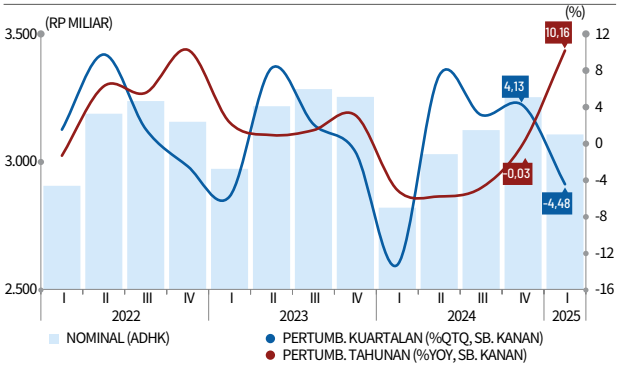

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.10 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Ke depan, komoditas logam timah diperkirakan masih memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini didorong oleh kuatnya permintaan global dari sektor semikonduktor, serta berlanjutnya tren penggunaan *renewable energy* dan *Electric Vehicle.* Untuk menangkap peluang tersebut, hilirisasi dan investasi di sektor timah menjadi kunci utama pendorong kinerja timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dukungan kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, tren menuju produk ramah lingkungan, serta stabilitas global, menjadi modal utama untuk mencapai kinerja timah yang lebih tinggi.

LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 tumbuh positif, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2025, kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh mencapai 10,16% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,03% (yoy) (Grafik 1.10). Membaiknya pertumbuhan LU Industri Pengolahan ditopang oleh subkategori industri logam dasar timah, dan diikuti oleh subkategori industri makanan dan minuman, khususnya yang berasal dari industri minyak kelapa sawit/CPO. Seiring dengan perbaikan LU Pertambangan dan Penggalian, tumbuhnya subkategori industri logam dasar timah dipengaruhi oleh telah dimulainya produksi dan ekspor logam timah pada Januari 2025. Hal ini turut didukung *baseline effect,* dimana pada Januari – Februari 2024 tercatat bahwa tidak terdapat realisasi produksi dan ekspor timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun pada triwulan laporan, volume ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil tumbuh signifikan mencapai 221,43% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 16,24% (yoy). Dari sisi nilai, total nilai ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 sebesar USD 324,66 juta, atau tumbuh sebesar 274,17% (yoy). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nilai ekspor timah pada triwulan sebelumnya sebesar 4,25% (yoy). Tumbuhnya nilai ekspor timah lebih lanjut turut didukung oleh kondisi harga timah global, dimana pada triwulan laporan, rata-rata harga timah global mencapai USD 31.979,19/Mton, atau tumbuh 20,98% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, pada subkategori industri makanan dan minuman, pertumbuhan utamanya ditopang oleh industri minyak kelapa sawit/CPO seiring dengan masih baiknya produksi CPO. Lebih lanjut, subkategori industri makan minum olahan ikan juga berkontribusi mendorong akselerasi pertumbuhan LU Industri Pengolahan. Capaian ini didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat terhadap produk olahan ikan seiring dengan momentum perayaan HBKN Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025.

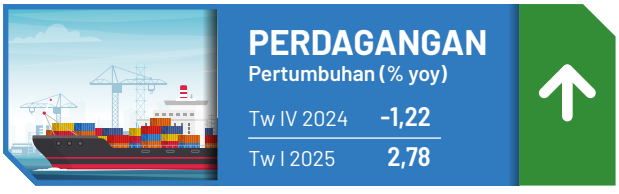

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh setelah triwulan sebelumnya terkontraksi. Pada triwulan I

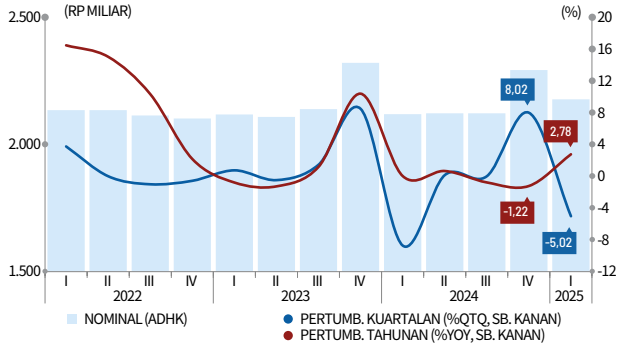

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.11 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

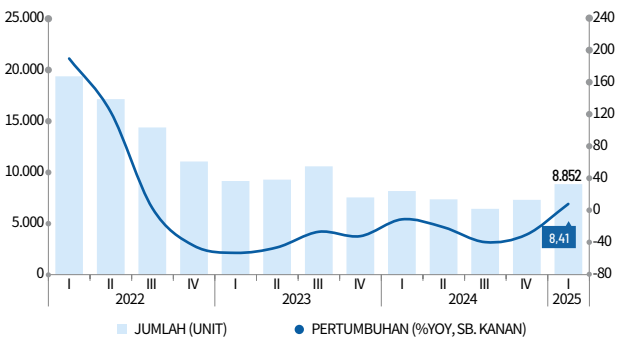

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Baru

2025, LU Perdagangan tumbuh 2,78% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,22% (yoy) (Grafik 1.11). Membaiknya pertumbuhan LU Perdagangan utamanya ditopang oleh meningkatnya volume barang yang diperdagangkan, yang dipengaruhi oleh momentum perayaan HBKN Ramadan dan menjelang Idulfitri 1446 H sehingga mendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai *event* yang dilaksanakan sepanjang triwulan I 2025 turut mendukung pertumbuhan kinerja LU Perdagangan, seperti Festival Cap Go Meh dan menjelang Cengbeng yang diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kinerja LU Perdagangan lebih lanjut turut didukung oleh meningkatnya jumlah pembelian kendaraan baru di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah total pendaftaran kendaraan baru pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 8,41% (yoy), sangat membaik dibandingkan triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yang terus mengalami kontraksi. Adapun jumlah total pendaftaran kendaraan baru untuk roda 2 pada triwulan I 2025 tumbuh 13,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 29,79% (yoy). Sementara itu, jumlah total pendaftaran kendaraan baru untuk roda 4 mengalami kontraksi sebesar 36,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 18,98% (yoy) (Grafik 1.12).

Hal ini juga sebagaimana tecermin melalui pertumbuhan kredit kendaraan bermotor yang menunjukkan perbaikan. Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor untuk motor roda 2 mengalami kontraksi 18,57% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 28,17% (yoy). Sementara itu, kredit kendaraan bermotor untuk mobil roda 4 mengalami kontraksi 7,58% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 5,53% (yoy) (Grafik 1.13).

LU Konstruksi pada triwulan I 2025 terkontraksi 2,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,43% (yoy) (Grafik

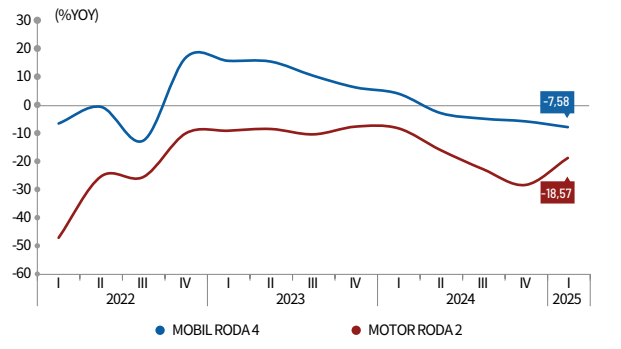

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.13 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) Kendaraan Bermotor

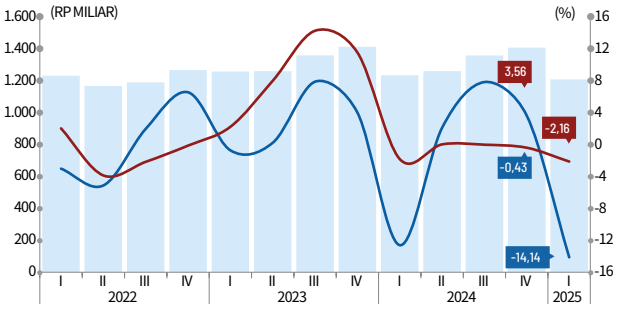

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.14 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

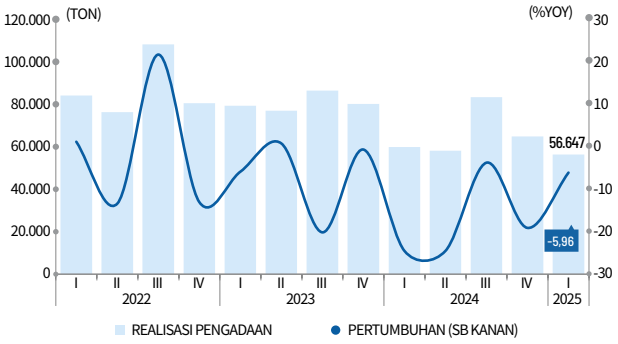

Sumber: Asosiasi Pengadaan Semen (ASI), diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen

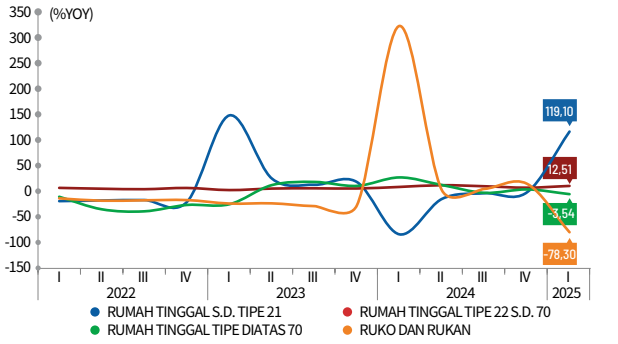

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Kredit Kepemilikan Tempat Tinggal

1.14). Perlambatan kinerja LU Konstruksi dipengaruhi oleh turunnya realisasi proyek fisik oleh pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti jalan, jembatan, maupun perumahan. Penurunan tersebut sebagaimana sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan prioritasi belanja pemerintah, sehingga dilakukan *tagging* dan penghematan rekening belanja modal tertentu dalam rangka menjaga likuiditas keuangan.

Lebih lanjut, terkontraksinya kinerja LU Konstruksi tecermin dari realisasi pengadaan semen yang masih melanjutkan kontraksi. Pada triwulan laporan, realisasi pengadaan semen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 56.647 ton atau terkontraksi 5,96% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi dari triwulan sebelumnya sebesar 19,04% (yoy) (Grafik 1.15).

Penurunan kinerja LU Konstruksi turut tecermin dari tingkat pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan untuk rumah tangga (RT), yaitu kredit kepemilikan rumah. Kredit RT untuk kepemilikan rumah tinggal tipe diatas 70 mengalami kontraksi 3,54% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 5,70% (yoy). Selain itu, kredit RT untuk kepemilikan rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) terkontraksi sangat dalam mencapai 78,30% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 16,73% (yoy). Meskipun demikian, kredit RT untuk rumah tinggal sampai dengan tipe 21 dan rumah tinggal tipe 22 sampai dengan 70 masih tumbuh positif.

1.2 PDRB MENURUT PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif triwulan I 2025 tercatat pada komponen pengeluaran antara lain Impor Barang dan Jasa; Ekspor Barang dan Jasa; Konsumsi Rumah Tangga; dan Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Sementara itu, komponen Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melanjutkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan laporan. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja pemerintah atas barang dan jasa, maupun belanja modal, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan pengeluaran, komponen Konsumsi Rumah Tangga memiliki porsi terbesar dalam PDRB triwulan I 2025, yaitu sebesar 56,65% dan memberikan andil 0,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan

Tabel 1.3 Pertumbuhan Tahunan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (% yoy)

KOMPONEN	2022				2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,85	4,92	5,65	3,60	3,01	1,87	3,75	4,35	4,25	2,82	1,26	0,61	1,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,92	4,63	5,58	4,31	3,81	5,05	1,04	12,16	17,00	8,35	-0,56	6,42	3,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,16	-0,97	2,87	8,76	8,33	3,18	0,08	11,07	17,32	3,23	2,96	-0,38	-4,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,54	0,56	2,89	3,39	1,98	5,37	8,04	4,19	-0,27	0,25	-1,79	-1,25	-2,85
5. Ekspor Barang dan Jasa	10,38	24,20	-13,57	-18,26	-30,79	-18,48	-14,99	-8,19	-37,86	-33,26	-0,11	1,83	87,86
6. Impor Barang dan Jasa	16,13	23,36	-19,29	-24,65	-48,26	-28,08	-21,19	-9,98	-57,75	-45,55	0,77	-0,38	184,00
Produk Domestik Regional Bruto	3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	5,13	4,00	4,00	1,01	1,02	0,13	0,94	4,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

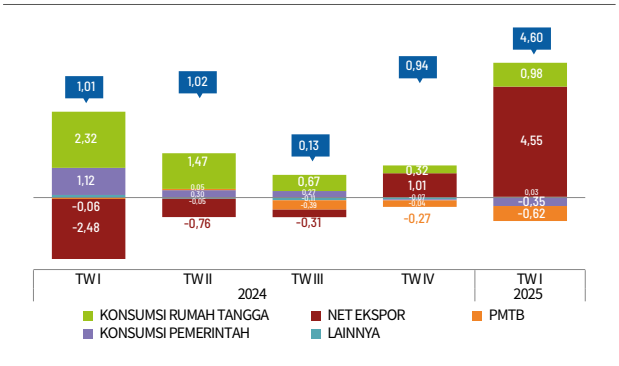

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.17 Andil Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

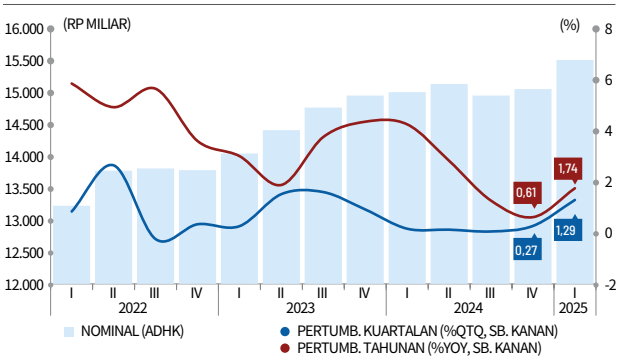

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

sebelumnya dengan andil 0,32% (yoy) (Grafik 1.17). Komponen Konsumsi Pemerintah memberikan andil negatif sebesar 0,35% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberikan andil negatif sebesar 0,04% (yoy). Komponen PMTB turut memberikan andil negatif terhadap perekonomian triwulan I 2025 sebesar 0,62% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberikan andil negatif sebesar 0,27% (yoy). Sementara itu, komponen Net Ekspor mencatatkan andil terbesar mencapai 4,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang memberikan andil 1,01% (yoy).

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2025 tumbuh lebih tinggi dan memberikan andil tertinggi kedua terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kinerja Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 1,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,61% (yoy) (Grafik 1.18). Terakselerasinya kinerja Konsumsi Rumah Tangga ditopang oleh meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri, Imlek, dan memasuki Cengbeng, yang turut didukung oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/PNS, maupun pegawai swasta. Berbagai *event* yang dilaksanakan sepanjang triwulan I 2025 turut mendorong perbaikan Konsumsi Rumah Tangga, seperti Festival Cap Go Meh dan menjelang Cengbeng yang diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Membaiknya konsumsi masyarakat tecermin dari pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan kepada rumah tangga yang tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan I 2025, kredit/pembiayaan rumah tangga tumbuh 3,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,19% (yoy) (Grafik 1.19). Sejalan dengan semakin tingginya kredit rumah tangga, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2025 tumbuh positif 2,31% (yoy). Capaian tersebut menjadi pertumbuhan DPK tertinggi, setelah sebelumnya sepanjang tahun 2024 selalu mengalami kontraksi. Dari sisi risiko, risiko kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) kredit rumah tangga pada triwulan I 2025 masih terjaga sebesar 1,99%, namun relatif meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 1,79%.

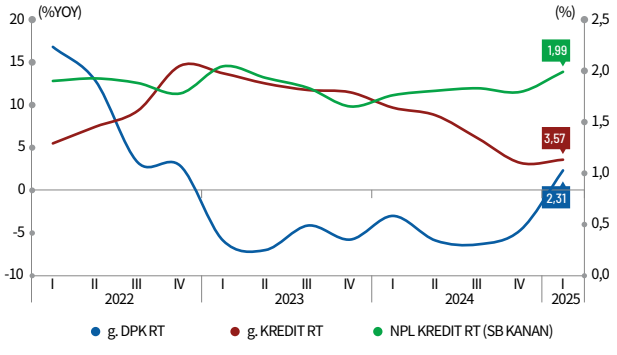

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL Rumah Tangga (RT)

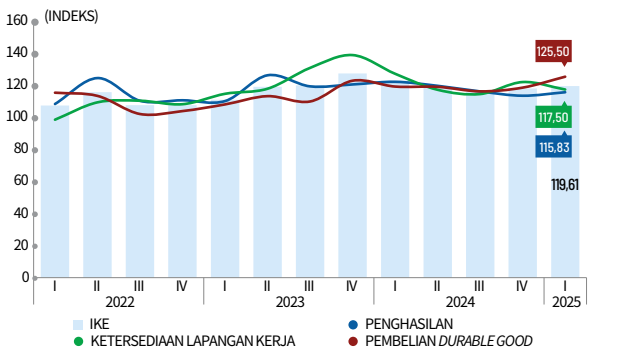

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat Ini (IKE)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) pada triwulan I 2025 tetap berada pada level optimis (lebih dari 100) sebesar 119,61, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 118,78 (Grafik 1.20). Kenaikan tersebut utamanya bersumber dari kenaikan komponen pembelian *durable goods* menjadi 125,50 dari triwulan IV 2024 sebesar 118,67. Komponen indeks penghasilan turut menunjukkan kenaikan menjadi 115,83, dari triwulan sebelumnya sebesar 113,67.

Kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 melanjutkan kontraksi. Konsumsi Pemerintah terkontraksi 4,68% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,38% (yoy) (Grafik 1.21). Melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga mengakibatkan Pemerintah untuk mengurangi belanja, dan menahan (*tagging*) belanja, terutama untuk belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sebesar Rp2,39 triliun, terkontraksi 0,87% (yoy) dibandingkan pagu anggaran tahun 2024. Sementara itu, pagu anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sebesar Rp2,49 triliun, atau terkontraksi 4,88% (yoy) dibandingkan pagu anggaran tahun 2024. Kontraksi tersebut utamanya berasal dari komponen Belanja Modal yang mengalami kontraksi sebesar 33,86% (yoy) dibandingkan pagu anggaran tahun 2024.

Dari sisi pendapatan, realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi beberapa kendala. Penghasilan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat dinamika komoditas unggulan timah, menyebabkan turunnya kepatuhan wajib pajak, khususnya Pajak

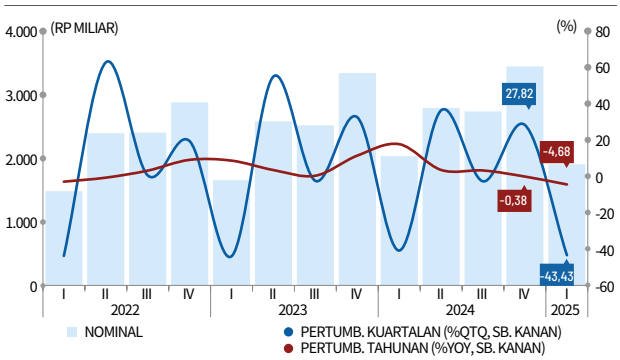

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Lebih lanjut, sebagian kendaraan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga teridentifikasi masih menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai imbasnya, penyerapan PAD menjadi belum optimal, sehingga menahan kinerja Konsumsi Pemerintah.

Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja daerah pada triwulan I 2025 turut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sebagaimana sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, ditengah belum pulihnya pendapatan daerah. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penghematan, pemotongan, serta pergeseran anggaran belanja tertentu, utamanya belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dinilai belum priotitas.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I 2025 terkontraksi 2,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy) (Grafik 1.22). Masih terkontraksinya kinerja PMTB tersebut dipengaruhi oleh turunnya realisasi investasi fisik pemerintah, antara lain belanja modal

daerah dalam bentuk bangunan seperti pembangunan gedung, jalan, dan sejenisnya. Sementara itu, belanja non-bangunan seperti pengadaan mesin dan perlengkapan, kendaraan, serta penyaluran bantuan modal mesin bagi masyarakat juga mengalami penurunan pada triwulan laporan.

Turunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga untuk menjaga efisiensi anggaran daerah, Pemerintah melakukan *tagging* rekening belanja modal tertentu, serta melakukan efisiensi belanja modal yang dinilai belum prioritas.

Kontraksi kinerja PMTB lebih lanjut turut dipengaruhi oleh masih turunnya jumlah pembelian kendaraan baru di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada triwulan I 2025, jumlah pendaftaran kendaraan baru untuk roda 4 pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar 36,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 18,98% (yoy). Di sisi lain, jumlah pendaftaran kendaraan baru untuk roda 2 mulai menunjukkan perbaikan.

Sementara itu, berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total realisasi investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 mencapai Rp2,58 triliun, atau mengalami kontraksi 20,63% (yoy). Nilai tersebut berbeda arah dibandingkan realisasi investasi triwulan IV 2024 yang tumbuh mencapai 279,60% (yoy). Perlambatan realisasi investasi dimaksud tecermin pula pada data kredit untuk investasi. Pada triwulan I 2025, kredit investasi berdasarkan lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh mencapai 24,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 31,70% (yoy).

Ke depan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPMPTSP) senantiasa berupaya mendorong investasi

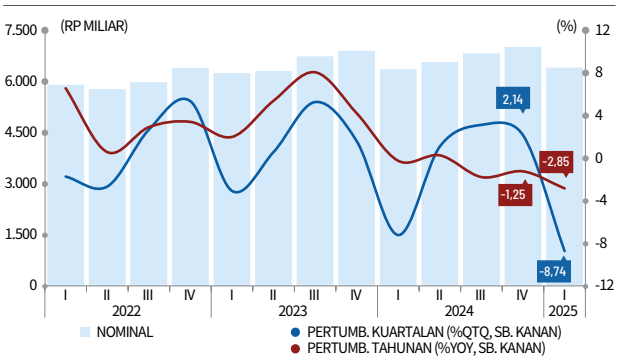

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan PMTB

di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tecermin melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Adapun peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, di mana Gubernur dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal. DPMPTSP turut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh perizinan investasi atau penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh signifikan. Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 87,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,83% (yoy) (Grafik 1.23). Catatan yang sangat baik ini utamanya didorong oleh kinerja ekspor komoditas strategis timah, yang sudah mulai diekspor sejak Januari 2025. Dibandingkan tahun 2024, tercatat bahwa tidak terdapat realiasi ekspor timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Januari – Februari 2024. Selain timah, komoditas unggulan perkebunan seperti CPO dan karet, serta produk ikan dan udang turut memberikan kontribusi positif terhadap akselerasi ekspor pada triwulan laporan.

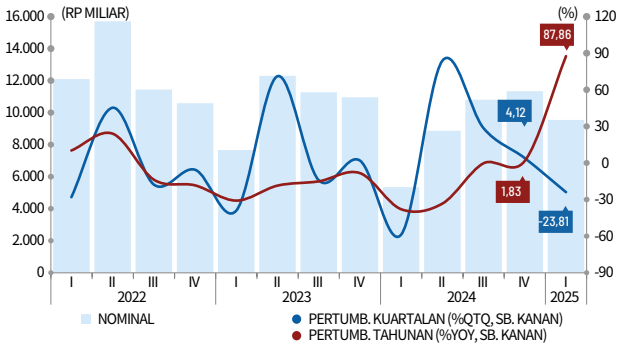

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

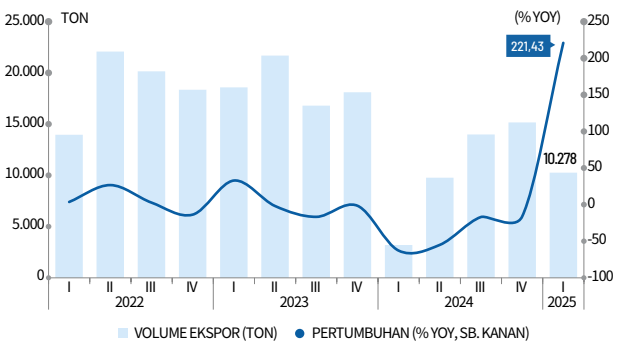

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Volume Ekspor Timah

Pada triwulan I 2025, total nilai ekspor logam timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 324,66 juta USD, atau tumbuh 274,17% (yoy). Nilai tersebut tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,25% (yoy). Hal ini turut didukung oleh harga timah global seiring dengan solidnya permintaan global, ditengah meningkatnya kekhawatiran konsumen timah global atas kendala produksi timah di Myanmar dan Republik Kongo pada triwulan I 2025. Adapun harga rata-rata global timah sepanjang triwulan I 2025 sebesar 31.979,19 USD/Mt, tumbuh 20,98% (yoy), meskipun relatif melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 23,15% (yoy).

Dari sisi komoditas perkebunan, total volume ekspor CPO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja harga CPO yang masih bertahan tinggi, selanjutnya mendorong nilai ekspor CPO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 sebesar 59,71 juta USD. Nilai tersebut tumbuh 14,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,36% (yoy). Adapun rata-rata harga CPO global pada triwulan I 2025 sebesar 1.509,70 USD/Mt, atau tumbuh 25,00% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata harga pada triwulan sebelumnya mencapai 40,73% (yoy).

Komoditas perkebunan lainnya, seperti karet dan lada turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja ekspor triwulan I 2025. Ditengah tingginya permintaan global, ketersediaan pasokan karet global masih menurun seiring dengan semakin masifnya alih fungsi lahan karet menjadi komoditas lainnya. Hal ini tecermin pada rata-rata harga karet global pada triwulan I 2025 sebesar 2,63 USD/kg, atau tumbuh 8,88% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seiring dengan hal tersebut, nilai ekspor karet Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan laporan mencapai 6,53 juta USD, atau tumbuh 44,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, nilai tersebut melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 56,11% (yoy).

Lebih lanjut, harga global lada terus melanjutkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada triwulan I 2025, rata-rata harga lada global sebesar 3.741,70 MYR/100 kg, atau

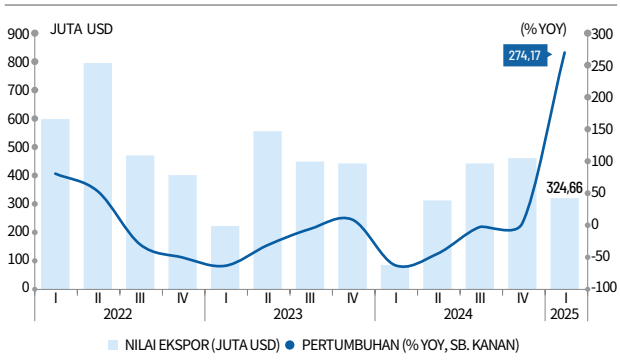

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Nilai Ekspor Timah

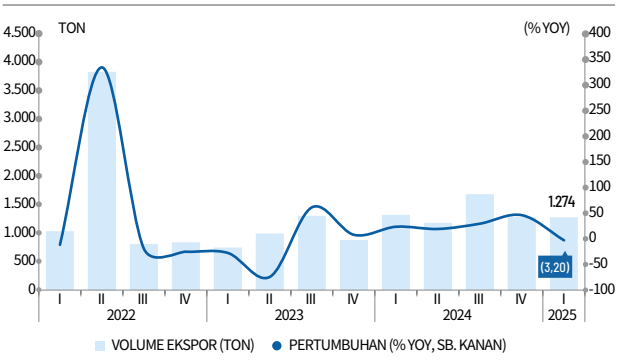

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Volume Ekspor Lada

tumbuh sebesar 54,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 38,92% (yoy). Melonjaknya harga lada global utamanya didorong oleh naiknya permintaan dari negara-negara pasar utama, ditengah penurunan pasokan akibat kondisi cuaca dan adanya peralihan jenis tanaman lada menjadi tanaman lainnya oleh para petani. Kinerja harga yang sangat baik ini kemudian mendorong capaian nilai ekspor lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 11,93 juta USD, atau tumbuh signifikan 48,14% (yoy), meskipun cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 105,18% (yoy).

Dari sisi komoditas perikanan, total nilai ekspor komoditas perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 sebesar 7,41 juta USD, atau tumbuh 29,07% (yoy). Nilai tersebut tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 73,29% (yoy). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jenis perikanan tangkap unggulan ekspor dari Provinsi

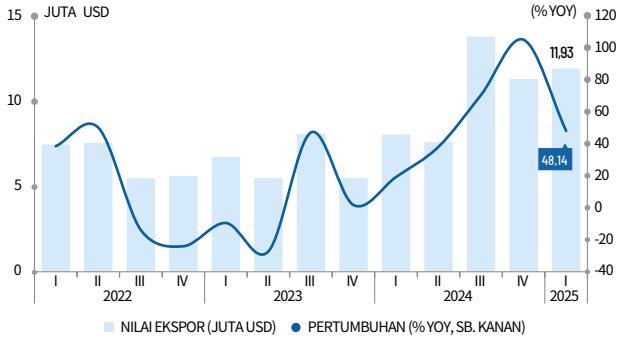

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.27 Perkembangan Nilai Ekspor Lada

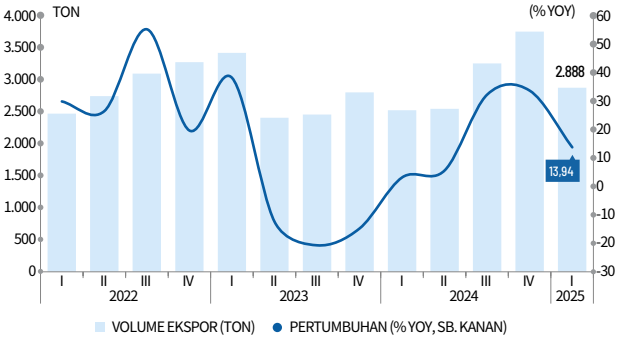

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.28 Perkembangan Volume Ekspor Perikanan

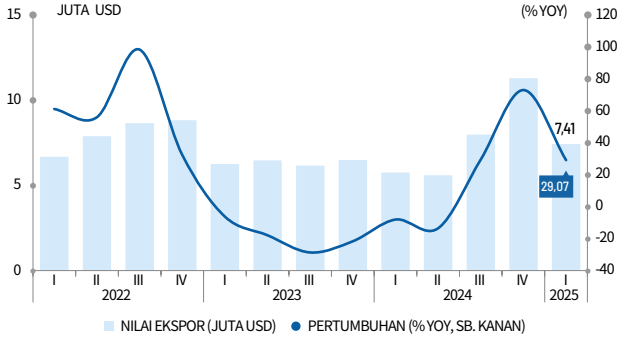

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.29 Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan

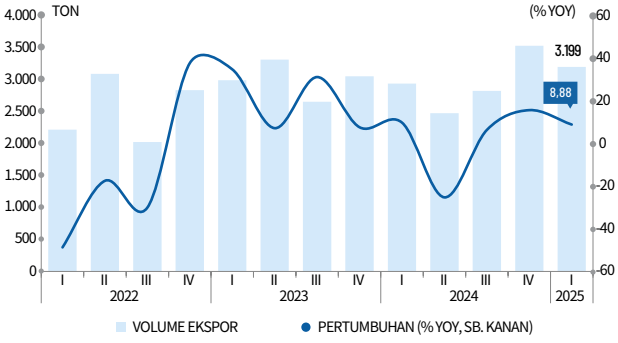

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.30 Perkembangan Volume Ekspor Karet

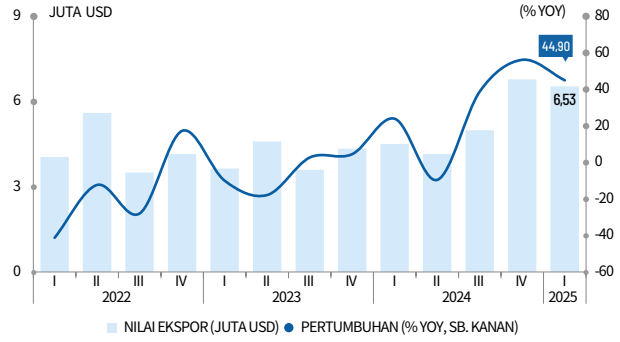

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.31 Perkembangan Nilai Ekspor Karet

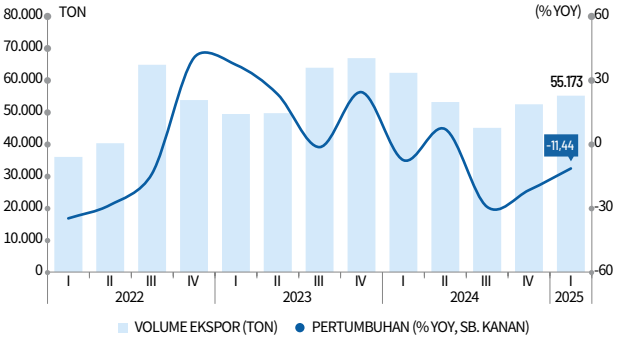

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Volume Ekspor CPO

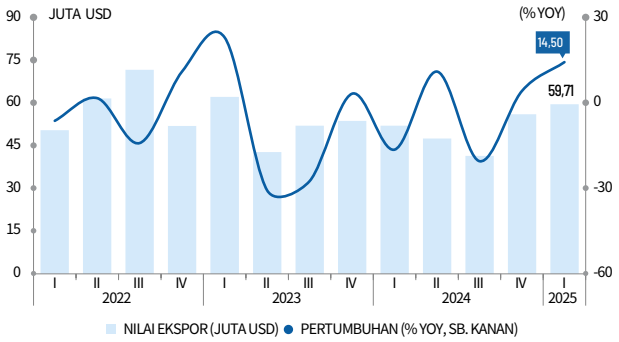

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.33 Perkembangan Nilai Ekspor CPO

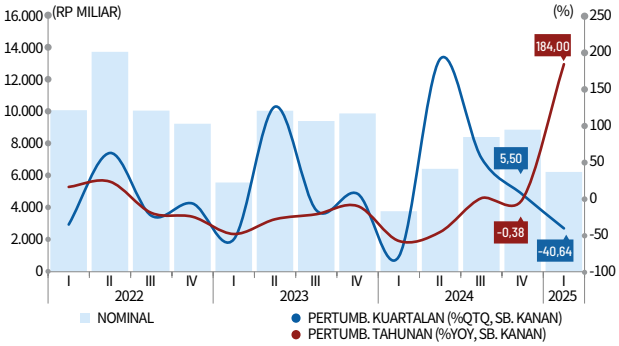

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.34 Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan laporan antara lain ikan manyung, ikan sembilang, ikan sebelah, ikan bawal, cumi-cumi, dan ikan kakap. Produk perikanan tersebut utamanya ditujukan ke negara-negara Asia antara lain Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

Impor Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tumbuh mencapai 184,00% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,38% (yoy) (Grafik 1.34). Tingginya realisasi impor sebagaimana sejalan dengan akselerasi kinerja ekspor yang didorong oleh sudah mulai berjalannya ekspor timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Januari 2025. Hal ini karena sebagian besar impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan peralatan dan perlengkapan untuk sektor industri pengolahan.

Lebih lanjut, impor ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 hanya terdiri dari impor komoditas nonmigas, dan tidak terdapat realisasi impor komoditas migas. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai total impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 senilai 1,62 juta USD, atau tumbuh 54,55% (yoy). Nilai tersebut tumbuh 54,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 32,47% (yoy). Dari sisi jenis komoditas, komoditas kapal laut dan bangunan terapung mendominasi komoditas yang diimpor pada triwulan laporan, dengan pangsa mencapai 96,52%. Posisi tersebut diikuti komoditas mesin atau pesawat mekanik dengan pangsa 3,25% (Grafik 1.36).

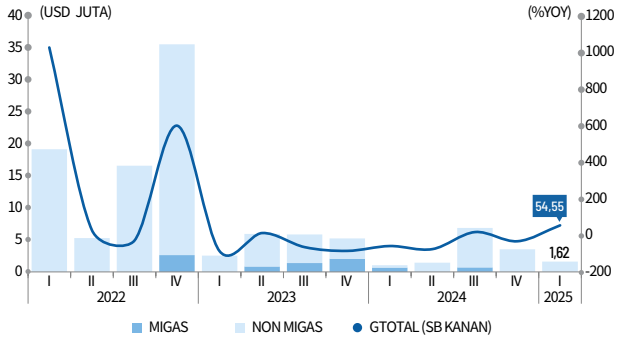

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor

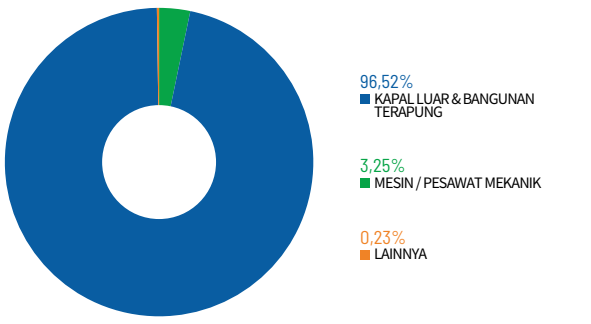

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.36 Pangsa Barang Impor

BOKS 1

5th Bekisah: Sinergi & Inovasi Ekonomi Keuangan Syariah Untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi Bangka Belitung

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B1.1 Tabligh Akbar bersama Ustadz Dr. H. Das'ad Latif

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu solusi strategis yang mampu memperkuat fondasi perekonomian sekaligus menebarkan manfaat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.. Memahami pentingnya hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai program inovatif dan kolaborasi lintas sektoral. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan **Bangka Belitung Ekonomi & Keuangan Syariah (BEKISAH)** yang pada tahun 2025 telah memasuki penyelenggaraan tahun ke-5.

Mengusung tema "Sinergi Inovasi Keuangan Syariah: Memperkuat Transformasi Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat," BEKISAH 2025 menjadi wadah penting untuk memperkuat literasi, inklusi, dan implementasi keuangan syariah ditengah masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera. Diselenggarakan selama tiga hari, yakni pada 23 hingga 25 April 2025, BEKISAH tahun ini diisi dengan beragam kegiatan yang mencakup *side event* dan *main event* yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta mendorong peran aktif lembaga keuangan, pelaku usaha, pondok pesantren, hingga institusi pendidikan.

Rangkaian *side event* BEKISAH yang telah berlangsung sejak Februari 2025 berhasil menciptakan ruang kolaborasi yang luas. Diantaranya adalah pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hebitren Bangka Belitung pada 18 Februari 2025 sebagai motor penggerak penguatan ekonomi berbasis pesantren, serta partisipasi aktif dalam berbagai bazar Ramadan yang diselenggarakan mitra strategis untuk mendorong geliat UMKM halal. Kegiatan lainnya meliputi Dialog TVRI bertema "Membangun Ekonomi melalui Pondok Pesantren" pada 14 Maret 2025, yang memperkuat peran pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi umat, serta sosialisasi literasi ekonomi syariah bersinergi dengan program Cinta Bangga Rupiah (CBP) di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Kota Pangkalpinang. Tak hanya itu, aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian melalui sosialisasi *Laik Hygiene Sanitasi* untuk Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS) pada 18 Maret 2025 bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian dan sosialisasi wakaf dalam rangka memperingati Nuzulul Quran pada 21 Maret 2025 turut memperkaya pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif. Rangkaian kegiatan *side event* ini ditutup dengan dialog publik melalui TVRI bertema "Penguatan

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B1.2 *Talkshow* Ekonomi Syariah Bersama Ustadz Abdul Mughni

Ekonomi Syariah melalui Ponpes dan Lembaga Wakaf" serta sosialisasi sertifikasi halal kepada 100 pelaku usaha dan lembaga pendidikan, termasuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Rumah Pemotongan Unggas (RPU), melalui kolaborasi dengan LPPOM MUI pada 23 April 2025.

Puncak kegiatan BEKISAH 2025 berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Pada hari pertama, ribuan masyarakat menghadiri Tabligh Akbar bersama Ustadz Dr. H. Das'ad Latif yang menjadi sarana memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan gaya hidup halal. Hari kedua diisi dengan *Talkshow* Ekonomi Syariah bertema "Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Pesantren dan Lembaga Wakaf", menghadirkan narasumber dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini semakin semarak dengan final lomba eksyar yang mencakup berbagai cabang seperti nasyid, pantun, dakwah, cerdas cermat, *fashion* muslim, hingga video *reels* syariah, yang juga dilaksanakan sebagai persiapan menuju Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera.

Pada hari ketiga, berbagai agenda penting dilaksanakan, diantaranya pengukuhan DPW Hebitren Bangka Belitung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hebitren, musyawarah organisasi, serta penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM, kantin sekolah, dapur pondok pesantren, hingga juru sembelih halal. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mendukung penyerahan akad pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM oleh lembaga keuangan syariah, serta meresmikan Program Wakaf Digital Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Satu Wakaf dan Rumah Wakaf. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem produk halal, kegiatan ini ditutup dengan *kick-off* Zona KHAS di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang.

Sepanjang pelaksanaan BEKISAH 2025, sejumlah capaian strategis berhasil diraih. Sebanyak 39 UMKM dan 12 layanan publik berpartisipasi aktif dengan total transaksi yang tercatat mencapai lebih dari Rp125 juta, menandakan geliat positif perekonomian lokal. Dari sisi edukasi, *booth* literasi syariah diikuti oleh 461 peserta

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B1.3 Peluncuran Program Wakaf Digital Bangka Belitung Kerja Sama dengan Satu Wakaf dan Rumah Wakaf

dengan capaian nilai rata-rata 91,57, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Program wakaf digital yang ditujukan untuk pembangunan fasilitas air bersih berhasil menghimpun dana lebih dari Rp10 juta, menjadi bukti nyata bahwa wakaf produktif mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Tak kalah penting, penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital semakin meluas, didorong oleh edukasi intensif mengenai kemudahan dan keamanan bertransaksi secara digital berbasis prinsip syariah.

Melalui inisiatif berkelanjutan seperti BEKISAH, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting dalam transformasi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat. Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis bahwa dengan kolaborasi yang semakin erat, ekonomi syariah akan menjadi motor penggerak utama bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Lada Putih.

BAB 2

KEUANGAN PEMERINTAH

Sampai dengan triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,92 triliun atau turun 3,47% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan I 2024. Realisasi tersebut setara dengan 21% dari pagu tahun 2025 yang sebesar Rp9,14 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp1,61 triliun atau setara dengan 16,21% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja daerah tersebut tumbuh 20,36% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja APBN kementerian/lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp521,94 miliar atau setara dengan 17,61% dari pagu.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi

Tw I 2024*	Tw I 2025**
19,85%	19,39%
Rp 507,55 M	Rp 463,64 M (-8,65% YoY)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab/Kota

Tw I 2024*	Tw I 2025**
21,91%	21,57%
Rp 1,48 T	Rp 1,46 T (-1,69% YoY)

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi

Tw I 2024*	Tw I 2025**
12,90%	15,51 %
Rp 387,97 M	Rp 386,93 M (-0,27% YoY)

Realisasi Belanja Pemerintah Kab/Kota

Tw I 2024*	Tw I 2025**
12,38%	16,44%
Rp 951,70 M	Rp 1,23 T (16,44% YoY)

Realisasi Belanja APBN

Tw I 2024*	Tw I 2025**
22,14%	17,61%
Rp 726,61 M	Rp 521,94 M (-28,17% YoY)

*terhadap Pagu 2023

**terhadap Pagu 2024

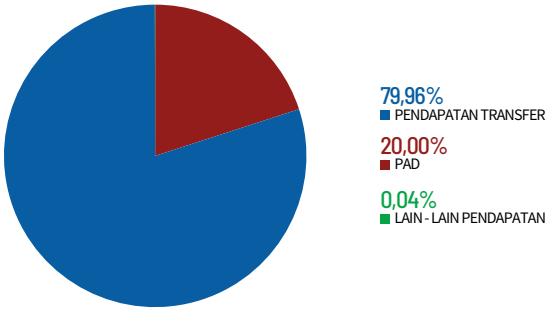

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025

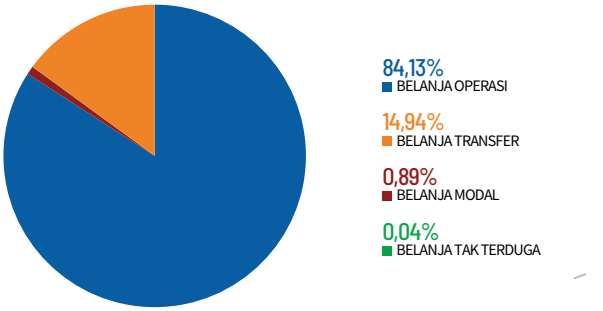

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025

2.1 GAMBARAN UMUM

Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,92 triliun atau setara dengan 21% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi tersebut terkontraksi 3,47% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,99 triliun. Penurunan realisasi pendapatan daerah hingga triwulan I 2025, didorong oleh realisasi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing turun 8,65% (yoy) dan 1,67% (yoy).

Realisasi belanja fiskal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 mencapai Rp2,13 triliun atau setara dengan 16,53% dari pagu. Realisasi tersebut meningkat sebesar 3,30% (yoy) dibandingkan realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya. Realisasi tersebut utamanya disumbang oleh kinerja belanja APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp1,23 triliun, meningkat sebesar 28,77% (yoy). Lebih lanjut, kinerja realisasi belanja APBN Provinsi dan K/L masing-masing sebesar Rp386,93 miliar atau terkontraksi 0,27% (yoy) dan Rp521,94 miliar atau terkontraksi 28,17% (yoy), menjadi faktor penahan laju pertumbuhan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pangsa, total realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh komponen pendapatan transfer sebesar 79,96%, disusul pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 20%, dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,04% (Grafik 2.1). Total realisasi komponen pendapatan transfer tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp1,53 triliun hingga triwulan I 2025. Realisasi tersebut disumbang oleh pendapatan transfer Kabupaten/Kota sebesar Rp1,21 triliun atau terkontraksi 6,11% (yoy) dan pendapatan transfer Provinsi sebesar Rp320,74 miliar atau terkontraksi 0,2% (yoy). Adapun total realisasi komponen PAD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada triwulan I 2025 sebesar Rp383,96 miliar. Realisasi tersebut disumbang oleh PAD Kabupaten/Kota sebesar Rp241,05 miliar atau tumbuh 29,79% (yoy) dan PAD Provinsi sebesar Rp142,91 miliar atau terkontraksi 23,23% (yoy). Sementara itu, realisasi lain-lain pendapatan daerah mencapai Rp0,69 miliar. Namun demikian, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan PAD, antara lain mengajukan kenaikan royalti timah kepada pemerintah pusat dan memaksimalkan pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan inovasi Program Samsat Keliling dan Samsat Setempoh *(door to door)* di berbagai kabupaten/kota.

Dari sisi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pangsa realisasi belanja daerah pada triwulan I 2025 didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar 84,13%, disusul belanja transfer sebesar 14,94%, belanja modal sebesar 0,89%, dan belanja tak terduga sebesar 0,04% (Grafik 2.2). Hingga triwulan I 2025, total realisasi komponen belanja operasi sebesar Rp1,36 triliun, belanja transfer sebesar Rp240,95 miliar, belanja modal sebesar Rp14,35 miliar, dan belanja tak terduga sebesar Rp0,59 miliar (Tabel 2.1).

Pagu pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp9,14 triliun, meliputi pendapatan APBD Provinsi sebesar Rp2,39 triliun dan pendapatan APBD Kabupaten/

Tabel 2.1 Ringkasan Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025

NO	KOMODITAS	ANGGARAN 2024 (RP MILIAR)	TW I 2024		PERTUMBUHAN (YOY)	ANGGARAN 20245 (RP MILIAR)	TW I 2025		PERTUMBUHAN (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
Pendapatan Daerah									
A.	**APBD Provinsi Kep Babel**								
I	PAD	1.096,47	186,16	16,98%	-7,69%	986,55	142,91	14,49%	-23,23%
II	Pendapatan Transfer	1.460,63	321,39	22,00%	19,05%	1.405,13	320,74	22,83%	-0,20%
III	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	0,00%	-		-	
Total A		2.557,10	507,55	19,85%	7,61%	2.391,68	463,64	19,39%	-8,65%
B.	**APBD Kabupaten/Kota di Babel**								
I	PAD	953,60	185,72	19,48%	4,49%	1.122,55	241,05	21,47%	29,79%
II	Pendapatan Transfer	5.760,09	1.292,99	22,45%	23,26%	5.607,69	1.214,01	21,65%	-6,11%
III	Lain-Lain Pendapatan	45,69	2,04	4,48%	-54,26%	19,05	0,69	3,62%	-66,28%
Total B		6.759,37	1.480,76	21,91%	20,27%	6.749,28	1.455,75	21,57%	-1,69%
Total Pendapatan		**9.316,47**	**1.988,31**	**21,34%**	**16,76%**	**9.140,96**	**1.919,39**	**21,00%**	**-3,47%**
Belanja Daerah									
A.	**Belanja APBD Provinsi Kep Babel**								
I	Belanja Operasi	2.082,68	308,75	14,82%	34,76%	2.002,39	315,48	15,76%	2,18%
II	Belanja Modal	351,76	0,69	0,20%	-96,34%	166,93	-	0,00%	-100,00%
III	Belanja Tak Terduga	33,70	-	0,00%	0,00%	37,05	-	0,00%	0,00%
IV	Belanja Transfer	539,42	78,52	14,56%	232,58%	288,11	71,45	24,80%	-9,01%
Total A		3.007,55	387,97	12,90%	42,86%	2.494,49	386,93	15,51%	-0,27%
B.	**Belanja APBD Kab/Kota di Babel**								
I	Belanja Operasi	6.013,56	830,56	13,81%	21,71%	5.974,29	1.041,07	17,43%	25,35%
II	Belanja Modal	932,43	19,01	2,04%	-60,14%	753,85	14,35	1,90%	-24,53%
III	Belanja Tak Terduga	60,27	0,67	1,12%	-72,64%	34,77	0,59	1,71%	-11,81%
IV	Transfer	679,48	101,45	14,93%	-43,21%	692,01	169,50	24,49%	67,08%
Total B		7.685,74	951,70	12,38%	4,44%	7.454,91	1.225,52	16,44%	28,77%
Total Belanja APBD		10.693,29	1.339,67	12,53%	13,26%	9.949,39	1.612,45	16,21%	20,36%
Surplus/Defisit APBD		-1376,82	648,65			-808,43	306,95	-37,97%	-0,53
C.	**Realisasi Belanja APBN Kementerian / Lembaga**								
I	Belanja Pegawai	1.219,75	335,60	27,51%	47,08%	1.278,77	364,65	28,52%	8,66%
II	Belanja Barang	1.462,23	340,37	23,28%	47,87%	1.119,91	143,79	12,84%	-57,75%
III	Belanja Modal	593,15	46,91	7,91%	-22,93%	554,73	9,04	1,63%	-80,73%
IV	Belanja Bansos	6,53	3,73	57,07%	54,63%	9,90	4,46	45,05%	19,68%
Total C		**3.281,66**	**726,61**	**22,14%**	**39,29%**	**2.963,31**	**521,94**	**17,61%**	**-28,17%**
Total Belanja		**13.974,95**	**2.066,27**	**14,79%**	**21,23%**	**12.912,70**	**2.134,39**	**16,53%**	**3,30%**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Kota sebesar Rp6,75 triliun. Berdasarkan pangsa, pagu pendapatan daerah pada triwulan I 2025 bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebesar 73,84% dan APBD Provinsi sebesar 26,16% (Grafik 2.3). Pagu pendapatan daerah tahun 2025 tersebut lebih rendah 3,42% (yoy) dibandingkan pagu pendapatan daerah tahun 2024. Penurunan pagu pendapatan pada tahun 2025 disebabkan oleh turunnya pagu komponen APBD pendapatan transfer, baik di tingkat provinsi yang turun 3,8% (yoy) maupun di tingkat kabupaten/kota yang turun 7,79% (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan oleh adanya penyesuaian nilai dana bagi hasil akibat belum optimalnya kinerja pertambangan timah pasca permasalahan tata niaga timah.

Total pagu anggaran belanja fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mencapai Rp12,91 triliun, meliputi Rp2,49 triliun belanja APBD Provinsi, Rp7,45 triliun belanja APBD Kabupaten/Kota, dan Rp2,96 triliun belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pangsa, pagu belanja daerah pada triwulan I 2025 bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebesar 57,73%, APBD Provinsi sebesar 19,32%, dan APBN

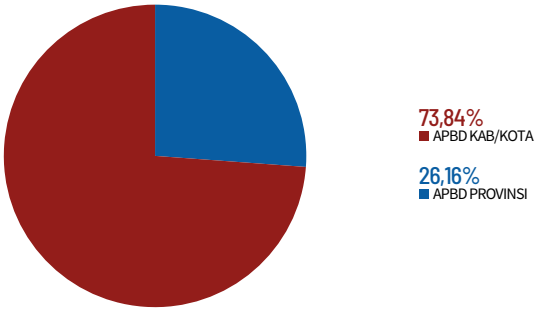

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.3 Pangsa Sumber Pagu Pendapatan Daerah Tahun 2025

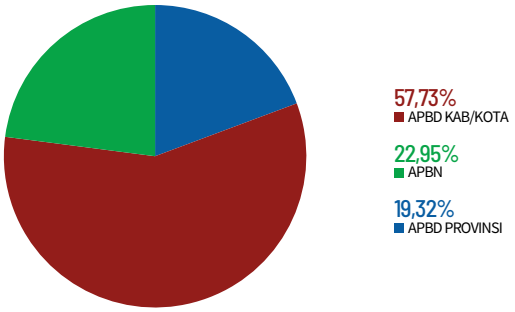

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.4 Pangsa Sumber Pagu Belanja Daerah Tahun 2025

K/L sebesar 22,95% (Grafik 2.4). Secara keseluruhan, terjadi penurunan pagu anggaran belanja fiskal daerah sebesar 7,85% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2024. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan anggaran pendapatan APBN K/L sebesar 19,97% (yoy). Selain itu, penurunan pagu pendapatan APBD Provinsi sebesar 4,88% (yoy) dan APBD Kabupaten/Kota sebesar 3,03% (yoy) juga menjadi faktor pendorong penurunan pagu pendapatan secara keseluruhan. Penurunan ini dilakukan sebagai respons atas dampak tidak optimalnya penerimaan dana bagi hasil sehingga terhadap beberapa pos belanja juga dilakukan penyesuaian sesuai kemampuan fiskal daerah. Lebih lanjut, dari sisi pagu belanja APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tumbuh pada komponen belanja tidak terduga sebesar 153,92% (yoy) dan 135,19% (yoy). Sementara itu dari sisi pagu belanja APBN K/L tumbuh pada komponen belanja bansos sebesar 21,03% (yoy).

2.2 APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN I 2025

2.2.1 Pagu APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2025, pagu anggaran pendapatan daerah tingkat provinsi sebesar Rp2,39 triliun (Grafik 2.5). Pagu pendapatan tersebut lebih rendah 0,87% (yoy) dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp2,42 triliun. Hal ini seiring dengan penurunan pagu pendapatan transfer sebesar 3,8% (yoy) menjadi Rp1,4 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun. Lebih lanjut, anggaran PAD tahun 2025 sebesar Rp986,55 miliar, naik 3,61% (yoy) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp952,15 miliar. Sementara itu, komponen pendapatan lainnya belum dianggarkan pada APBD Provinsi tahun 2025. Berdasarkan strukturnya, komponen pendapatan transfer masih menjadi alokasi pendapatan terbesar APBD Provinsi pada tahun 2025 dengan pangsa mencapai 58,75% (Grafik 2.7). Sementara itu, pangsa pagu PAD pada tahun 2025 mencapai 41,25%, yang utamanya bersumber dari komponen pajak daerah dengan pangsa 76,45% (Grafik 2.8).

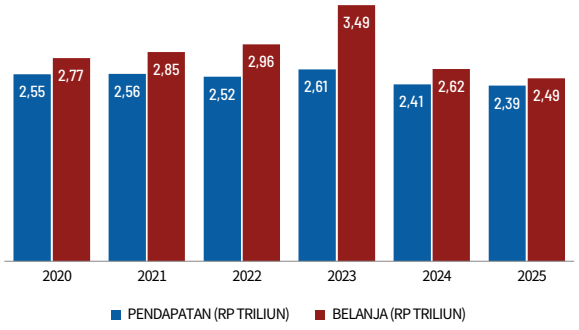

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Pagu APBD Provinsi 2020-2025

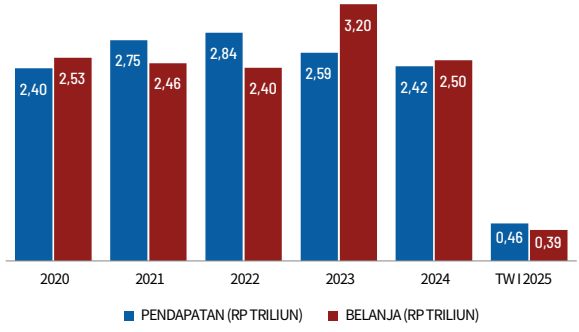

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi 2020- Triwulan I 2025

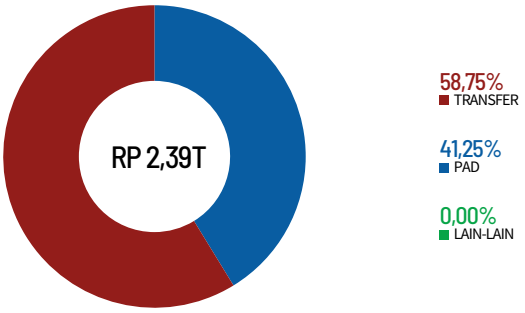

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.7 Pangsa Pagu Pendapatan APBD Provinsi Tahun 2025

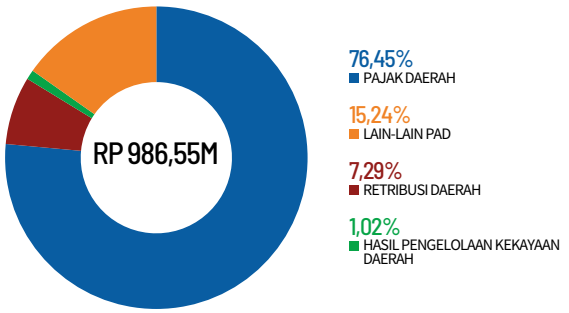

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.8 Pangsa Pagu PAD APBD Provinsi Tahun 2025

Pagu belanja daerah tingkat provinsi pada tahun 2025 sebesar Rp2,49 triliun atau lebih rendah 4,88% (yoy) dibandingkan anggaran belanja tahun 2024. Penurunan pagu belanja daerah tersebut terjadi pada komponen belanja modal dan belanja transfer. Pagu belanja modal tahun 2025 mencapai Rp166,93 miliar atau turun 33,86% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2024 sebesar Rp252,40 miliar. Pagu belanja transfer tahun 2025 sebesar Rp288,11 miliar atau turun 32,09% dibandingkan pagu tahun 2024 sebesar Rp424,27 miliar. Di sisi lain, pagu belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp2 triliun, meningkat sebesar 3,69% (yoy) dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp1,93 triliun. Sementara itu, pagu belanja tak terduga tahun 2025 mencapai Rp37,05 miliar atau meningkat 153,92% (yoy) dibandingkan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,59 miliar.

Berdasarkan strukturnya, komponen belanja operasi masih mendominasi alokasi belanja APBD Provinsi pada tahun 2025 dengan pangsa mencapai 80,27% (Grafik 2.9). Pagu belanja operasi tersebut utamanya bersumber dari komponen belanja pegawai dan belanja barang dengan pangsa berturut-turut sebesar 54,61% dan 42,19% (Grafik 2.10).

2.2.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025

Realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan I 2025 mencapai Rp463,64 miliar (Tabel 2.2). Realisasi tersebut terkontraksi 8,65% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp507,55 miliar. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan pagu, kinerja realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi mencapai 19,39%, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan I 2024 yang sebesar 19,85%.

Penurunan realisasi pendapatan daerah tersebut utamanya didorong oleh capaian realisasi PAD sebesar Rp142,91 miliar, terkontraksi sebesar 23,23% (yoy) dibandingkan realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp186,16 miliar. Lebih lanjut, penurunan realisasi pendapatan daerah lebih dalam juga didorong oleh kinerja realisasi pendapatan transfer yang tercatat sebesar Rp320,74 miliar atau turun 0,20% (yoy), utamanya

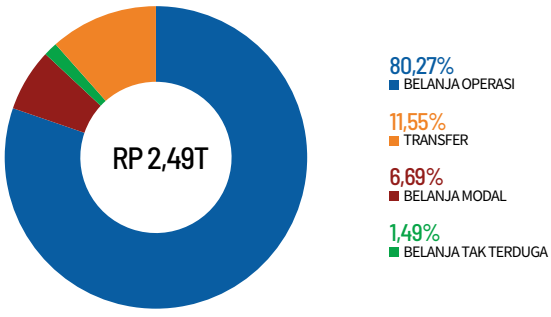

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.9 Pangsa Pagu Belanja APBD Provinsi Tahun 2025

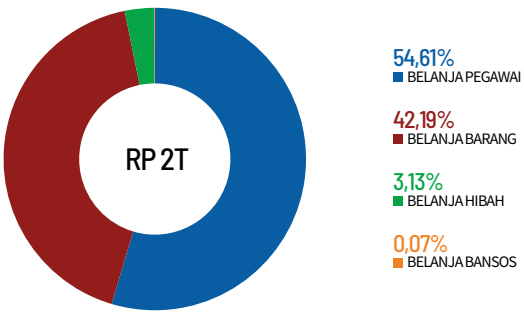

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.10 Pangsa Pagu Belanja Operasi APBD Provinsi Tahun 2025

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2024	S.D TW I TAHUN 2024		PERTUMBUHAN (YOY)	APBD TAHUN 2025	S.D TW I TAHUN 20245		PERTUMBUHAN (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
I	PAD	1.096,47	186,16	16,98%	-7,69%	986,55	142,91	14,49%	-23,23%
	a. Pajak Daerah	953,69	165,76	17,38%	-12,47%	754,19	127,49	16,90%	-23,09%
	b. Retribusi Daerah	60,93	6,13	10,07%	492,38%	71,89	7,94	11,05%	29,47%
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,53	8,74	83,02%	0,00%	10,08	-	0,00%	-100,00%
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71,32	5,53	7,75%	-50,93%	150,39	7,48	4,97%	35,30%
II	Pendapatan Transfer	1.460,63	321,39	22,00%	19,05%	1.405,13	320,74	22,83%	-0,20%
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	163,46	23,97	14,66%	-36,45%	125,57	21,51	17,13%	-10,27%
	b. Dana Alokasi Umum	1.011,57	295,25	29,19%	28,69%	1.043,97	299,13	28,65%	1,31%
	c. Dana Alokasi Khusus	285,60	2,17	0,76%	-23,03%	235,59	0,10	0,04%	-95,40%
	d. Dana Insentif Daerah	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III	Lain-Lain Pendapatan	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	a. Hibah	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	b. Pendapatan Lainnya	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Total Pendapatan	**2.557,10**	**507,55**	**19,85%**	**7,61%**	**2.391,68**	**463,64**	**19,39%**	**-8,65%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

didorong oleh penurunan dari komponen dana alokasi khusus yang hanya terealiasi sebesar Rp0,1 miliar, terkontraksi sebesar 95,4% (yoy) sebagai efek efisiensi anggaran pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2.2.2.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD pada triwulan I 2025 sebesar Rp142,91 miliar atau mencapai 14,49% dari pagu tahun 2025. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi PAD pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp186,16 miliar atau 16,98% dari pagu tahun 2024. Penurunan realisasi PAD hingga triwulan I 2025 disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 23,09% (yoy). Realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan laporan sebesar Rp127,49 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp165,76 miliar. Pendapatan pajak daerah memiliki pangsa 89,21% dari total realisai PAD (Grafik 2.12). Penerimaan pajak daerah ini bersumber dari pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak rokok.

Salah satu penyebab realisasi yang lebih rendah adalah menurunnya penerimaan pajak daerah karena terjadinya perlambatan pada sektor perdagangan yang mendorong kontraksi pada penerimaan pajak dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan baru pada triwulan I 2025 yang terkontraksi sebesar 36,05% (yoy) untuk kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 mulai tumbuh sebesar 13,39% (yoy). Selain itu, penurunan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berulang dan penurunan setoran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas dampak kebijakan penetapan bijih timah sebagai barang strategis yang dibebaskan dari PPN pada Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan tidak ada lagi pelaksanaan program relaksasi pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan pada tahun 2025. Untuk meningkatkan PAD ke depan, Pemerintah Provinsi akan melakukan kebijakan digitalisasi mekanisme pembayaran pajak yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya melalui koordinasi dengan Bank Sumsel Babel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk dapat menerapkan QRIS dinamis, serta mengintensifkan program Samsat Setempoh, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, pembukaan gerai samsat pada Mall Pelayanan Publik (MPP). Sementara itu, pembebasan BBNKB II,

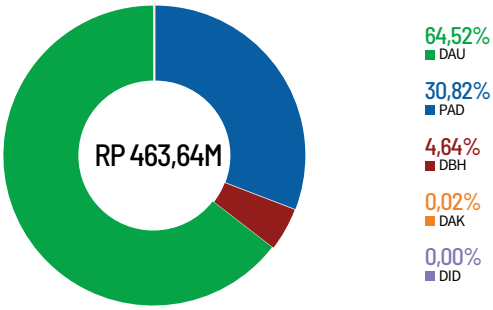

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.11 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Triwulan I Tahun 2025

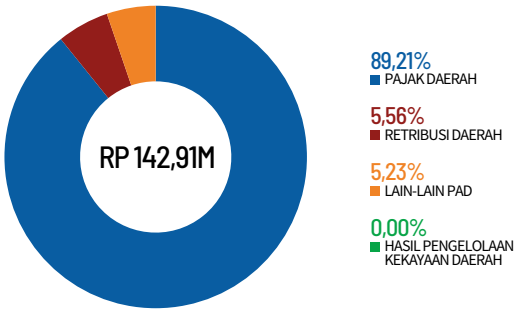

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.12 Pangsa Realisasi PAD APBD Provinsi Triwulan I Tahun 2025

BBNKB mutasi dari luar provinsi, dan pajak progresif untuk pemilik kendaraan lebih dari satu masih akan dilakukan sebagai stimulus penerimaan pajak.

2.2.2.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama pada realisasi pendapatan daerah Provinsi dengan pangsa 69,18% yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) 64,52%, Dana Bagi Hasil (DBH) 4,64%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,02% terhadap total realisasi pendapatan daerah triwulan I 2025 (Grafik 2.11). Realisasi pendapatan transfer pada triwulan I 2025 sebesar Rp320,74 miliar atau setara dengan 22,83% dari pagu. Kinerja realisasi tersebut lebih rendah 0,2% (yoy) dibandingkan kinerja realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22%. Berdasarkan sumbernya, komponen pendapatan transfer sebagian besar disumbang dari DAU dengan pangsa mencapai 93,26%, disusul DBH 6,71%, dan DAK 0,03%.

DAU merupakan komponen dana perimbangan yang bersumber dari APBN sebagai bagian dari perwujudan desentralisasi dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU tersebut berdasarkan *fiscal gap*[1] dan alokasi dasar[2]. Dana Bagi Hasil (DBH) ditujukan untuk mengatasi ketimpangan *fiscal vertical* (antara pemerintah pusat dan daerah), dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil. DAK ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik (DAK fisik) serta mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik (DAK non-fisik). Sebagian dana DAK tersebut ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai prioritas nasional dan berkaitan dengan infrastruktur.

2.2.3 Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025

Realisasi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga triwulan I 2025 mencapai Rp386,93 miliar

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2024	S.D TW I TAHUN 2024		PERTUMBUHAN (YOY)	APBD TAHUN 2025	S.D TW I TAHUN 20245		PERTUMBUHAN (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
1	Belanja Operasi	2.082,68	308,75	14,82%	34,76%	2.002,39	315,48	15,76%	2,18%
	a. Belanja Pegawai	957,27	227,04	23,72%	45,01%	1.093,42	241,67	22,10%	6,45%
	b. Belanja Barang	970,12	75,95	7,83%	16,57%	844,84	69,49	8,23%	-8,50%
	c. Belanja Hibah	153,06	5,63	3,68%	-23,83%	62,72	4,30	6,86%	-23,67%
	d. Belanja Bansos	2,23	0,14	6,15%	0,00%	1,40	0,16	11,40%	16,79%
	e. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2	Belanja Modal	351,76	0,69	0,20%	-96,34%	166,93	-	0,00%	-100,00%
3	Belanja Tak Terduga	33,70	0,00	0,00%	0,00%	37,05	-	0,00%	0,00%
4	Transfer	539,42	78,52	14,56%	232,58%	288,11	71,45	24,80%	-9,01%
	Total Belanja	**3.007,55**	**387,97**	**12,90%**	**42,86%**	**2.494,49**	**386,93**	**15,51%**	**-0,27%**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

1 Fiscal gap adalah kebutuhan fiskal meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikurangi dengan fiskal daerah (terdiri dari PAD dan DBH).

2 Alokasi dasar dihitung berdasarkan atas jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

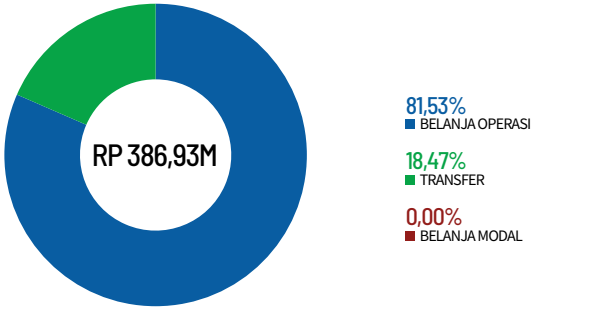

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.13 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan I 2025

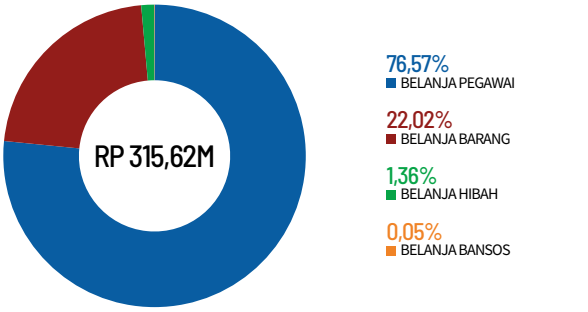

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.14 Pangsa Realisasi Belanja Operasi APBD Provinsi Triwulan I 2025

triliun atau setara dengan 15,51% dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp2,49 triliun (Tabel 2.3). Secara persentase, realisasi belanja daerah pada triwulan I 2025 meningkat dibandingkan capaian periode sama tahun lalu sebesar 12,9% dari total belanja sebesar Rp3 triliun atau setara dengan Rp387,97 miliar.

2.2.3.1 BELANJA OPERASI

Realisasi belanja operasi mendominasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp315,48 miliar dengan pangsa 81,53% terhadap total realisasi belanja APBD Provinsi pada triwulan I 2025 (Grafik 2.13). Realisasi belanja operasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kontributor utama realisasi belanja operasi didominasi oleh komponen belanja pegawai dengan pangsa 76,57% dari total belanja operasi triwulan I 2025 (Grafik 2.14). Peningkatan realisasi belanja operasi hingga triwulan I 2025 didorong oleh peningkatan realisasi belanja pada komponen belanja pegawai dan belanja bansos sebesar 6,45% (yoy) dan 16,79% (yoy). Sementara, pada komponen belanja barang dan belanja hibah terdapat penurunan realisasi sebesar 8,50% (yoy) dan 23,67% (yoy). Pertumbuhan belanja pegawai dipengaruhi peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan, sejalan dengan dicairkannya gaji ke-14 ASN pada Maret 2025. Sementara itu, penurunan belanja barang disebabkan oleh efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mempengaruhi penurunan realisasi belanja jasa dan perjalanan dinas.

2.2.3.2 BELANJA MODAL

Di sisi lain, masih belum terdapat realisasi belanja modal pada triwulan I 2025. Secara nominal, realisasi belanja modal pada triwulan I 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp0,69 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh masih tertahannya realisasi belanja modal akibat *tagging* anggaran belanja modal APBD Provinsi sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

2.2.3.3 BELANJA TRANSFER

Realisasi belanja transfer hingga triwulan I 2025 sebesar Rp71,45 miliar dengan realisasi 24,8% dari pagu tahun 2025. Secara persentase, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp78,52 miliar atau setara dengan 14,56% dari pagu. Realisasi belanja transfer terdiri atas komponen belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

2.3 APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN I 2025

2.3.1 Pagu APBD Kabupaten/Kota

Pagu pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sebesar Rp6,75 triliun, lebih rendah 4,29% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2024. Kabupaten Bangka merupakan wilayah dengan pangsa pagu pendapatan terbesar pada tahun 2025 (Grafik 2.15). Pagu anggaran pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 kecuali anggaran pendapatan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur yang meningkat sebesar 0,09% (yoy) dan 9,45% (yoy).

Pagu belanja seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 turun

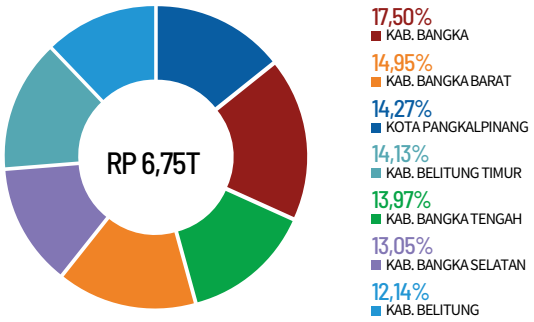

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.15 Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025

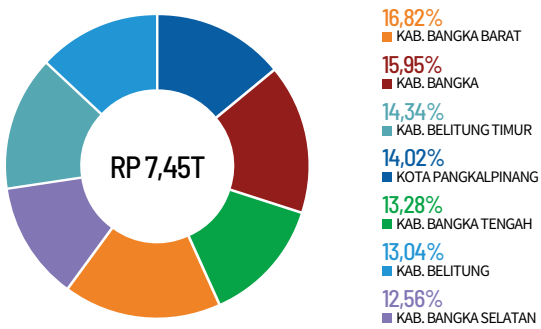

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.16 Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025

3,03% (yoy), dari Rp7,69 triliun di tahun 2024 menjadi Rp7,45 triliun pada tahun 2025. Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah dengan pangsa pagu belanja terbesar pada tahun 2025 (Grafik 2.16). Penurunan pagu belanja daerah terjadi di sebagian besar kabupaten/kota, dengan penurunan tertinggi pada Kabupaten Belitung sebesar 15,47% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Sementara itu, anggaran belanja Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur meningkat sebesar 16,08% (yoy) dan 6,33% (yoy).

2.3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

Secara umum, realisasi pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota hingga triwulan I 2025 sebesar Rp1,46 triliun atau setara dengan 21,57% dari keseluruhan pagu. Realisasi tersebut lebih rendah 1,69% (yoy) secara nominal dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,48 triliun. Persentase realisasi pendapatan tertinggi hingga triwulan I 2025 dicapai oleh Kabupaten Bangka Tengah sebesar 26,16% dari pagu atau setara dengan Rp246,69 miliar. Sementara

Tabel 2.4 Ringkasan Pagu dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025

KAB/KOTA	APBD 2024 (RP MILIAR)	TRIWULAN I 2024		PERTUMBUHAN REALISASI (% YOY)	APBD 2025 (RP MILIAR)	TRIWULAN I 2025		PERTUMBUHAN REALISASI (% YOY)
		REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
Pendapatan Daerah								
Kota Pangkalpinang	929,67	232,37	24,99%	17,81%	962,79	190,41	19,78%	-18,06%
GROWTH	1.308,33	249,80	19,09%	7,75%	1.180,79	296,26	25,09%	18,60%
Kab. Bangka Tengah	927,39	190,21	20,51%	11,81%	943,15	246,69	26,16%	29,70%
Kab. Bangka Barat	897,42	197,60	22,02%	60,04%	1.008,91	188,42	18,68%	-4,65%
Kab. Bangka Selatan	931,09	155,76	16,73%	8,47%	880,68	155,28	17,63%	-0,31%
Kab. Belitung Timur	832,72	219,25	26,33%	31,84%	819,08	178,05	21,74%	-18,79%
Kab. Belitung	932,74	235,78	25,28%	18,68%	953,89	200,65	21,04%	-14,90%
Total Pendapatan	6.759,37	1.480,76	21,91%	20,27%	6.749,28	1.455,75	21,57%	-1,69%
Belanja Daerah								
Kota Pangkalpinang	1.079,91	124,80	11,56%	2,34%	1.045,26	159,53	15,26%	27,83%
Kab. Bangka	1.330,70	170,11	12,78%	12,66%	1.188,78	266,96	22,46%	56,93%
Kab. Bangka Tengah	1.072,67	147,67	13,77%	-6,59%	990,09	186,09	18,80%	26,02%
Kab. Bangka Barat	1.097,02	156,25	14,24%	-0,72%	1.253,77	165,25	13,18%	5,76%
Kab. Bangka Selatan	1.077,58	95,00	8,82%	21,85%	936,21	127,30	13,60%	34,00%
Kab. Belitung Timur	959,35	99,51	10,37%	-1,20%	971,91	157,31	16,19%	58,08%
Kab. Belitung	1.068,51	158,35	14,82%	9,88%	1.068,89	163,08	15,26%	2,99%
Total Belanja	**7.685,74**	**951,70**	**12,38%**	**4,44%**	**7.454,91**	**1.225,52**	**16,44%**	**28,77%**
Surplus/Defisit	**(926,37)**	**529,06**			**(705,62)**	**230,23**		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

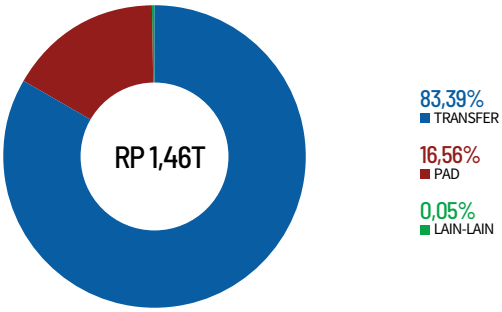

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.17 Pangsa Total Pendapatan Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

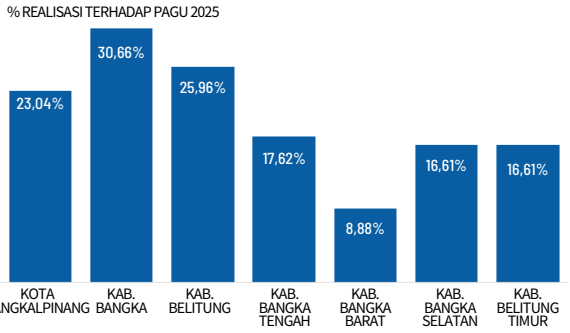

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.18 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

itu, realisasi pendapatan daerah terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan sebesar 17,63% dari pagu atau setara dengan Rp155,28 miliar.

Dari sisi sumber pendapatan daerah, realisasi PAD Kabupaten/Kota hingga triwulan I 2025 turun 1,69% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun sebelumnya. Realisasi PAD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka dengan capaian Rp63,49 miliar atau sebesar 30,66%% dari pagu PAD tahun 2025. Perlambatan realisasi pendapatan daerah tersebut, didorong oleh berbagai faktor salah satunya dengan adanya instruksi efisiensi anggaran dan belanja pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Sementara itu, pangsa realisasi PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah mencapai 16,56% atau sebesar Rp241,05 miliar (Grafik 2.17). Adapun hingga triwulan I 2025 terdapat satu kabupaten yang memiliki rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah kurang dari 10%, yaitu Kabupaten Bangka Barat. Sementara itu dari sisi pendapatan transfer, seluruh kabupaten/kota memiliki rasio realisasi terhadap pendapatan daerah lebih dari 70%. Adapun Kabupaten Bangka Tengah memiliki realisasi tertinggi sebesar 27,84% (Grafik 2.19).

Namun demikian, ketergantungan pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap transfer dana dari pusat masih relatif tinggi. Dana transfer masih menjadi kontributor utama realisasi pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota dengan pangsa 83,39% hingga triwulan I 2025 atau sebesar Rp1,21 triliun (Grafik 2.17). Adapun pangsa pendapatan lain-lain sebesar Rp0,69 miliar atau 0,05% dari total pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota.

2.3.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

Secara umum, realisasi belanja daerah seluruh kabupaten/kota pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,23 triliun atau 16,44% dari total pagu belanja tahun 2025. Realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan sebesar 28,77% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp951,7 miliar. Secara persentase, realisasi belanja tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

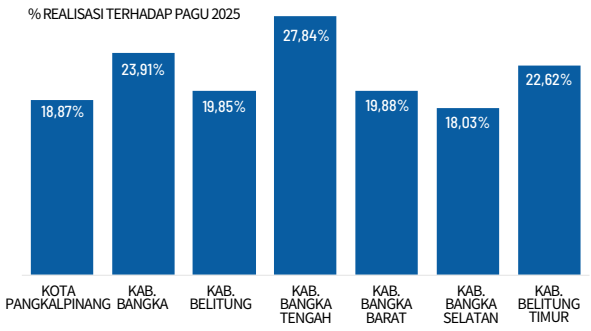

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.19 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

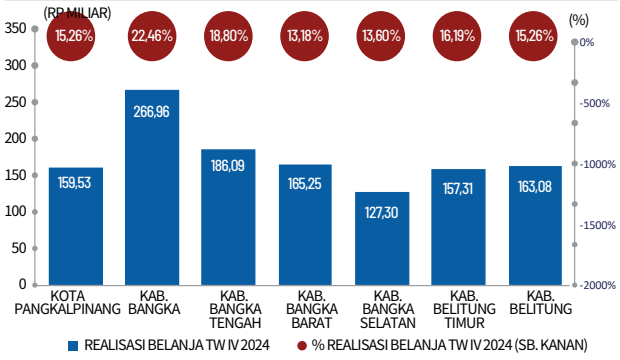

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.20 Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

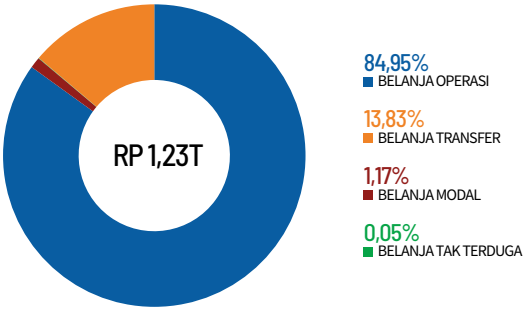

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.21 Pangsa Total Belanja Kabupaten/Kota Triwulan I 2025

hingga triwulan I 2025 dicapai oleh Kabupaten Bangka sebesar Rp266,96 miliar atau 22,46% dari pagu anggaran (Grafik 2.20). Sementara itu, persentase realisasi belanja terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat dengan realisasi sebesar Rp165,25 miliar atau 13,18% dari pagu anggaran (Grafik 2.20).

Belanja operasi mendominasi dengan pangsa 84,95% dari total belanja kabupaten/kota pada triwulan I 2025 atau Rp1,04 triliun. Belanja transfer mencapai Rp169,5 miliar dengan pangsa 13,83% dari total belanja. Sementara realisasi belanja modal dan belanja tak terduga masing-masing 1,17% dan 0,05% dari total pagu atau Rp14,35 miliar dan Rp0,59 miliar (Grafik 2.21).

2.4 BELANJA APBN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN I 2025

2.4.1 Pagu Anggaran Belanja APBN Kementerian/ Lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendanaan pembangunan di daerah juga bersumber dari dana APBN dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk membayar gaji pegawai kementerian atau instansi pemerintah pusat yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, belanja pemerintah pusat di daerah juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat di daerah juga digunakan untuk kegiatan pembangunan yang disalurkan melalui Dana Dekonsentrasi[3] dan Tugas Pembantuan (TP)[4].

Pada tahun 2025, pagu anggaran belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkontraksi 19,24% (yoy) dari Rp3,70 triliun pada tahun lalu menjadi Rp2,99 triliun. Penurunan pagu anggaran tersebut bersumber dari penurunan pagu belanja pegawai yang tercatat terkontraksi 1,59% (yoy), belanja barang terkontraksi 35,61% (yoy), dan belanja modal terkontraksi 9,92% (yoy). Sementara itu, penurunan pagu anggaran lebih dalam tertahan oleh peningkatan pada komponen belanja bansos yang tumbuh 20,97% (yoy).

2.4.2 Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2025

Realisasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 sebesar Rp521,94 miliar atau mencapai 17,45% dari pagu tahun 2025. Secara tahunan, realisasi belanja APBN tersebut menurun 28,17% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Berdasarkan jenis belanja, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Penurunan realisasi belanja tersebut pada belanja barang dan belanja modal yang terdampak signifikan atas kebijakan efisiensi, terutama belanja barang non operasional dan perjadin, serta penurunan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara itu, penurunan realisasi belanja tertahan oleh peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial yang masing-masing tumbuh 8,66% (yoy) dan 19,57% (yoy) seiring dengan peningkatan signifikan belanja gaji dan tunjangan sebagai implikasi pengangkatan PPPK.

Pada triwulan I 2025, realisasi belanja terbesar pemerintah pusat di daerah adalah belanja pegawai yaitu Rp364,65 miliar atau 28,42% dari pagu belanja pegawai tahun 2025 (Grafik 2.22). Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp143,79 miliar atau 12,57% dari pagu belanja barang tahun 2025. Adapun realisasi belanja modal dan belanja bansos masing-masing sebesar 1,63% dan 45,05% dari pagu belanja atau Rp9,04 miliar dan Rp4,46

3 Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah/

4 Tugas Pembantuan (TP) merupakan penugasan-penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

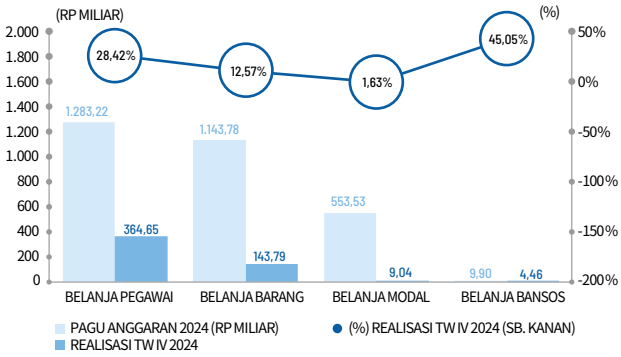

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.22 Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2025 Menurut Jenis Belanja

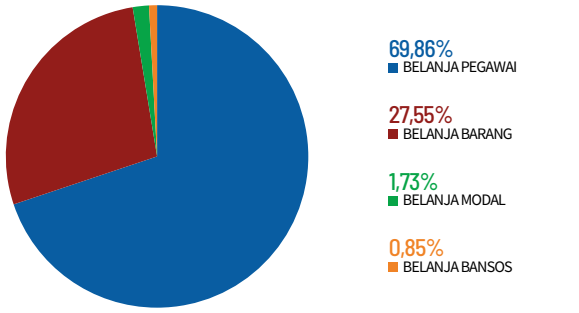

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.23 Pangsa Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2025 Menurut Jenis Belanja

miliar. Berdasarkan pangsa, realisasi belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar merupakan belanja pegawai sebesar 69,86%, disusul belanja barang 27,55%, belanja modal 1,73%, dan belanja bansos 0,85% (Grafik 2.23).

2.4.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Triwulan I 2025

Dana transfer dari pusat ke daerah terbagi menjadi beberapa komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik; Insentif Fiskal; serta Dana Desa. Dana transfer dari pemerintah pusat tersebut masuk ke dalam komponen penerimaan APBD daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang tercatat juga sebagai penerimaan pendapatan transfer. Secara nominal, total realisasi dana transfer dari pemerintah pusat hingga triwulan I 2025 mencapai Rp1,72 triliun atau meningkat 3,5% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan I 2024 sebesar Rp1,66 triliun.

Secara nominal, realisasi TKDD tertinggi pada triwulan I 2025 merupakan DAU mencapai Rp1,26 triliun atau 27,91% dari pagu dan dengan pangsa sebesar 72,91%. Realisasi tersebut terkontraksi 0,60% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu. Realisasi terbesar selanjutnya ada pada DAK non fisik yang mencapai Rp221,89 miliar atau mencapai 23,31% dari pagu dengan pangsa 12,88% dari total realisasi TKDD triwulan I 2025. Realisasi tersebut tumbuh 14,70% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu (Grafik 2.24 dan Grafik 2.25).

Pendapatan negara (yang masuk ke Pemerintah Pusat) pada triwulan I 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp765,6 miliar atau 23,23% dari pagu tahun 2025 sebesar Rp3,3 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 25,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp610,89 miliar atau 16,69% dari pagu. Adapun kontribusi penerimaan perpajakan terbesar bersumber dari pajak dalam negeri, terutama PPN dan PPh dengan realisasi Rp690,84 miliar atau sebesar 21,99% dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 29,38% (yoy).

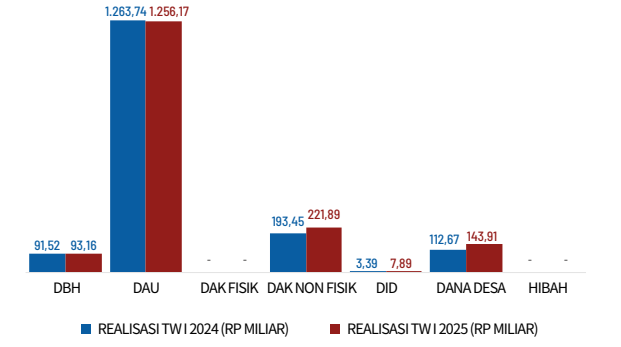

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.24 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2025

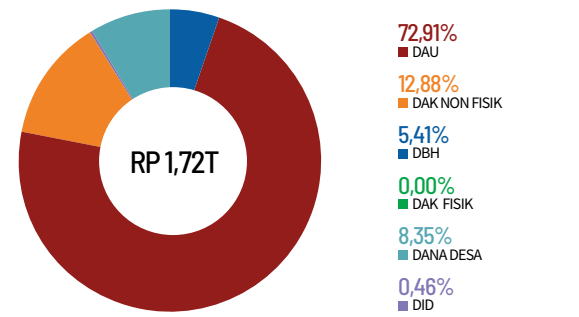

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.25 Pangsa Realisasi Dana Transfer Triwulan I 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Mercusuar Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat

BAB 3

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan I 2025, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam level yang terjaga sebesar 1,13% (yoy). Capaian inflasi tersebut didorong oleh terkendalinya komoditas utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok transportasi menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025. Seluruh Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi, antara lain Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,39% (yoy), Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,33% (yoy), Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,88% (yoy), dan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0.71% (yoy). Dengan demikian, capaian inflasi tahunan Provinsi serta 4 Kabupaten/Kota IHK Kepulauan Bangka Belitung tercatat masih terkendali di bawah sasaran 2,5 ± 1%.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%yoy)

Tw IV 2024		Tw I 2025
0,75	↑	1,13

Kota Pangkalpinang (%yoy)

Tw IV 2024		Tw I 2025
0,76	↑	1,39

Kabupaten Bangka Barat (%yoy)

Tw IV 2024		Tw I 2025
0,30	↑	0,88

Kota Tanjungpandan (%yoy)

Tw IV 2024		Tw I 2025
1,68	↓	0,71

Kabupaten Belitung Timur (%yoy)

Tw IV 2024		Tw I 2025
1,38	↓	1,33

3.1 INFLASI UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 tetap terjaga. Inflasi pada periode laporan sebesar 1,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,75% (yoy) dan semakin mendekat pada *range* sasaran nasional 2,5±1%. (Grafik 3.1). Dari sisi komoditas, inflasi tahunan triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng, dan kopi bubuk. Hal ini seiring dengan kebijakan peningkatan harga jual eceran (HJE) produk tembakau yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, serta peningkatan harga komoditas global seperti emas, CPO, dan kopi yang turut memberikan andil pada peningkatan harga komoditas emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari sisi likuiditas yang diproksikan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan Lokasi Bank di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 yang mulai menunjukkan tren peningkatan, didorong oleh seluruh komponen DPK yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito. Pada bulan Maret 2025, DPK tumbuh 12,68% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,004% (yoy). Selain itu, perbaikan daya beli masyarakat juga tecermin dari PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh 1,74% (yoy) pada triwulan I 2025, terakselerasi dari triwulan IV 2024 yang tumbuh 0,61% (yoy). Realisasi tersebut, didukung oleh perbaikan keyakinan konsumen yang tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 sebesar 119,61, membaik dari triwulan IV 2024 sebesar 118,17.

Sementara itu secara spasial, seluruh 4 Kab/Kota IHK di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung mengalami inflasi pada triwulan laporan. Kota Pangkalpinang mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,39% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,33% (yoy). Selanjutnya, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,88% (yoy) dan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,71% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi tertinggi secara bulanan sebesar 3,13% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran terdapat 10 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi pada triwulan I 2025. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil terhadap inflasi 0,30%; diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil terhadap inflasi 0,24%; dan kelompok transportasi dengan andil terhadap inflasi 0,24%; kelompok pendidikan dengan andil inflasi tahunan 0,10%; kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil terhadap inflasi tahunan 0,08%. Selanjutnya terdapat kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,06%; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,05%; diikuti kelompok kesehatan yang menyumbang andil inflasi tahunan 0,03%. Selain itu, terdapat kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang masing-masing

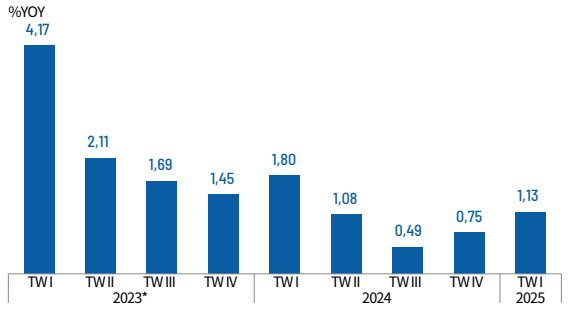

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah | *Rebase menggunakan SBH 2022

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

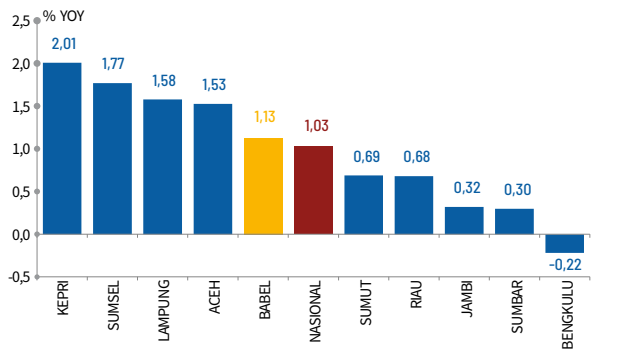

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2 Inflasi Kawasan Sumatera Triwulan I 2025

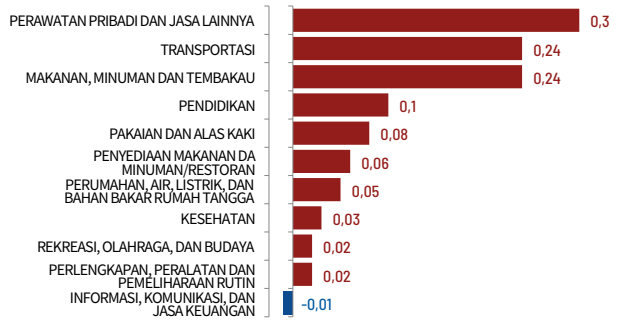

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)

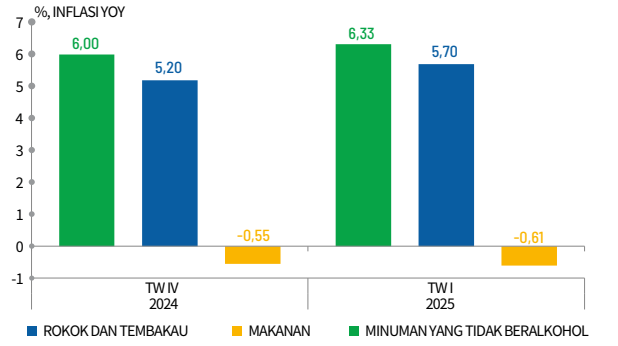

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

juga menyumbangkan andil terhadap inflasi 0,02%. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbangkan andil terhadap delfasi -0,01% (Grafik 3.3).

3.2 INFLASI KELOMPOK PENGELUARAN

Secara umum, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi terjadi pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,01% (yoy); diikuti kelompok kelompok pendidikan sebesar 3,20% (yoy); kelompok transportasi sebesar 1,96% (yoy); kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,48% (yoy); kelompok kesehatan sebesar 1,34% (yoy); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17% (yoy); kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,70% (yoy); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,63% (yoy); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,39% (yoy); serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35% (yoy). Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,20% (yoy).

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada triwulan I 2025 mengalami inflasi sebesar 0,70% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,65% (yoy). Inflasi didorong oleh sebagian besar subkelompok yang mengalami peningkatan indeks harga konsumsi. Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok subsektor minuman yang tidak beralkohol sebesar 6,33% (yoy), diikuti oleh subsektor rokok dan tembakau sebesar 5,70% (yoy). Sementara itu, subsektor makanan masih mengalami deflasi sebesar 0,61% (yoy) (Grafik 3.4).

Berdasarkan jenis komoditas, sigaret kretek mesin (SKM) menjadi komoditas penyumbang andil inflasi tahunan terbesar terhadap inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025, yaitu 0,19%. Kenaikan tersebut seiring dengan mulai berlakunya kebijakan peningkatan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau buatan dalam negeri yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025[6]. Kebijakan tersebut berlaku untuk rokok dengan jenis sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT)/sigaret putih tangan (SKT). Komoditas penyumbang andil inflasi tahunan lainnya yaitu minyak goreng 0,13%, cumi-cumi 0,13%, bawang merah 0,11%, dan kopi bubuk 0,10%. Peningkatan harga minyak goreng dan kopi bubuk pada triwulan laporan dipengaruhi oleh masih berlanjutnya peningkatan harga CPO dan kopi global yang menyebabkan terjadinya peningkatan harga perolehan bahan baku pada kedua komoditas tersebut. Sementara itu, peningkatan harga cumi-cumi dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan dampak mulai berlangsungnya masa peralihan dari angin muson barat ke angin muson timur yang menyebabkan ketersediaan pasokan cumi-cumi menjadi terbatas di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah dipengaruhi oleh

6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klonot dan Tembakau Iris

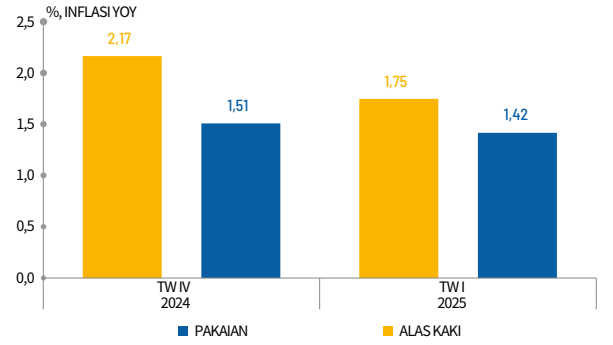

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

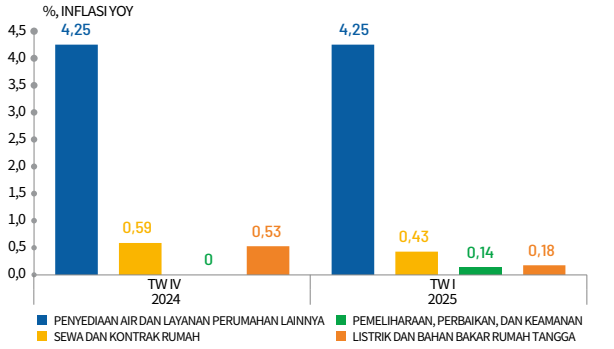

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di beberapa daerah sentra produksi terutama di wilayah Jawa Tengah (Brebes, Kendal, dan Grobogan) dan Jawa Timur (Bondowoso).

Sementara itu, inflasi lebih lanjut tertahan oleh komoditas beras yang mengalami penurunan indeks harga konsumsi dengan memberikan andil deflasi tahunan sebesar 0,41%. Penurunan harga komoditas beras sesuai dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Pada triwulan I 2025, rata-rata harga beras sebesar Rp15.047 per kg, lebih rendah 7,89% (yoy) dibandingkan harga beras pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16.335 per kg. Namun demikian, harga beras pada triwulan I 2025 masih lebih tinggi dari triwulan IV 2024 dikarenakan belum dimulainya musim panen raya. Selain komoditas beras, komoditas cabai merah juga menyumbang andil deflasi tahunan sebesar 0,08%. Hal ini juga sesuai dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dimana harga cabai merah pada triwulan I 2025 mencapai Rp63.973 per kg, lebih rendah 17,90% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp77.924 per kg. Dengan perkembangan harga tersebut, harga cabai merah mengalami deflasi secara tahunan sebesar 17,24% (yoy) pada Maret 2025, lebih rendah dari harga cabai merah pada Maret 2024 dimana cabai merah inflasi sebesar 16,80% (yoy).

3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 1,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,64% (yoy). Secara andil, kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,08%, menurun dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Selanjutnya, inflasi kelompok ini didorong oleh seluruh subkelompok, yaitu subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 1,75% (yoy) dan inflasi subkelompok pakaian sebesar 1,42% (yoy) (Grafik 3.5). Adapun capaian tingkat inflasi yang lebih rendah tersebut terjadi ditengah momentum perayaan HBKN Idulfitri pada akhir bulan Maret 2025, yang mencerminkan bahwa masyarakat masih menahan pengeluaran pada kelompok ini.

3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 0,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,61% (yoy). Realisasi tersebut didorong oleh inflasi tahunan pada semua subkelompok antara lain subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya mengalami inflasi sebesar 4,25% (yoy); subkelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 0,43% (yoy); subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 0,18% (yoy); dan subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/ perumahan sebesar 0,14% (yoy) (Grafik 3.6). Inflasi yang lebih rendah pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga didorong oleh komoditas sewa rumah dan bahan bakar rumah tangga akibat kebijakan Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali menertibkan pembelian LPG 3 kg hanya dapat melalui pangkalan resmi melalui berbagai sidak sehingga pasokan tetap aman, harga terkendali, dan subsidi tepat sasaran. Selain itu, Pertamina juga melakukan *extra dropping* gas LPG 3kg ke wilayah Bangka Belitung pada minggu ketiga Maret 2025,

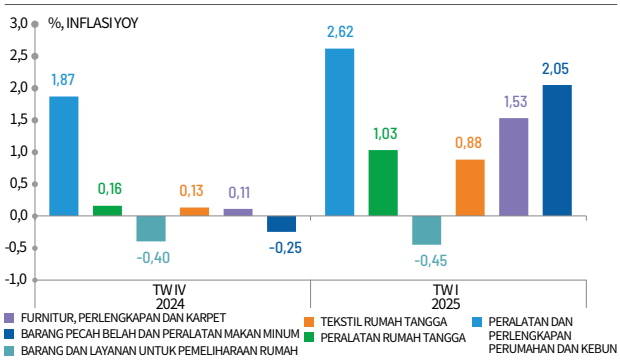

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

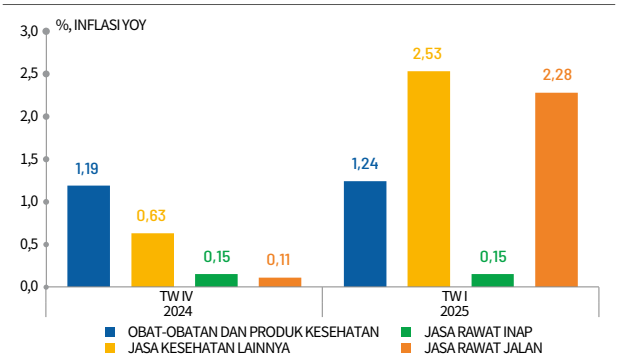

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Subkelompok Kesehatan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sebanyak 120.400 tabung untuk Pulau Bangka dan 27.440 tabung untuk Pulau Belitung. Lebih lanjut, tarif listrik juga menjadi komoditas yang dominan memberikan andil deflasi bulanan disepanjang triwulan I 2025. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan diskon tarif listrik oleh PLN untuk pelanggan dengan daya 2.200 KwH ke bawah sebesar 50% selama bulan Januari – Februari 2025.

3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 0,35% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,11% (yoy). Secara tahunan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil inflasi 0,02% terhadap realisasi triwulan I 2025. Terdapat 5 subkelompok yang mengalami inflasi tahunan yaitu subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun sebesar 2,62% (yoy); diikuti subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar 2,05% (yoy); subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet sebesar 1,53% (yoy); subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 1,03% (yoy); dan subkelompok tekstil rumah tangga sebesar 0,88% (yoy). Sementara itu, subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin mengalami deflasi sebesar 0,45% (yoy) (Grafik 3.7).

3.2.5 Kelompok Kesehatan

Pada triwulan I 2025, kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,66% (yoy). Dari sisi andil, kelompok kesehatan memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,03%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,01%. Inflasi terjadi pada seluruh subkelompok, antara lain subkelompok jasa kesehatan lainnya 2,53% (yoy); diikuti subkelompok jasa rawat jalan 2,28% (yoy); subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan 1,24% (yoy); dan subkelompok jasa rawat inap 0,15% (yoy). Lebih lanjut, inflasi pada kelompok ini masih dipengaruhi oleh transmisi kebijakan perubahan tarif rumah sakit yang ditetapkan pada 27 Agustus 2024 yang lalu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan tarif Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tarif Kolektif untuk 35 Rumah Sakit lingkup Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penetapan PMK tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dinamika perkembangan layanan rumah sakit, mendukung percepatan transformasi kesehatan Kemenkes, mendorong optimalisasi aset dan sumber daya, serta penguatan skema kerjasama dalam rangka penguatan layanan, serta memberikan fleksibilitas BLU melalui penambahan peran dan tanggung jawab pemimpin BLU dalam mengembangkan layanan. Perubahan ini kemudian mempengaruhi kenaikan laju inflasi kelompok kesehatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak triwulan III 2024.

3.2.6 Kelompok Transportasi

Pada triwulan I 2025, kelompok transportasi mengalami inflasi 1,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,11% (yoy). Secara andil, kelompok transportasi menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,24%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami

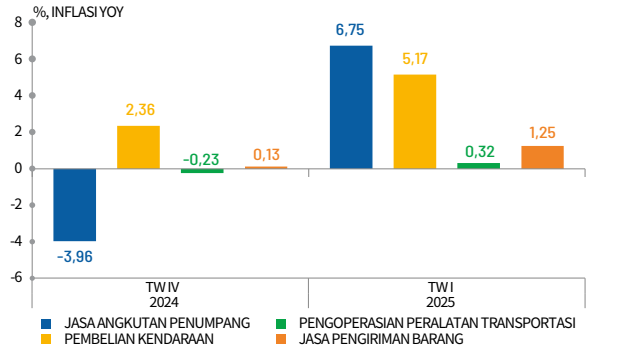

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Subkelompok Transportasi Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

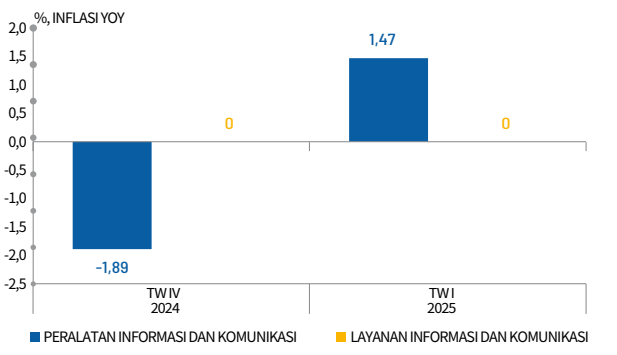

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Subkelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

deflasi 0,01%. Selanjutnya, inflasi kelompok ini didorong oleh seluruh subkelompok antara lain: subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 6,75% (yoy); subkelompok pembelian kendaraan sebesar 5,17% (yoy); subkelompok jasa pengiriman barang sebesar 1,25% (yoy); dan subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,32% (yoy) (Grafik 3.9).

Inflasi pada kelompok transportasi didorong oleh normalisasi harga tiket angkutan udara pasca penerapan kebijakan diskon tarif angkutan udara sebesar 10% pada periode perayaan HBKN Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk penerbangan pada tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kebijakan penurunan tarif tiket pesawat ini hasil dari sinergi berbagai pihak seperti pemberian diskon harga avtur oleh PT Pertamina (Persero) di bandara, serta potongan tarif 50% terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan atau biasa dikenal *passenger service charge* (PSC) yang tertuang pada Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP/250/DJPU tahun 2024 yang resmi diterbitkan pada 22 November 2024. Selain itu, subkelompok pembelian kendaraan juga turut mendorong inflasi pada kelompok transportasi. Hal ini sejalan dengan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2025 yang meningkat sebesar 8,41% (yoy), utamanya didorong oleh peningkatan pembelian kendaraan roda 2.

3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Pada triwulan I 2025, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kembali mengalami deflasi 0,20%, lebih baik dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,26% (yoy). Kelompok ini memberikan andil deflasi tahunan 0,01% pada triwulan laporan. Penurunan indeks harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh deflasi subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,47% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 1,87% (yoy). Sementara itu, subkelompok layanan informasi dan komunikasi; serta subkelompok jasa keuangan tidak mengalami perubahan (Grafik 3.10).

3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan I 2025 mengalami inflasi 1,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 1,57% (yoy). Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan andil 0,02% terhadap inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga subkelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah yang mengalami inflasi 3,51% (yoy) dan subkelompok layanan rekreasi dan olahraga sebesar 0,24% (yoy). Peningkatan harga subkelompok tersebut masih didorong oleh naiknya permintaan masyarakat terutama terhadap buku

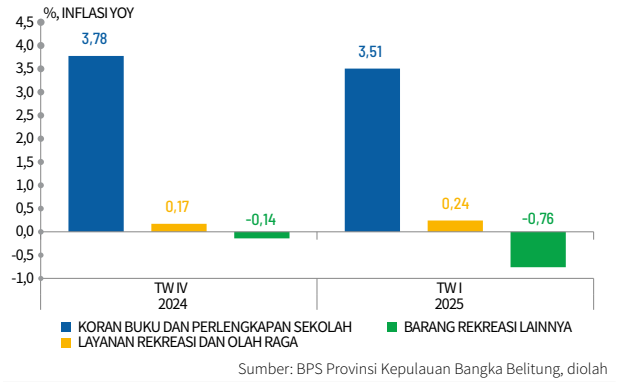

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Subkelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

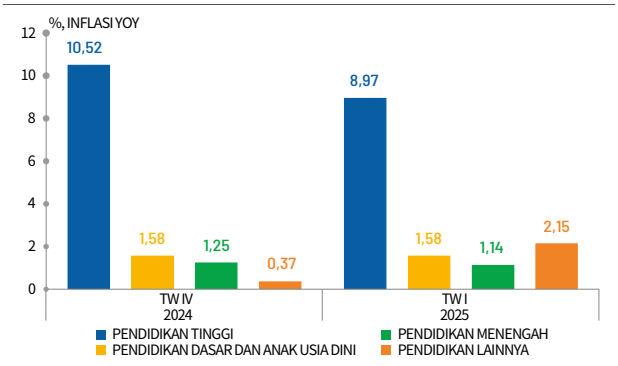

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pendidikan Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

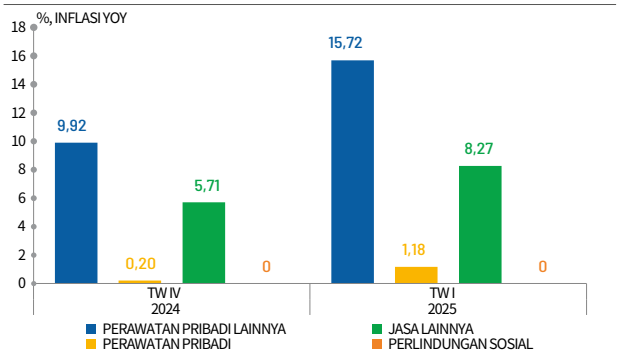

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Periode Triwulan I 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pelajaran Sekolah Dasar (SD). Sementara itu, laju inflasi kelompok ini tertahan oleh subkelompok barang rekreasi lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,76% (yoy) (Grafik 3.11).

3.2.9 Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan pada triwulan I 2025 mengalami inflasi 3,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,08% (yoy). Kelompok pendidikan memberikan andil 0,10% terhadap inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh subkelompok mengalami inflasi, antara lain subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar 1,58% (yoy), subkelompok pendidikan menengah 1,14% (yoy), subkelompok pendidikan tinggi inflasi 8,97% (yoy), dan subkelompok pendidikan lainnya sebesar 2,15% (yoy).

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Pada triwulan I 2025, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,87% (yoy). Secara tahunan, kelompok ini menyumbang andil 0,06% terhadap inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok ini terdiri dari satu subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi 0,63% (yoy) pada triwulan I 2025. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh inflasi komoditas kopi bubuk di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih menjadi salah satu komoditas dengan andil inflasi tahunan tertinggi pada triwulan I 2025. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya tren peningkatan harga kopi secara global akibat adanya gangguan cuaca pada daerah produsen. Adapun fenomena ini juga sejalan dengan karakteristik inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran yang merupakan *second round effect* atas inflasi di kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan I 2025 mengalami inflasi 5,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,73% (yoy). Pada triwulan laporan, andil inflasi tahunan kelompok ini 0,30%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 0,16%. Sesuai dengan Grafik 3.13, inflasi terjadi pada seluruh subkelompok, dengan inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 15,72% (yoy); diikuti oleh subkelompok jasa lainnya sebesar 8,27% (yoy); subkelompok perlindungan sosial 5,73% (yoy); dan subkelompok perawatan pribadi sebesar 1,18% (yoy).

Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan adalah emas perhiasan sebesar 0,23%. Berlanjutnya kenaikan harga emas global masih berlangsung akibat tingginya permintaan terhadap emas sebagai *safe haven assets.* Ketidakpastian global akibat berlanjutnya permasalahan geopolitik, turut berkontribusi pada meningkatnya inflasi emas perhiasan yang mencapai USD 2.864,86 per oz pada triwulan I 2025 atau meningkat 38,14% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

3.3 INFLASI SPASIAL

Mengacu pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang menjadi basis penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpandan, Kabupaten Bangka Barat, dan

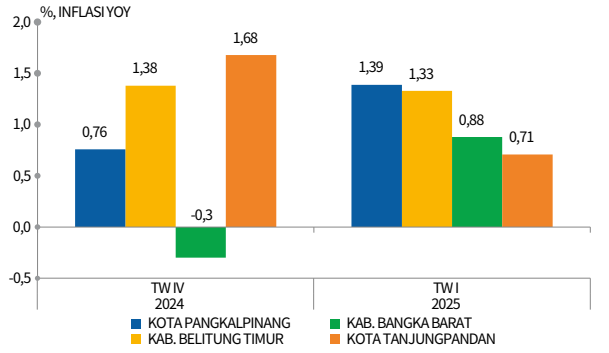

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota IHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025

Kabupaten Belitung Timur. Pada triwulan I 2025, seluruh Kabupaten/Kota IHK yang mengalami inflasi secara tahunan, didorong oleh adanya peningkatan mobilitas masyarakat menjelang perayaan HBKN Idulfitri 2025. Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 0,76% (yoy). Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,38% (yoy). Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,69% (yoy). Dilanjutkan, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,30% (yoy) (Grafik 3.14).

3.3.1 Inflasi Kota Pangkalpinang

Pada triwulan I 2025, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 0,76% (yoy). Inflasi Kota Pangkalpinang didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang inflasi tahunan terbesar pada triwulan I 2025 di Kota Pangkalpinang adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi tahunan 3,04% (yoy) dengan sumbangan andil inflasi tahunan 0,41%, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil 0,41%, serta mengalami inflasi sebesar 1,31% (yoy). Penyumbang andil inflasi terbesar selanjutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,22% dengan tingkat inflasi sebesar 3,82% (yoy). Sementara itu, berdasarkan komoditas penyumbang andil inflasi tahunan terbesar antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan andil 0,27%, diikuti komoditas kopi bubuk dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,19%.

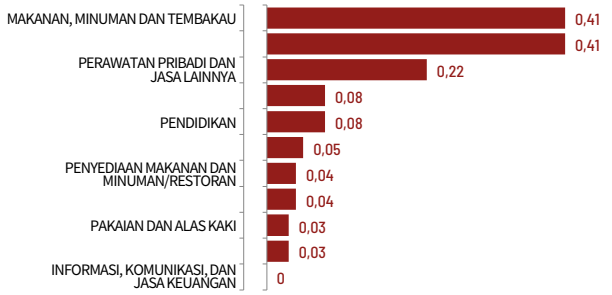

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kota Pangkalpinang

3.3.2 Inflasi Kota Tanjungpandan

Pada triwulan IV 2024, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,71%, (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,69% (yoy). Inflasi Kota Tanjungpandan didorong oleh peningkatan harga pada 6 kelompok pengeluaran, sementara 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 lainnya stabil. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan diskon tarif listrik pada bulan Januari dan Februari 2025 yang menyebabkan Kota Tanjungpandan mengalami deflasi pada bulan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi tertinggi didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil 0,51% dengan inflasi 1,35% (yoy). Kemudian diikuti dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi tahunan 0,16% dengan inflasi 2,69% (yoy). Kelompok transportasi juga turut menyumbang andil inflasi tahunan 0,13% dengan tingkat inflasi sebesar 1,01% (yoy). Inflasi juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; serta kelompok pendidikan. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan

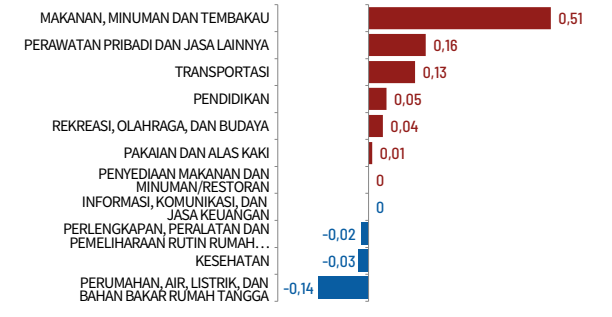

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.16 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kota Tanjungpandan

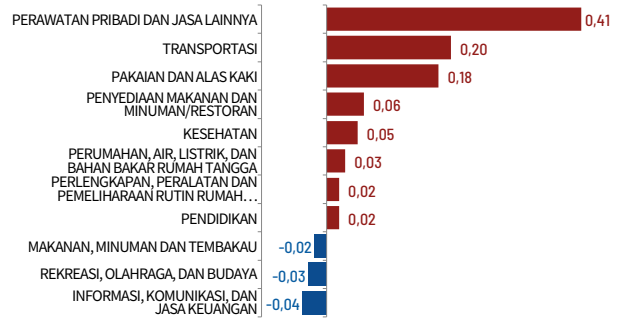

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.17 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kabupaten Bangka Barat

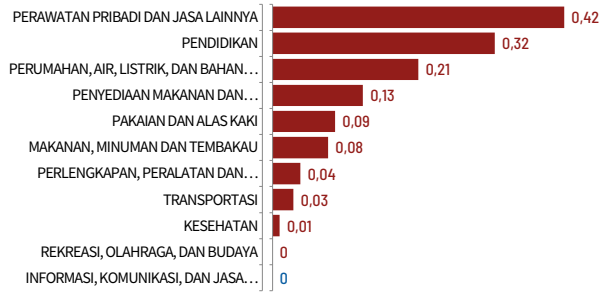

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.18 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan I 2025 Kabupaten Belitung Timur

rutin rumah tangga; dan kelompok kesehatan mengalami deflasi.

3.3.3 Inflasi Kabupaten Bangka Barat

Pada triwulan I 2025, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,30% (yoy). Laju inflasi Kabupaten Bangka Barat didorong oleh inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran, kecuali kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya. Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil tahunan 0,41% dengan tingkat inflasi 7,43% (yoy); diikuti kelompok transportasi yang menyumbang andil inflasi tahunan 0,20% dengan tingkat inflasi 1,83% (yoy); dan kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil tahunan 0,18% dengan tingkat inflasi 3,99% (yoy). Selanjutnya dari sisi komoditas, selain komoditas emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), dan minyak goreng, cumi-cumi juga turut menjadi komoditas dengan andil inflasi tahunan yang dominan yaitu sebesar 0,14%.

3.3.4 Inflasi Kabupaten Belitung Timur

Pada triwulan I 2025, Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,38% (yoy). Laju inflasi pada Kabupaten Belitung Timur pada triwulan I 2025 didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang andil inflasi tahunan terbesar di Kabupaten Belitung Timur adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi 6,31% (yoy) dan andil 0,42%; diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,21% dan tingkat inflasi 2,37% (yoy). Selain itu, kelompok pendidikan juga turut menyumbang andil inflasi tahunan yang cukup besar 0,32% dengan tingkat inflasi 15,31% (yoy). Hal ini dikarenakan subkelompok pendidikan tinggi mengalami inflasi 42,86% (yoy) dengan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu akademi/perguruan tinggi sebesar 0,32%.

3.4 *TRACKING* INFLASI TRIWULAN II 2025

Pada April 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 1,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,13% (yoy). Peningkatan capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dampak peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat pada momen perayaan HBKN Idulfitri dan Ceng Beng pada awal April, meskipun capaian inflasi tersebut masih berada di bawah sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Adapun secara nasional, pada April 2025 juga tercatat inflasi sebesar 1,95% (yoy), terjaga dalam kisaran sasaran. Peningkatan inflasi April 2025 terutama disumbang oleh kelompok inti antara lain komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan 0,27% dan minyak goreng dengan andil inflasi tahunan 0,13%. Sementara itu, berdasarkan kelompok pengeluaran, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi.

Berdasarkan realisasi inflasi pada April 2025 tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2025 diprakirakan akan mengalami inflasi yang lebih tinggi dari realisasi inflasi pada triwulan I 2025, namun masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut sejalan dengan berlangsungnya beberapa perayaan hari bersar keagamaan pada bulan April, Mei dan Juni, antara lain HBKN Idulfitri dan Ceng Beng yang jatuh pada awal April 2025, *long weekend*

dan cuti bersama HBKN Waisak dan Kenaikan Yesus Kristus pada Mei 2025, serta HBKN Idul Adha pada Juni 2025 sehingga mendorong peningkatan permintaan masyarakat di triwulan II 2025. Sementara dari komoditas hortikultura pangan seperti bawang merah dan aneka cabai, terdapat potensi peningkatan harga akibat keterbatasan pasokan seiring dengan sedang dalam masa tanam di daerah sentra produksi. Lebih lanjut, berdasarkan prediksi BMKG di wilayah Bangka Belitung pada bulan April 2025 masih mengalami intensitas curah hujan menengah disertai potensi angin kencang, sehingga terdapat risiko peningkatan harga ikan akibat aktivitas nelayan yang terkendala. Namun demikian, pada bulan Mei 2025 intensitas curah hujan diprakirakan rendah hingga menengah, sementara di bulan Juni 2025 diprakirakan telah memasuki musim kemarau. Hal ini berpotensi menjadi faktor penahan inflasi *volatile food* dari komoditas ikan laut/segar pada triwulan II 2025. Dari sisi komoditas *administered price*, peningkatan harga diprakirakan akan tertahan dikarenakan terdapat penurunan tarif BBM Non-Subsidi selama bulan April 2025 dan Mei 2025, dengan harga baru yang mulai berlaku per 1 Mei 2025 untuk jenis Pertamax (turun Rp100; dari Rp12.800/liter menjadi Rp12.700/liter), Pertamax Turbo (turun Rp200; dari Rp13.800/liter menjadi Rp13.600/liter), Dexlite (turun Rp250; dari Rp13.900/liter menjadi Rp13.650/liter) dan Pertamina Dex (turun Rp150; dari Rp14.200/liter menjadi Rp14.050/liter).

Secara keseluruhan pada tahun 2025, inflasi berisiko didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang dipengaruhi oleh relaksasi dan/atau kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, gula, dan minyak goreng. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan penghentian impor beberapa komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam berpotensi meningkatkan harga komoditas dalam negeri. Lebih lanjut, terdapat penyesuaian harga jual eceran (HJE) rokok sesuai dengan PMK No. 97 Tahun 2024, harga jual eceran Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 1 meningkat sebesar 5,08% dan Golongan II meningkat 7,6%, Sigaret Putih Mesin (SPM) Golongan 1 meningkat 4,8% sementara Golongan II meningkat 6,8%, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT) meningkat sebesar 9,5% untuk Golongan 1, 15% untuk Golongan 2, dan 18,6% untuk Golongan III. Penyesuaian harga jual eceran rokok (HJE) tersebut yang mulai berlaku per 1 Januari 2025, turut berisiko mendorong inflasi pada tahun 2025.

3.5 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat upaya pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Berbagai langkah dan program telah diimplementasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Dari sisi keterjangkauan harga, Bank Indonesia turut mendukung program-program pengendalian inflasi termasuk untuk komoditas pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada tahun 2025, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melanjutkan program-program GNPIP. TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP/Gerakan Pangan Murah. Sepanjang Januari s.d. April 2025, telah terlaksana 42 kali Operasi Pasar/ Pasar Murah, 13 kali Gerakan Pangan Murah, dan penyaluran SPHP di 319 titik seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bersinergi dengan OPD terkait. Selain itu, telah diselenggarakan juga Operasi Pasar kerjasama Bapanas dengan Pos Indonesia di 22 titik dalam rangka menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri pada 27 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut ikut serta menyelenggarakan pasar murah di halaman kantor pada 21 Maret 2025.

Dari sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan, antara lain melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Bank Indonesia telah memfasilitasi pelaksanaan KAD *business to business* (B2B) komoditas daging sapi beku antara Koperasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung dengan Bulog Cabang Belitung pada 6 Maret 2025 untuk memenuhi kebutuhan daging sapi selama

perayaan Idulfitri 2025. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga kembali melakukan fasilitasi distribusi KAD ini dengan memfasilitasi pengiriman 17.500 kg daging sapi beku dari Jakarta menuju Kabupaten Belitung sehingga harga komoditas dapat tetap terjaga Rp99.000 per kg. Selain itu, pada Mei 2025 akan dilaksanakan penjajakan KAD komoditas cabai dan bawang merah dengan distributor dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lebih lanjut, dalam upaya mendorong ketersediaan pasokan khususnya pada pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah, Bank Indonesia melaksanakan fasilitasi distribusi pangan ke lokasi pasar murah yang diorkestrasikan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan distributor. Hasil kerjasama ini telah terlaksana sebanyak 24 kali sehingga distributor dapat menurunkan harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per barang dan menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat. Lebih lanjut, pada bulan April 2025 telah memasuki masa panen raya beras di daerah sentra lokal. Bulog Bangka dan Belitung turut berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) untuk menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah. Hingga akhir April 2025, Bulog telah berhasil melakukan penyerapan GKP sebanyak 1.033,44 ton.

Selanjutnya, dari sisi komunikasi efektif diperkuat dengan menjalin koordinasi, inovasi, dan sinergi antaranggota TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam upaya pengendalian inflasi selama Ramadan dan Idulfitri 2025, telah dilaksanakan 7 kali *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari minggu ke-4 Februari 2025 hingga minggu ke-3 Maret 2025. Dari HLM TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan 26 Februari 2025 telah dibentuk Berita Acara Kesepakatan Bersama dari seluruh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil dari HLM ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sidak pasar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota oleh masing-masing TPID, serta ke produsen Minyakita di Kabupaten Belitung Timur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penguatan data dan informasi harga terkini melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan harga pangan, khususnya pada 10 komoditas pangan strategis antara lain beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir. Pemantauan harga dan pasokan, termasuk *mapping* lokasi, realisasi, dan potensi panen kelompok tani binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program Siskamling Inflasi dan *Dashboard* Pemantauan Harga Inflasi (D'Parai) yang dapat diakses melalui tautan bit.ly/Dashboard_DParai. Selain itu, dalam rangka menyusun langkah dan strategi pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi di wilayah Bangka Belitung, Rapat Penyusunan *Roadmap* TPID Provinsi bersama tim teknsi TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 11 Maret 2025. Penyusunan *roadmap* pengendalian inflasi 2025-2027 diharapkan dapat sejalan dengan perumusan 3 (tiga) langkah strategis berdasarkan hasil HLM Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), antara lain yaitu: a) Menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran 2,5±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; b) Menjaga inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0-5,0%; c) Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 melalui 5 upaya berikut: 1) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 2) meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah; 3) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit; 4) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta 5) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Ke depan, Semangat KIS (Konsisten, Inovasi, dan Sinergi) perlu untuk terus ditingkatkan terlebih dalam upaya sinergi dan kolaborasi antarinstitusi terkait dalam menjaga daya beli masyarakat terus menjadi perhatian dan terus dimonitor secara intensif melalui Tim Pengendalian Inflasi Pengendalian Daerah (TPID). Sejalan dengan strategi pengendalian inflasi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut senantiasa mendorong berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk untuk komoditas pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

BOKS 2

Jelang Ramadan dan Idulfitri, TPID Se-Bangka Belitung Tegaskan Komitmen Jaga Inflasi

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B2.1 *High Level Meeting* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26 Februari 2025

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis yang berlandaskan pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Seluruh program ini merupakan bagian dari kelanjutan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan dilaksanakan melalui sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu aksi nyata untuk memperkuat komunikasi efektif, telah dilaksanakan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bangka Belitung pada 26 Februari 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sugito; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Rommy S. Tamawiwy; Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bupati/Wali Kota, instansi vertikal, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada kesempatan yang baik ini, seluruh pemerintah kabupaten/kota melaporkan bahwa pasokan bahan pangan pokok berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta harga-harga komoditas utama relatif stabil dan terkendali. Sejalan dengan laporan tersebut, TPID bersama OPD teknis telah dan akan terus melaksanakan

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B2.2 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama pada HLM TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 26 Februari 2025

sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, termasuk melalui kegiatan sidak pasar, pelaksanaan Operasi Pasar (OP), dan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dirancang untuk berlangsung selama periode Ramadan dan menjelang Idulfitri. Selain itu, Pemerintah Daerah bersama *stakeholder* terkait juga memastikan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok, termasuk penguatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg, guna menjamin ketersediaan barang di seluruh wilayah.

Sebagai landasan dan panduan program kerja, TPID juga menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2025–2027, sebagai panduan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pada pertengahan April 2025, rapat evaluasi telah digelar untuk meninjau efektivitas Operasi Pasar dan menyusun langkah lanjutan bagi komoditas yang masih rentan mengalami defisit pasokan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%, HLM TPID ini menegaskan kembali pentingnya implementasi 4 strategi pengendalian inflasi daerah, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Keempat pilar tersebut diakomodasi dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama yang disepakati oleh seluruh peserta HLM. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja TPID, khususnya dalam realisasi pelaksanaan HLM sebagai mekanisme koordinasi strategis pengendalian inflasi daerah.

Melalui pelaksanaan HLM ini, TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergi antarlembaga untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional, terutama pada periode strategis menjelang dan selama HBKN Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Foto : Pelabuhan di Sungaliat, Bangka

BAB 4

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I 2025 secara umum semakin membaik dan tetap berdaya tahan. Kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terpantau tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, disertai dengan rasio *Loan to Deposit* (LDR) yang turut membaik. Kualitas penyaluran kredit juga tercatat tetap baik, seiring dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang tetap terjaga di bawah *threshold*.

Kredit Total* (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
7,31%	10,21%
Rp25,63 T	Rp25,28 T

DPK (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
-0,32%	11,63%
Rp25,36 T	Rp26,55 T

Kredit Korporasi* (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
19,25%	24,13%
Rp9,43 T	Rp9,25 T

Kredit RT* (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
3,19%	3,57%
Rp15,52 T	Rp15,60 T

Kredit UMKM* (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
0,57%	-0,92%
Rp7,43 T	Rp7,20 T

NPL* (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
2,85%	4,00%

LDR (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
101,07%	95,22%

*Berdasarkan Lokasi Proyek

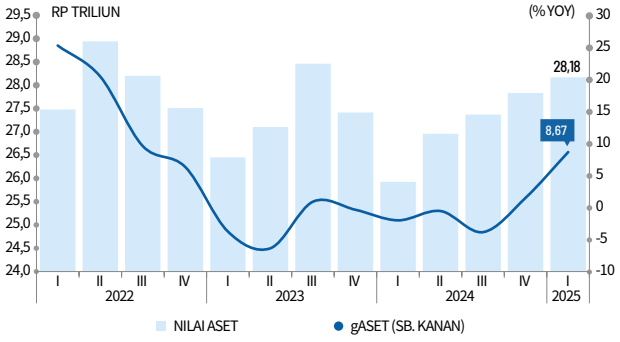

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan

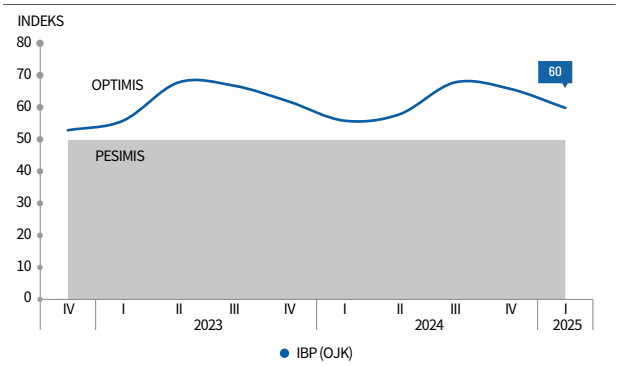

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Grafik 4.2 Indeks Orientasi Bisnis Perbankan

4.1 KINERJA PERBANKAN

4.1.1 Kondisi Umum

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik dan tetap berdaya tahan dalam mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan DPK, diiringi dengan rasio NPL yang masih berada di bawah *threshold*. Dari sisi penyaluran kredit, perbaikan kinerja kredit modal kerja menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama, setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi. Lebih lanjut, kredit investasi dan konsumsi tetap tumbuh tinggi, meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. Dari sisi penghimpunan DPK, setelah pada 2 tahun sebelumnya selalu terkontraksi, pada triwulan I 2025 ini kinerja DPK mulai tercatat tumbuh positif. Pertumbuhan DPK didukung oleh perbaikan kinerja giro dan tabungan.

Total aset perbankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpantau tumbuh dan melanjutkan tren perbaikan pada triwulan I 2025. Aset Bank pada periode berjalan tercatat sebesar Rp28,18 triliun, lebih tinggi dari aset bank triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27,84 triliun. Aset bank pada triwulan berjalan tersebut tumbuh 8,67% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 1,53% (yoy) (Grafik 4.1). Penguatan aset perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejalan dengan optimisme perbankan yang tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IBP pada triwulan I 2025 sebesar 60 atau berada dalam level optimis (Grafik 4.2). Gambaran tersebut merupakan wujud optimisme ekspektasi perbankan akan meningkatnya fungsi intermediasi yang diiringi dengan penguatan pengelolaan risiko.

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

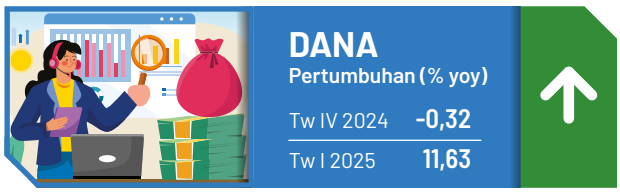

DPK triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp26,55 Triliun, tumbuh 11,63% (yoy) atau membaik dari kontraksi periode sebelumnya 0,32% (yoy) (Grafik 4.3). Pertumbuhan positif DPK pada triwulan berjalan ini merupakan yang pertama kali setelah dalam 2 tahun sebelumnya selalu mengalami kontraksi. Pertumbuhan DPK tersebut ditopang oleh komponen Giro dan Tabungan yang masing-masing tumbuh 29,53% (yoy) dan 12,76% (yoy). Sementara itu, kinerja Deposito masih mengalami kontraksi 0,10% (yoy) atau membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,24% (yoy) (Grafik 4.4).

Berdasarkan komponen DPK, tabungan masih mendominasi penghimpunan DPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp14,19 triliun atau mencapai 53,47% dari total DPK, diikuti oleh

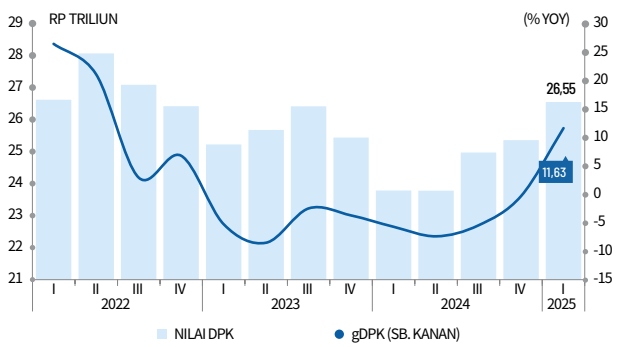

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Penghimpunan DPK

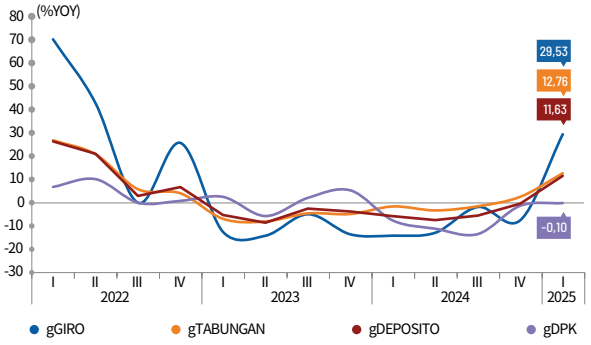

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan DPK Berdasarkan Komponen

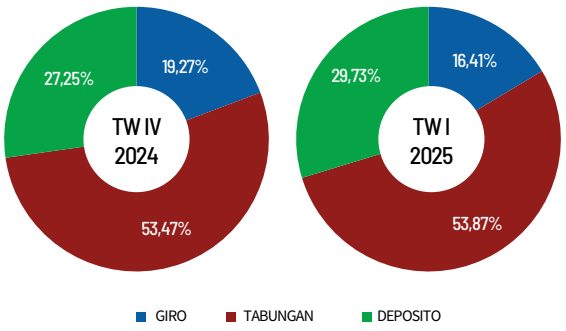

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Pangsa DPK Perbankan

Deposito dan Giro yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 27,25% dan 19,27% (Grafik 4.5).

Secara spasial, DPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya bersumber dari Kota Pangkalpinang yang mencapai Rp9,64 triliun dengan pangsa 36,29% dari total DPK. Kinerja penghimpunan DPK terbesar berikutnya terdapat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dengan nilai nominal dan pangsa masing-masing mencapai Rp5,84 triliun (pangsa 21,99%) dan Rp4,13 triliun (pangsa 15,56%). Sementara itu, DPK terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan dengan nilai nominal sebesar Rp0,89 triliun atau pangsa 3,36% (Grafik 4.6).

Berdasarkan golongan nasabah, DPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh dana perseorangan (Rumah Tangga) sebesar Rp18,48 triliun atau dengan pangsa 69,59% (Grafik 4.7). Sebanyak 69,79% rumah tangga masih memilih menempatkan dananya pada tabungan dan 29,09% pada deposito. Sementara itu, dana milik korporasi dan pemerintahan mayoritas ditempatkan pada rekening giro.

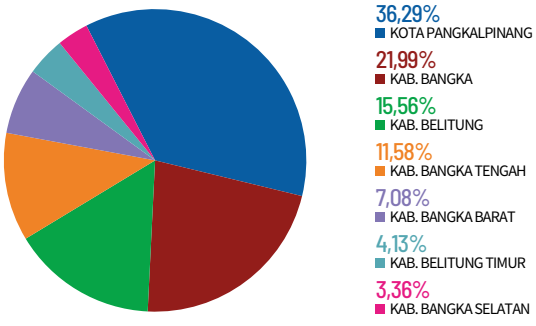

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Pangsa DPK Menurut Kabupaten/Kota

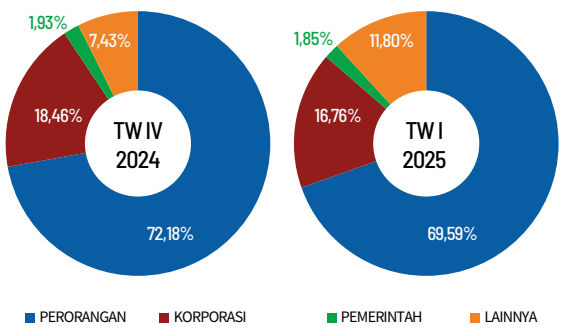

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Nasabah

4.1.3 Perkembangan Kredit

Kinerja intermediasi perbankan yang optimal, tecermin dari penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh membaik. Pada triwulan I 2025, kredit perbankan yang telah tersalurkan tercatat Rp25,28 triliun atau tumbuh 10,21 (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya 7,31% (yoy) (Grafik 4.8). Pertumbuhan kinerja penyaluran kredit tersebut terjadi di seluruh jenis kredit yaitu modal kerja, investasi dan konsumsi. Pada triwulan I 2025, penyaluran kredit investasi mengalami akselerasi yang cukup tinggi mencapai Rp5,71 triliun atau tumbuh 24,27% (yoy). Lebih lanjut, kredit konsumsi juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan kinerja kredit keseluruhan, seiring dengan catatan pertumbuhan 8,06% (yoy). Lebih lanjut, kredit modal kerja juga tumbuh 5,36% (yoy), membaik setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 3,39% (yoy) (Grafik 4.9).

Berdasarkan jenis kreditnya, kredit modal kerja masih mendominasi keseluruhan penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada triwulan I 2025, kredit modal kerja telah disalurkan sebesar

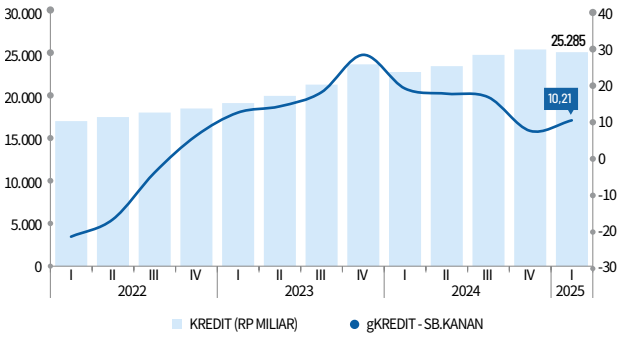

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Perbankan

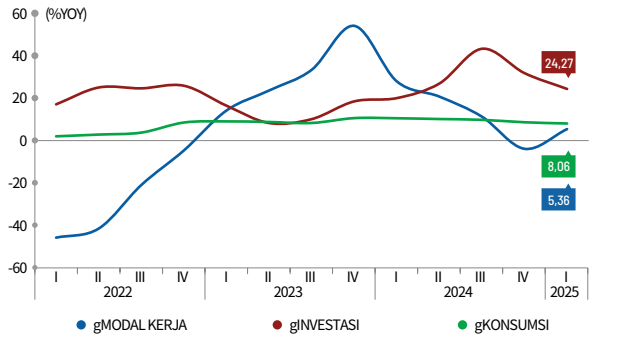

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan Jenis Kredit Perbankan

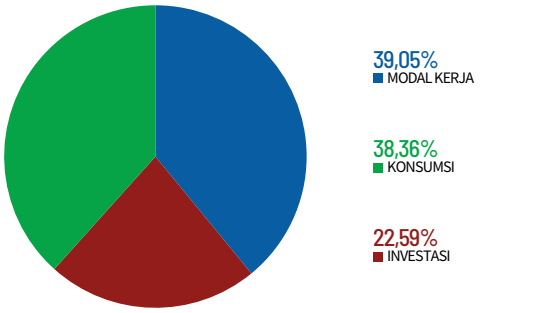

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Pangsa Kredit Perbankan

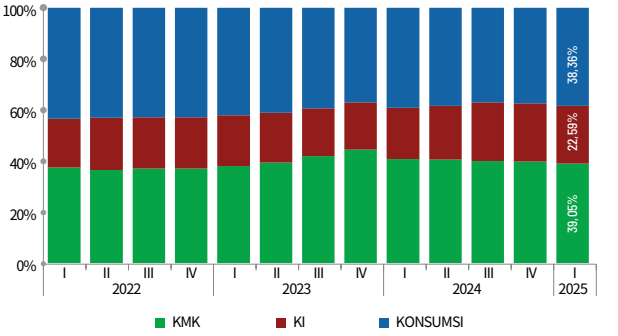

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Pangsa Jenis Kredit Perbankan

Rp9,87 triliun atau pangsanya sebesar 39,05% dari total kredit, diikuti oleh kredit konsumsi dan investasi yang masing-masing sebesar Rp9,70 triliun (pangsa 38,36%) dan Rp5,71 triliun (pangsa 22,59%) (Grafik 4.10). Kinerja yang baik pada kredit investasi menyebabkan adanya peningkatan pangsa kredit investasi dan berada dalam tren yang meningkat sejak 5 tahun terakhir (Grafik 4.11). Pangsa penyaluran kredit yang semakin besar pada sektor produktif tersebut, menjadi indikasi yang baik dalam rangka memberikan *multiplier effect* ke berbagai sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.1.4 Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

Peningkatan penyaluan kredit Provinsi Bangka Belitung pada triwulan I 2025 didukung dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Hal tersebut seiring dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada periode berjalan tercatat sebesar 4,00% (Grafik 4.12) atau masih berada di bawah batas *threshold* sebesar 5%. Namun demikian, NPL tersebut lebih tinggi dari NPL pada triwulan sebelumnya sebesar 2,85% (yoy). Peningkatan NPL tersebut perlu menjadi perhatian bagi perbankan yang menyalurkan kreditnya di wilayah Bangka Belitung guna meningkatkan nilai pruden terhadap proyek yang dibiayai.

Sejalan dengan itu, risiko likuiditas perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpantau semakin membaik. Pada triwulan I 2025, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 95,22%, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 101,07% (Grafik 4.13). Nilai rasio LDR yang kurang dari 100% mengindikasikan bahwa bank menyalurkan kredit lebih rendah daripada simpanan yang diterima, sehingga terdapat penurunan risiko dana cadangan milik

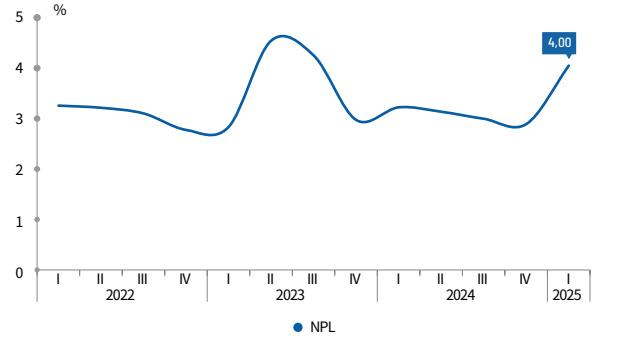

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 *Non-Performing Loan* (NPL)

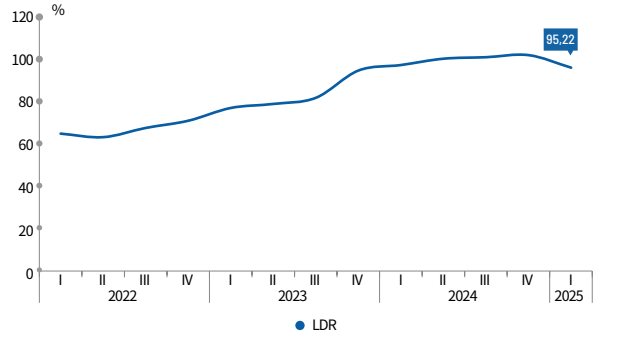

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 *Loan to Deposit* (LDR)

perbankan tidak mencukupi apabila terdapat penarikan dana dalam jumlah besar. Penurunan LDR tersebut didorong oleh fenomena peningkatan penghimpunan DPK yang lebih besar daripada peningkatan penyaluran kredit perbankan. Penguatan risiko likuiditas ke depan harus menjadi perhatian perbankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

4.2 PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan sektoral, pembiayaan perbankan utamanya disalurkan kepada Lapangan Usaha (LU) Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi kepada LU Perdagangan Besar Eceran; diikuti oleh LU Pertambangan Penggalian dan LU Pertanian Perburuan Kehutanan. Kredit pada LU Perdagangan Besar Eceran masih menjadi penyaluran tertinggi, dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp4,60

Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2024				2025	*GROWTH* (%YOY)
			I	II	III	IV	I	
1	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	Rp Milliar	2.502	2.557	3.366	3.410	3.436	37,35%
2	PERIKANAN	Rp Milliar	453	451	441	500	470	3,83%
3	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	Rp Milliar	3.139	3.204	3.740	3.919	3.727	18,70%
4	INDUSTRI PENGOLAHAN	Rp Milliar	1.082	1.149	986	958	969	-10,38%
5	LISTRIK, GAS DAN AIR	Rp Milliar	170	150	142	133	107	-36,77%
6	KONSTRUKSI	Rp Milliar	299	323	344	304	299	-0,19%
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	Rp Milliar	467	4.831	4.789	4.645	4.595	-1,60%
8	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	Rp Milliar	310	358	348	346	348	12,36%
9	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	Rp Milliar	163	162	149	204	217	32,61%
10	PERANTARA KEUANGAN	Rp Milliar	21	20	18	218	18	-12,93%
11	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	Rp Milliar	494	670	748	752	751	52,05%
12	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	Rp Milliar	0	0	1	1	2	7.058,35%
13	JASA PENDIDIKAN	Rp Milliar	21	23	22	33	34	55,95%
14	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	Rp Milliar	147	152	151	144	138	-5,99%
15	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	Rp Milliar	465	471	447	438	434	-6,83%
16	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	Rp Milliar	32	35	37	39	42	32,25%
17	BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	Rp Milliar	0	0	0	0	0	0,00%
18	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	Rp Milliar	0	0	0	0	0	0,00%
19	PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA	Rp Milliar	8.975	9.084	9.270	9.586	9.698	8,06%
TOTAL			22.943	23.641	24.999	25.631	25.285	7,31%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

triliun atau 18,18% dari total kredit. Lebih lanjut, kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga cukup besar tersalurkan pada LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, dengan pangsa masing-masing mencapai 14,74% dan 13,59%.

Penyaluran kredit ke sektor utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencatatkan pertumbuhan *double digit*, turut mendorong kinerja pertumbuhan kredit pada triwulan I 2025. Kredit LU Pertanian, Perburuan dan Kehutahan pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 37,35% (yoy), diikuti kredit LU Pertambangan dan Penggalian yang juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,70% (yoy).

4.2.1 Perkembangan Kinerja Korporasi

Kinerja sektor korporasi melalui sisi intermediasi keuangan terpantau baik terlihat kredit dan DPK yang mencatatkan pertumbuhan positif. Terjaganya sektor korporasi sejalan dengan peningkatan kemudahan akses perusahaan terhadap pembiayaan perbankan serta perbaikan ekosistem ekonomi yang berkesinambungan.

DPK Korporasi pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 53,59% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,11% (yoy). Pertumbuhan positif DPK Korporasi pada periode laporan merupakan yang pertama kali setelah sepanjang tahun 2024 mengalami kontraksi. Giro masih mendominasi pilihan korporasi dalam menempatkan dananya (72,43% dari total DPK korporasi), diikuti oleh deposito (19,60% dari total DPK korporasi), dan sisanya berupa tabungan. Pertumbuhan DPK korporasi sejalan dengan kondisi likuiditas perusahaan yang masih tetap tumbuh positif.

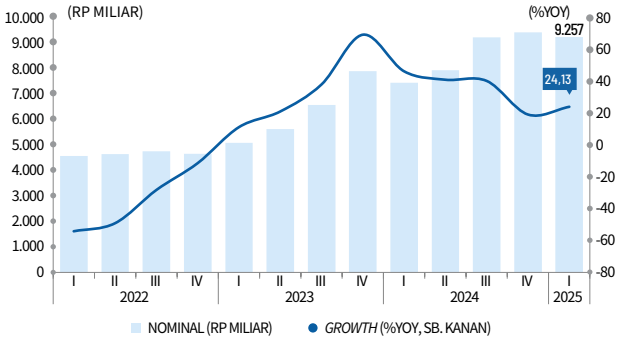

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi

Kredit Korporasi pada triwulan I 2025 tumbuh sejalan dengan perkembangan total kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kredit korporasi pada triwulan I 2025 telah tersalurkan sebesar Rp9,25 triliun, atau tumbuh sebesar 24,13% (yoy) (Grafik 4.14). Berdasarkan besaran pangsanya, penyaluran kredit korporasi didominasi pada kredit modal kerja dengan pangsa mencapai 65,84% dari total kredit korporasi, diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 34,12% dan sisanya 0,04% merupakan kredit konsumsi.

Peningkatan penyaluran kredit dari sektor korporasi utamanya ditopang oleh pertumbuhan kredit dari jenis modal kerja. Kredit modal kerja tumbuh tinggi sebesar 15,08% (yoy), meningkat dari 4,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, kredit investasi juga tetap konsisten tumbuh tinggi sebesar 46,39% (yoy), meskipun relatif melambat dari 61,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.15).

Pertumbuhan kredit korporasi terutama didukung oleh akselerasi kredit pada LU Pertambangan dan LU Pertanian. LU Pertambangan dengan pangsa

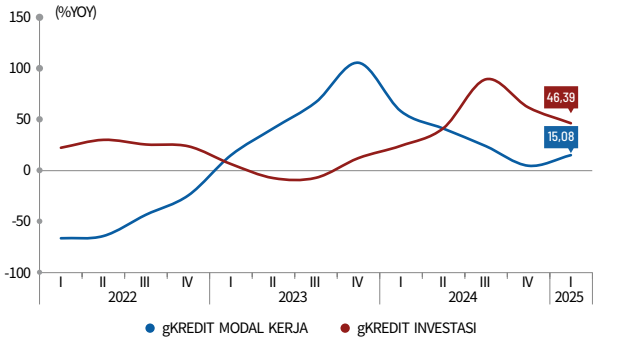

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit

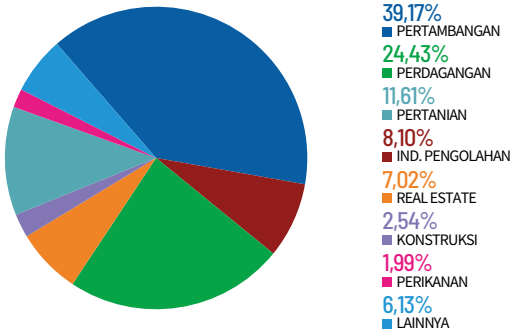

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi berdasarkan LU

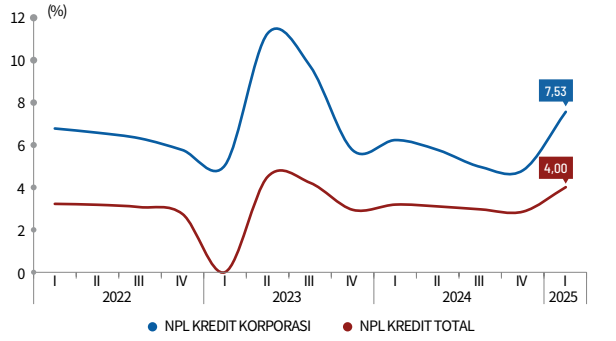

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 NPL Kredit Total dan Kredit Korporasi

terbesar yakni 39,17% (Grafik 4.16), tumbuh sebesar 19,00% (yoy). Lebih lanjut, penyaluran kredit korporasi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran terbesar kedua dengan pangsa sebesar 23,43%, tumbuh sebesar 10,91% (yoy). Selain itu, LU Pertanian Perburuan dan Kehutanan menjadi penyaluran terbesar berikutnya dengan pangsa 11,61% (Grafik 4.16). Kredit korporasi ke LU Pertanian tumbuh tinggi mencapai 265,79% (yoy).

Namun demikian, peningkatan penyaluran kredit korporasi pada triwulan berjalan, tidak sejalan dengan perbaikan kualitas kredit. NPL Kredit korporasi mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 7,53% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,80% (Grafik 4.17). Peningkatan NPL kredit korporasi didorong oleh peningkatan kredit korporasi sektoral di LU Pertambangan dan Penggalian dengan NPL 6,22%, meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya 0,20%. Peningkatan NPL pada kredit korporasi ini perlu menjadi perhatian perbankan di Bangka Belitung sejalan dengan nilainya yang telah melampaui batas *threshold* sebesar 5%.

4.2.2 Perkembangan Kinerja Rumah Tangga

Kinerja intermediasi dari rumah tangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2024 mulai membaik, tecermin dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan DPK RT. DPK RT tumbuh 2,31% (yoy) menjadi sebesar Rp18,48 triliun, membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,69% (yoy). Pertumbuhan DPK RT pada periode laporan merupakan yang pertama setelah dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Dari sisi penempatan, DPK RT masih didominasi oleh tabungan yang mencapai 69,79% dari total DPK RT dan diikuti oleh deposito yang mencapai 29,09% dari total DPK RT.

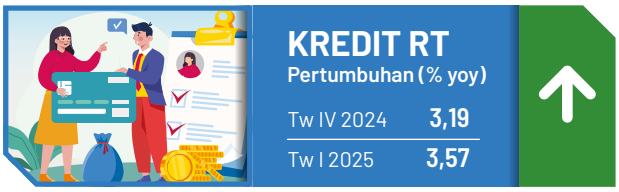

Kredit ke sektor rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar keseluruhan kredit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pangsa 61,72% terhadap total kredit perbankan. Pada triwulan I 2025, realisasi kredit rumah tangga mencapai Rp15,61 triliun atau tumbuh 3,57% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya 3,19% (yoy) (Grafik 4.19). Penyaluran kredit rumah tangga yang tetap tumbuh, sejalan dengan

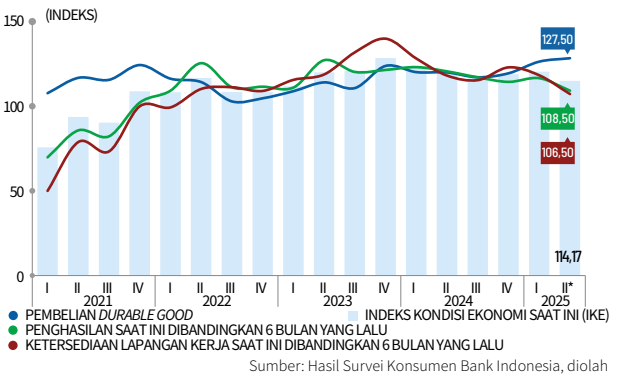

Sumber: Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

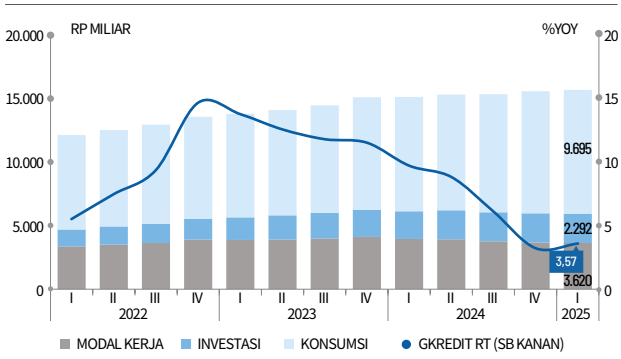

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

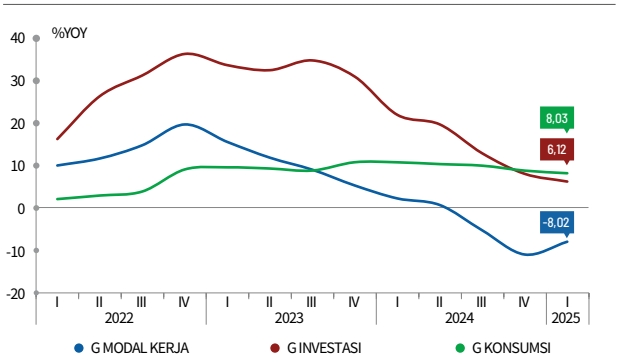

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang membaik. IKK pada triwulan I 2025 sebesar 121,00, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 120,67 (Grafik 4.18). Peningkatan optimisme masyarakat tersebut didukung oleh keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan. Adapun, secara umum kredit rumah tangga terdiri dari kredit produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi) dan kredit konsumsi.

Kredit rumah tangga didominasi kredit konsumsi dengan pangsa mencapai 62,12% atau senilai Rp9,69 triliun. Pada triwulan I 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 8,03% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 8,64% (yoy) (Grafik 4.20). Penggunaan kredit konsumsi didominasi oleh kredit multiguna dan kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) (Grafik 4.21). Kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) sebagian besar digunakan untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 dengan nilai realisasi sebesar Rp2,54 triliun atau sebesar 26,29% dari total kredit rumah tangga. Sementara itu, kredit multiguna didominasi oleh kredit multiguna untuk keperluan lainnya sebesar Rp3,73 triliun atau pangsanya sebesar 38,56% dari total kredit rumah tangga.

Di sisi lain, realisasi kredit produktif (kredit rumah tangga untuk modal kerja dan investasi) mencapai Rp5,91 triliun atau sebesar 37,88% dari total kredit yang tersalurkan ke rumah tangga. Pada triwulan I 2025, kredit produktif rumah tangga terkontraksi 3,01% (yoy) atau membaik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 4,55% (yoy). Kredit modal kerja sebesar Rp3,62 triliun mengalami kontraksi sebesar 8,02% (yoy), meskipun relatif membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 11,03% (yoy) (Grafik 4.21). Sementara itu, kredit investasi masih terus tumbuh dengan nilai Rp2,29 triliun atau tumbuh 6,12% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,93% (yoy).

Kualitas kredit rumah tangga tetap terjaga, tecermin pada rasio NPL yang relatif stabil berada di bawah 5% (Grafik 4.22). Persentase NPL kredit rumah tangga 1,99%, meskipun sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya 1,79%. Rasio NPL kredit rumah tangga tersebut masih di bawah rasio NPL kredit total yang tercatat 4,00%. Eksposur kredit rumah tangga terhadap risiko stabilitas sistem keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkendali dengan terjaganya NPL pada level yang rendah.

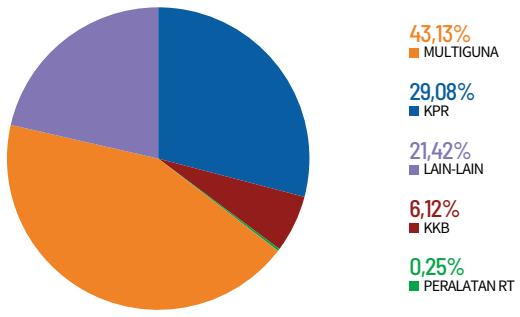

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Pangsa Kredit Konsumsi Rumah Tangga

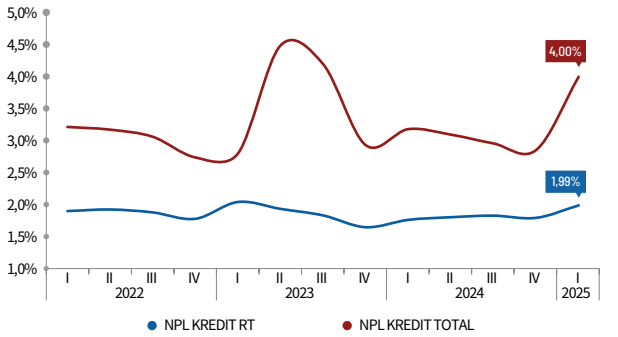

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

4.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.3.1 Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2025 terkontraksi 0,92% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 0,57% (yoy). Secara nominal, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan ini mencapai Rp7,20 triliun atau 28,50% terhadap total kredit perbankan (Grafik 4.23).

Berdasarkan jenisnya, penurunan penyaluran kredit UMKM tersebut terutama disebabkan oleh kredit modal kerja. Pada triwulan I 2025, kredit modal kerja UMKM sebesar Rp4,26 triliun, terkontraksi 4,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,72% (yoy). Di sisi lain, kredit investasi UMKM yang mencapai Rp2,94 triliun, masih tetap tumbuh sebesar 5,07% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 11,87% (yoy) (Grafik 4.23).

Dari sisi sektoral, kredit UMKM terutama disalurkan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu dengan pangsa 38,17%; LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 34,38% dan LU Perikanan 4,92% (Grafik 4.24). Realisasi kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan I 2025 terkontraksi 7,23% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,15% (yoy). Demikian halnya dengan kredit LU Perikanan

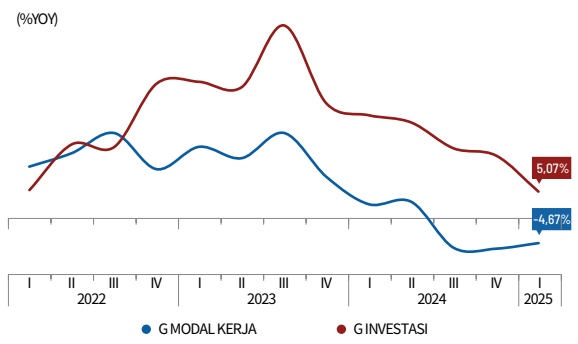

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Kredit

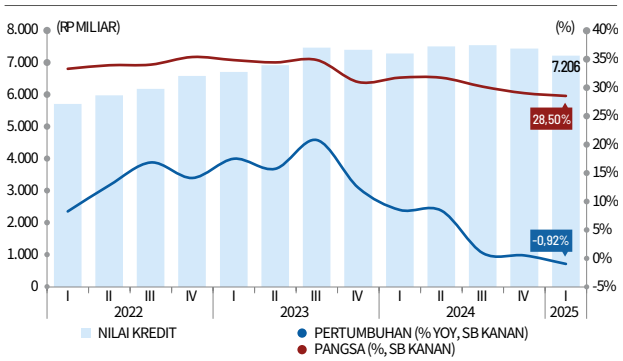

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM

terkontraksi 18,12% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya 3,12% (yoy). Sementara, kredit LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan tumbuh 8,62% (yoy) pada triwulan I 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,23% (yoy).

Risiko kredit UMKM tetap baik seiring dengan rasio NPL lebih rendah dari *threshold*. Rasio NPL UMKM pada triwulan I 2025 sebesar 3,44%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,74% namun tetap di bawah *threshold* 5% (Grafik 4.25).

4.3.2 Program Peningkatan Akses Keuangan UMKM

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah, otoritas terkait dan *stakeholder* lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Bangka Belitung, dan perbankan

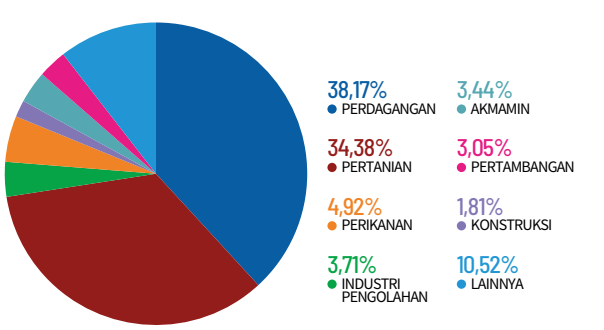

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Pangsa Kredit UMKM Secara Sektoral

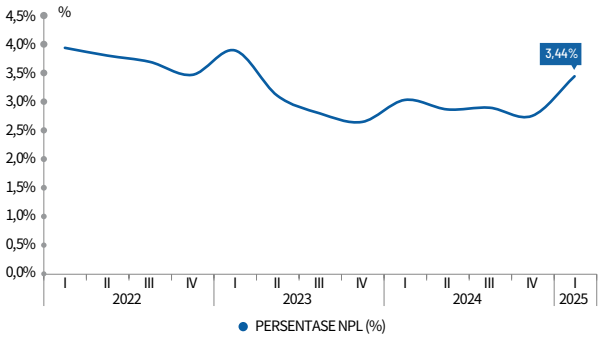

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 NPL Kredit UMKM

senantiasa melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala mengenai peran pembiayaan perbankan ke sektor riil termasuk penyaluran KUR dan kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan untuk mendorong peran intermediasi perbankan untuk membiayai sektor ekonomi produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan koordinasi secara berkala ini juga dilakukan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang selama ini dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan KUR dan kredit UMKM sehingga dapat diperoleh solusi bersama. Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan perbankan juga aktif memperluas penggunaan *digital payment* menggunakan QRIS kepada UMKM untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan meningkatkan kenyamanan serta kemudahan dalam bertransaksi.

Melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan juga berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah. Percepatan akses keuangan daerah juga menjadi kunci dalam mendukung upaya pemulikan ekonomi. Dengan adanya TPAKD, peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah dapat dipercepat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Dari sisi penarawan, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Selain itu, guna mendukung Program Asta Cita, Bank Indonesia juga melakukan penguatan implementasi Kebijakan Insentif Makroprudensial (KLM) per 1 April 2025, untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia turut mendorong akses pembiayaan UMKM melalui *business matching*, pengembangan kelompok subsisten, dan pengembangan UMKM hijau.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong peningkatan fungsi intermediasi yang berkualitas sehingga dapat mengeskalasi akses keuangan UMKM. Selama triwulan I 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa program kerja yang mendorong aktivitas UMKM Bangka Belitung, antara lainnya seperti Bekisah, *Capacity Building* Hidrogranik dan Kelurahan Tanggap Inflasi, pembentukan Hebitren, kurasi produk UMKM unggulan, kurasi IKRA IN2MOTION Festival, kurasi promosi dagang ekspor *food & hotel asia food and beverage* hingga sosialisasi laik *hygiene* menuju Zona KHAS.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus mendorong optimalisasi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan UMKM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Kulat Pelawan Merah

BAB 5

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I tahun 2025, volume transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan, tecermin dari peningkatan aktivitas pada transaksi BI-RTGS dan QRIS. Meskipun transaksi SKNBI masih mengalami kontraksi, pertumbuhannya tercatat membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi tunai menunjukkan *Net Outflow*, sejalan dengan peningkatan kebutuhan uang kartal yang biasanya terjadi selama momen Ramadan dan Idulfitri.

Transaksi RTGS (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
32,27%	**92,88%**
Rp15,15T	Rp11,29T

Transaksi SKNBI (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
-24,69%	**-14,30%**
Rp1,22T	Rp0,84T

Inflow Uang Kartal (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
-36,05%	**-40,76%**
Rp228,99M	Rp964,18M

Outlow Uang Kartal (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
15,40%	**41,87%**
Rp2.210,24M	Rp1.096,42M

Transaksi QRIS (yoy)

Tw IV 2024	Tw I 2025
103,51%	**118,71%**
Rp328,69M	Rp390,64M

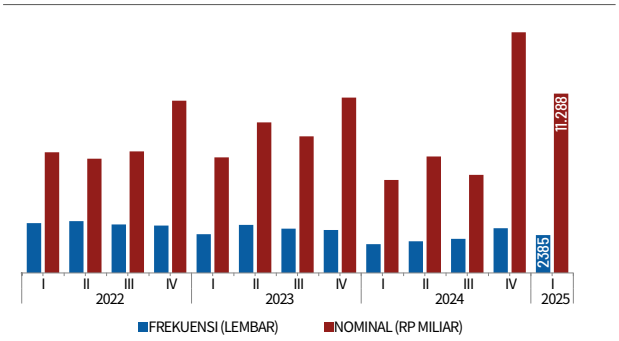

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi RTGS

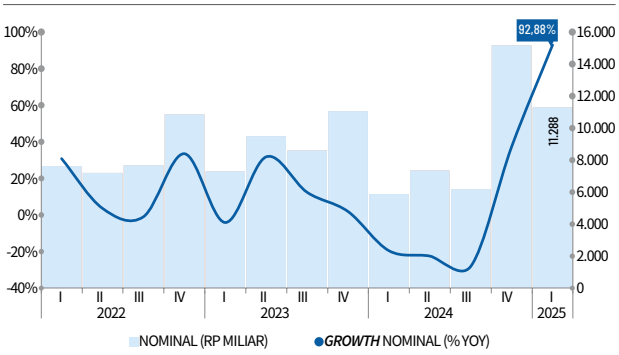

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan Nominal Transaksi BI-RTGS

5.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

5.1.1 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara nominal, nilai transaksi RTGS pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi RTGS pada periode tersebut sebesar Rp11,29 triliun atau tumbuh sebesar 92,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,27 (yoy). Hal tersebut sejalan dengan momen Ramadan dan Idulfitri yang dapat menjadi pendorong tingginya perputaran transaksi nilai besar menggunakan RTGS interbank.

Secara spasial, transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh transaksi dari Kota

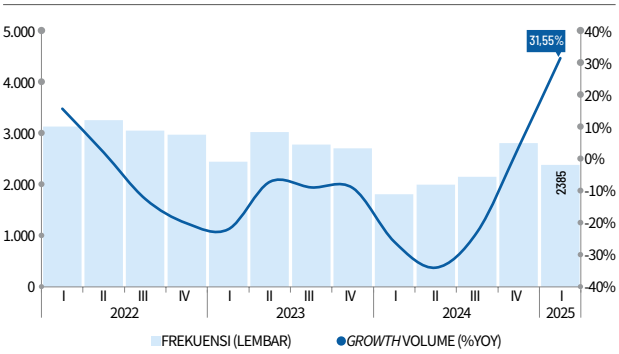

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Pertumbuhan Frekuensi Transaksi BI-RTGS

Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi dan pusat perekonomian terbesar, diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 5.1 Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Perputaran Kliring													
a. Nominal (Rp Juta)	1.643.178,88	1.604.550,53	1.329.023,73	1.518.780,14	1.144.808,56	1.095.734,15	1.350.534,85	1.617.759	978,11	959,48	1.015,18	1.218,40	838,24
b. Warkat (lembar)	47.781	47477	44165	45596	36.697	37.269	40.192	44.873	32,404	35.358	35.084	33.614	24.698
c. Nominal % (yoy)	21,9%	1,4%	-23,6%	-31,6%	-30,33%	-31,71%	1,62%	6,52%	-14,56%	-12,44%	-24,83%	-24,69%	-14.30%
d. Warkat % (yoy)	1,65%	-8,02%	1437,10%	-20,07%	-23,97%	-21,54%	-8,99%	-3,28%	-11,70%	-5,13%	-12,71%	-25,09%	-23,78%
Perputaran Per Hari													
a. Nominal (Rp Juta)	26.937,36	29.173,65	20.136,72	110.729,98	87.394,21	99.775,43	100.495,60	115.923,10	82,69	89,45	73,35	85,25	69,94
b. Warkat (lembar)	775	856	11.766	2.290	1.739	2.141	1.924,64	2.233	1.667	2.022	1.616	1.610	1.279
Kliring Debit Pengembalian													
a. Nominal (Rp Juta)	2.996	4.938	5.869	5.490	6.144	2.708	5.381	7.960	11,81	4,78	8,59	6,54	7,73
b. Warkat (lembar)	33	77	84	103	105	91	102	124	139	104	171	97	162
Jumlah Hari	61	55	66	60	62	53	62	61	58	52	65	63	58
Kliring Debit Pengembalian													
a. Nominal (%)	0,18%	0,31%	0,44%	0,36%	0,54%	0,25%	0,40%	0,49%	1,21%	0,50%	0,85%	0,54%	0,92%
b. Warkat (%)	0,07%	0,14%	0,01%	0,22%	0,29%	0,24%	0,24%	0,27%	0,43%	0,29%	0,49%	0,29%	0,66%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

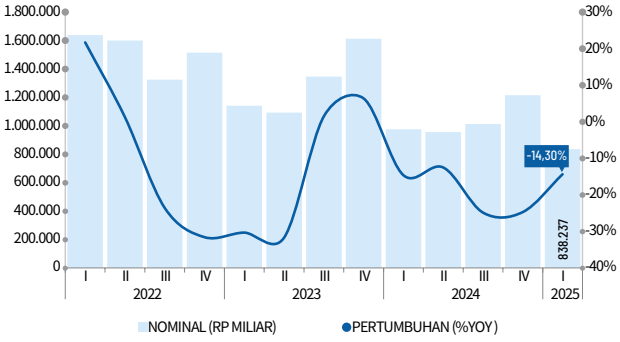

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring

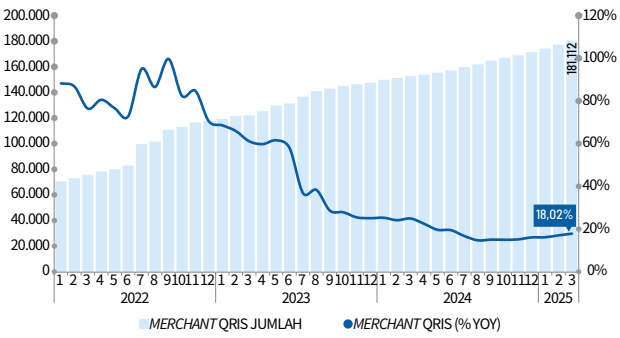

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Jumlah *Merchant* QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.1.2 Perkembangan Pembayaran Transaksi SKNBI

Selama triwulan I 2025, nominal transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai Rp838,24 miliar atau terkontraksi 14,30% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,69% (yoy). Perputaran kliring dari sisi warkat mencapai 24.698 lembar atau terkontraksi 23,78% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 25,09% (yoy). Perputaran kliring harian pada triwulan I 2025 mencapai Rp69,94 miliar dengan rata-rata jumlah warkat per hari sebanyak 1.279 lembar.

Transaksi kliring debit pengembalian pada triwulan I 2025 mencapai Rp7,73 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 162 lembar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan jumlah warkat sebanyak 97 lembar. Rasio kliring debit pengembalian pada triwulan I 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,92% dari segi nominal dan 0,66% dari segi jumlah warkat.

5.1.3 Perkembangan Transaksi Digital Melalui Kanal QRIS

Implementasi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meluas. Hingga Maret 2025, jumlah *merchant* QRIS di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 181.112 *merchant* atau tumbuh sebesar 18,02% (yoy). Secara spasial, merchant QRIS terbanyak tercatat di kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 52.831 *merchant* diikuti oleh Kabupaten Bangka sebanyak 40.615 *merchant* dan Kabupaten Belitung sebanyak 29.365 *merchant*. Sebanyak 62,46% dari populasi *merchant* QRIS di Bangka Belitung merupakan pelaku UMKM kategori Usaha Mikro. Hal ini menunjukkan akseptasi QRIS yang mudah dan murah bagi kalangan pengusaha mikro, sejalan dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa QRIS dapat dengan mudah diadaptasi dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Maret 2025 telah mencapai 215.216 *user,* serta penambahan sebanyak

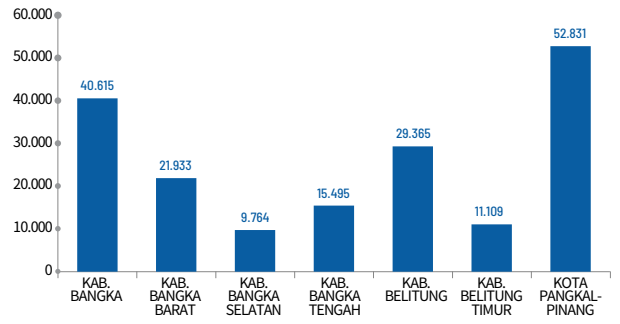

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Persebaran Jumlah *Merchant* QRIS per wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

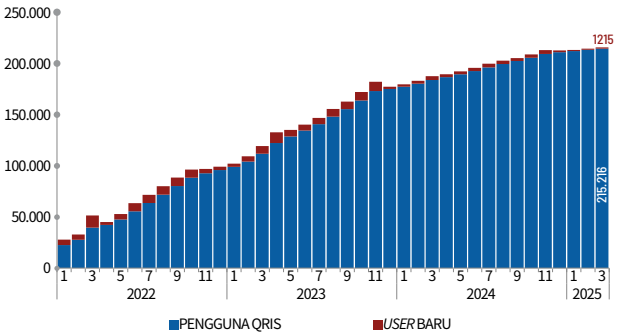

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Pengguna QRIS wilayah Bangka Belitung

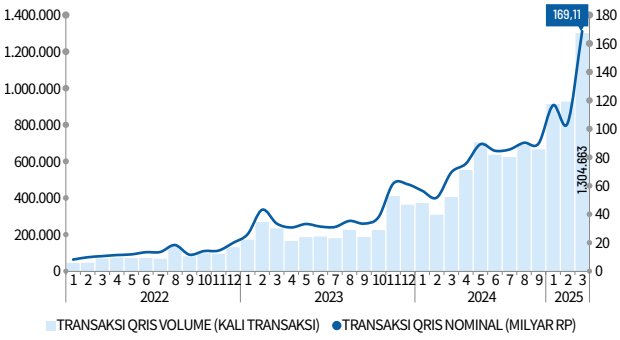

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

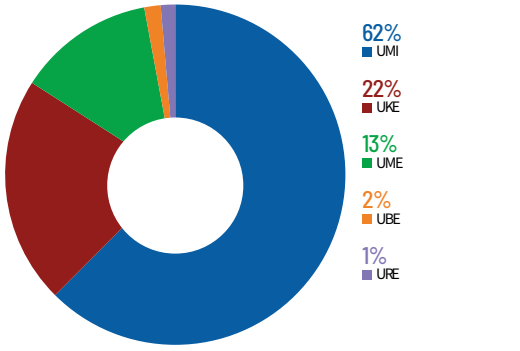

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9 Sebaran *Merchant* QRIS wilayah Bangka Belitung

3.517 pengguna baru QRIS sepanjang triwulan I 2025. Transaksi QRIS di wilayah Bangka Belitung pada triwulan I 2025 juga meningkat dengan nominal transaksi sebesar Rp390,64 miliar dan volume transaksi mencapai 3.152.123 transaksi. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara nominal maupun volume meningkat signifikan masing-masing sebesar 118,71% (yoy) dan 188,31% (yoy).

5.1.4 Perkembangan Pembayaran dengan APMK dan Uang Elektronik

Pada triwulan I 2025, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) tercatat tumbuh. Peningkatan transaksi APMK pada periode laporan terutama didorong oleh penggunaan ATM/Debit dan uang elektronik, sedangkan kartu kredit mengalami kontraksi. Meskipun secara nominal transaksi kartu kredit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, volume transaksi kartu kredit pada triwulan I 2025 masih tercatat tumbuh 9,78% (yoy) dengan jumlah sebanyak 106.316 transaksi. Transaksi kartu kredit pada triwulan I 2025 didominasi untuk kegiatan transaksi belanja dengan transaksi terbesar yang berasal dari Kota Pangkalpinang.

Nominal transaksi kartu ATM/Debit pada triwulan I 2025 mencapai Rp11 triliun atau tumbuh 13,17% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,67% (yoy). Volume transaksi kartu debit pada triwulan I 2025 mencapai 8,1 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 3,51% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,47% (yoy).

Transaksi uang elektronik juga tercatat tumbuh. Pada triwulan I 2025, volume transaksi uang elektronik mencapai 4,2 juta transaksi atau tumbuh 11,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,8 juta transaksi atau tumbuh sebesar 2,43% (yoy). Secara nominal, transaksi uang elektronik pada periode laporan mencapai Rp558,66 miliar atau terkontraksi 2,41% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,43% (yoy).

Pertumbuhan volume transaksi uang elektronik didorong oleh kampanye penggunaan QRIS serta berbagai pelaksanaan kegiatan *Experience* QRIS Rp1,- menggunakan dompet/uang elektronik di Provinsi

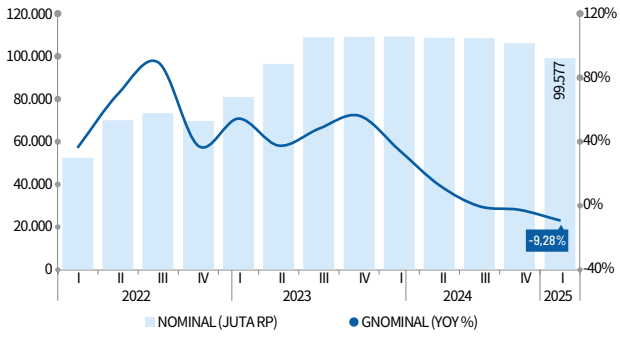

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Rp Juta)

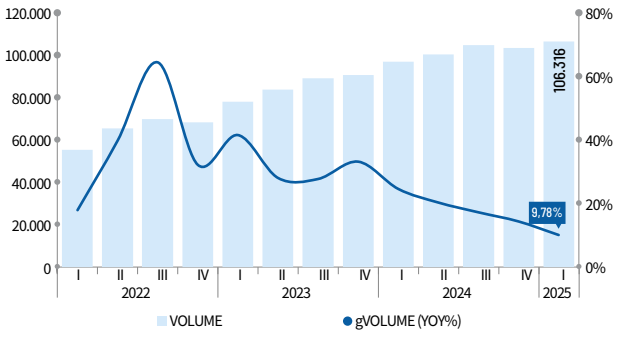

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Volume)

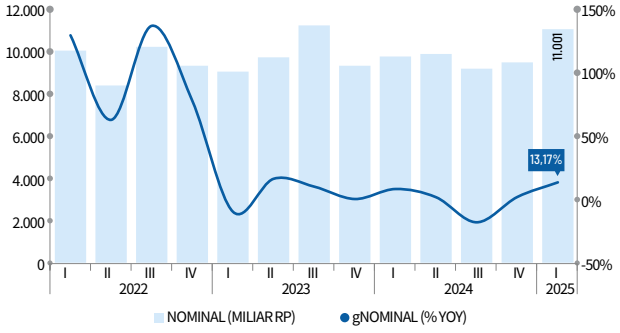

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Rp Miliar)

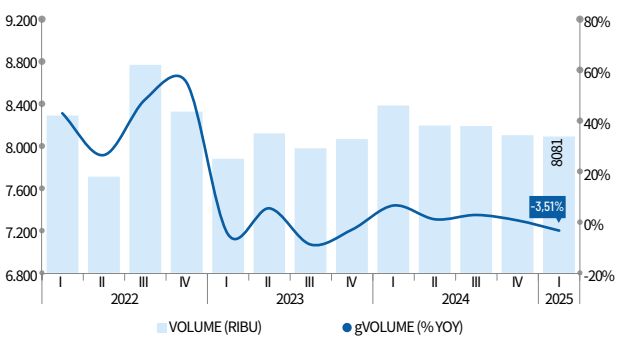

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Volume)

Kepulauan Bangka Belitung. Bank Indonesia bersama dengan perbankan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), bersinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan mitra strategis lainnya terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang transaksi digital dimaksud kepada masyarakat.

5.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

5.2.1 *Inflow-Outflow* Uang Kartal

Salah satu tugas Bank Indonesia di daerah adalah melakukan pengelolaan uang Rupiah agar uang yang beredar dalam kondisi layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada triwulan I 2025, pengedaran uang kartal oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net outflow* sebesar Rp132,24 miliar. Aliran uang masuk *(inflow)* selama triwulan I 2025 mencapai Rp964,18 miliar atau menurun sebesar 40,76% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) tercatat mencapai Rp1,1 triliun atau meningkat sebesar 41,87% (yoy).

Kondisi *net outflow* (*outflow* lebih besar daripada *inflow*) pada triwulan I 2025 disebabkan oleh tingginya kebutuhan uang tunai oleh masyarakat dalam menghadapi momen Ramadan dan Idulfitri.

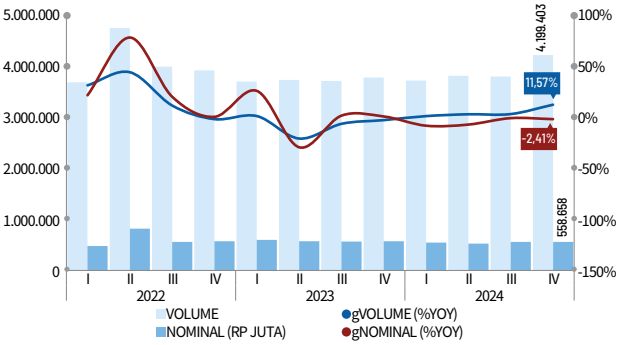

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Jumlah Transaksi Uang Elektronik

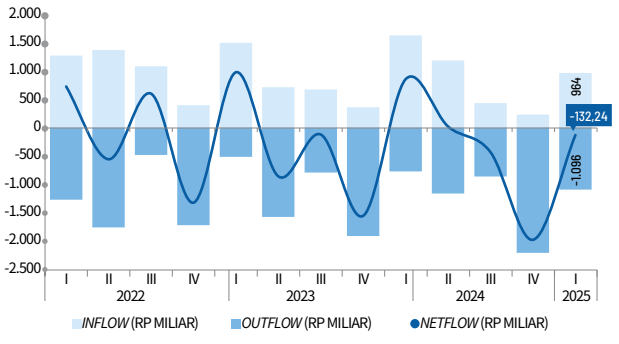

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15 Perkembangan Aliran Uang Kartal Bangka Belitung

Tabel 5.2 *Inflow – Outflow* Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INFLOW/OUTFLOW	2022				2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Rp miliar)	1.271,84	1.370,79	1.082,18	396,39	1494,61	713,99	671,55	358,08	1627,50	1.183,57	430,22	228,99	964,18
Outflow (Rp miliar)	-1.273,20	-1.761,87	-483,37	-1.722,27	-517,78	-1.575,71	-794,07	-1.915,22	772,83	1.165,15	865,14	2.210,24	-1.096,42
Netflow (Rp miliar)	724,76	-559,21	598,81	-1.325,88	976,83	-861,72	-122,51	-1.557,14	854,67	18,42	-434,93	-1.981,25	-132,24
% g *Inflow* (yoy)	90,69%	-24,09%	-20,88%	-79,05%	17,52%	-47,91%	-37,94%	-9,67%	8,89%	65,77%	-35,94%	-36,05%	-40,76%
% g *Outflow* (yoy)	128,36%	227,03%	99,86%	47,50%	-59,33%	-10,57%	64,28%	11,20%	49,26%	-26,06%	8,95%	15,40%	41,87%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

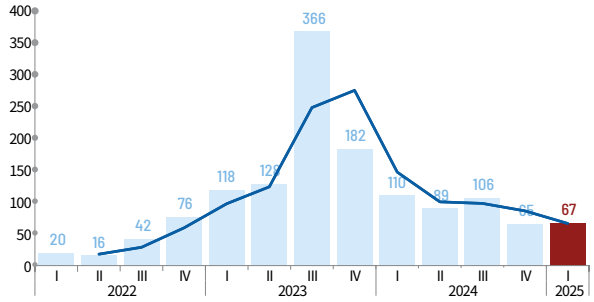

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.16 Penemuan Jumlah Lembar Uang Palsu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.3 TEMUAN UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan temuan 67 lembar uang palsu selama triwulan I 2025. Hal ini lebih tinggi dari temuan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 65 lembar. Upaya pencegahan peningkatan penyebaran uang palsu senantiasa dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan Cinta Bangga Paham Rupiah di berbagai tempat dan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai amanat Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia sebagai anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) berperan aktif dalam upaya penanggulangan uang palsu dengan berpedoman pada *strategy map* pencegahan & pemberantasan uang rupiah palsu di masyarakat. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian Rupiah, Bank Indonesia juga menyediakan fasilitas klarifikasi bagi masyarakat yang meragukan keaslian uang Rupiah. Apabila masyarakat menemukan indikasi sindikat penyebaran uang palsu, mereka dapat melaporkan kepada kepolisian setempat, yang kemudian akan ditindaklanjuti bersama Bank Indonesia sebagai saksi ahli uang Rupiah di ranah hukum.

5.4 PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan penyediaan uang layak edar dengan membuka layanan penukaran uang Rupiah tidak layak edar/lusuh oleh masyarakat. Penukaran uang yang rusak/cacat dan tidak layak dapat dilakukan melalui *website pintar.bi.go.id* dengan melakukan pendaftaran sebelum hari penukaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Belitung terhadap uang kartal baik uang kertas maupun uang logam, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan layanan penarikan dan penyetoran uang melalui kas titipan di Kota Tanjungpandan bekerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Tanjungpandan.

5.5 UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat Bangka Belitung mengenai cara bertransaksi nontunai. Beberapa tantangan dalam mendorong transaksi nontunai antara lain: (i) pemahaman masyarakat tentang transaksi nontunai dan manfaat yang dapat dirasakan jika melakukan transaksi secara nontunai; (ii) infrastruktur nontunai terutama akses jaringan internet di beberapa lokasi *remote area*; dan (iii) dukungan pemerintah, pelaku usaha, instansi dan pihak lain yang terkait untuk bertransaksi nontunai yang perlu ditingkatkan.

Untuk itu, dalam upaya menarik minat masyarakat untuk bertransaksi secara nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rutin melakukan sosialisasi edukasi tentang transaksi nontunai dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui program Elektronifikasi. Sepanjang triwulan I 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aktif mendorong penggunaan instrumen dan kanal pembayaran nontunai melalui berbagai kegiatan sosialisasi mengenai QRIS, layanan Sistem Pembayaran BI, serta pelindungan konsumen kepada masyarakat di berbagai segmen. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pengguna baru QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui *Experience* QRIS Rp1 dan Sosialisasi/Edukasi. Selain itu, koordinasi dengan pemda dan lintas *stakeholder* untuk mendorong

inovasi serta perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga dilakukan melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan monitoring pelaporan IETPD bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah terbentuk di setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Guna mendorong ekosistem nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggalakkan berbagai kegiatan di antaranya sosialisasi layanan sistem pembayaran Bank Indonesia ke perguruan tinggi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum). Untuk mendorong perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui peluncuran dan Penyerahan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dan penyerahan mesin EDC QRIS Dinamis dari Bank Sumsel Babel kepada OPD Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menggunakan instrumen dan kanal pembayaran nontunai guna keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

BOKS 3

Sang Depati QRIS: Kolaborasi BI x Perbankan Berhasil Raih *Outcome* Signifikan pada Perluasan QRIS

Program "Sang Depati QRIS" merupakan inisiatif kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan penggunaan QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini bertujuan untuk memperluas penggunaan QRIS di masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang Triwulan I-2025, program "Sang Depati QRIS" telah mencapai hasil yang signifikan. Volume transaksi QRIS mencapai 14.000 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp1,6 miliar. Selain itu, program ini juga berhasil mengakuisisi 2.117 pengguna baru QRIS dan menambah 288 *merchant* baru QRIS.

Hasil ini menunjukkan bahwa program "Sang Depati QRIS" telah berhasil meningkatkan penggunaan QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan transaksi keuangan yang efisien dan aman.

Program "Sang Depati QRIS" merupakan contoh sukses kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan penggunaan QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan hasil yang signifikan dan dampak positif yang diharapkan, program ini dapat menjadi model untuk program-program lainnya yang bertujuan meningkatkan penggunaan teknologi keuangan di daerah.

Melalui program ini, Bank Indonesia dan Perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat terus meningkatkan penggunaan QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menikmati manfaat dari penggunaan QRIS yang lebih luas dan efisien.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Matahari Tenggelam di Pulau Garuda, Belitung

BAB 6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Pada triwulan I 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melemah dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun disertai dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dari sisi indikator kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meskipun persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Namun demikian, berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia masyarakat tetap optimis baik untuk kondisi saat ini ataupun kondisi 6 bulan yang akan datang.

Jumlah Tenaga Kerja

Februari 2024	Februari 2025
787.140 Jiwa	762.980 Jiwa

Nilai Tukar Petani

Tw I 2024	Tw I 2025
124,80	152,83

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Februari 2024	Februari 2025
70,66%	67,67%

Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2023	Tahun 2024
74,09	74,55

Tingkat Pengangguran Terbuka

Februari 2024	Februari 2025
3,85%	4,17%

Tingkat Kemiskinan

Maret 2024	September 2024
4,55%	5,08%

6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan masih dalam proses perbaikan. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dari 70,66% pada Februari 2024 menjadi 67,67% pada Februari 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode laporan dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Pada Februari 2025 jumlah angkatan kerja sebanyak 796.210, lebih rendah 2,74% (yoy) dibandingkan pada Februari 2024 sebanyak 818.630 orang.

Kondisi tersebut juga disertai dengan peningkatan rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,85% pada Februari 2024 menjadi 4,17% pada periode Februari 2025 (Grafik 6.1). Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka) pada Februari 2025 sebanyak 33.224 orang atau bertambah sebanyak 1.738 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan khususnya pada lapangan usaha utama yaitu LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan dampak permasalahan tata kelola timah yang terjadi sejak awal tahun 2024. Kondisi tersebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang berasal dari perusahaan mitra smelter logam timah yang ditutup, mulai dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) hingga SPBU. Lebih lanjut, adanya gangguan pada LU utama tersebut terkonfirmasi dari pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 3,93% (yoy) dan pertumbuhan LU Industri Pengolahan terkontraksi 4,00% (yoy) pada tahun 2024. Berdasarkan laman Satu Data Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 1.908 pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah tersebut menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang di-PHK tertinggi di wilayah Sumatra. Adapun kebijakan PHK tersebut dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor dari adanya penutupan perusahaan, keperluan efisiensi perusahaan, pelanggaran terhadap perjanjian kerja, habis kontrak serta pekerja yang memasuki usia pensiun. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendorong penurunan jumlah tenaga kerja di berbagai lapangan usaha seperti terhentinya proyek infrastuktur sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22

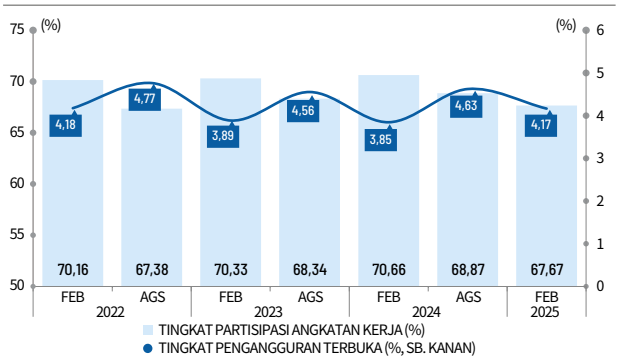

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran, Feb 2022-Ags 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja khususnya di LU Konstruksi. Pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terdampak karena adanya PHK akibat okupansi hotel dan restoran yang turun drastis akibat efisiensi anggaran. Sementara, adanya beberapa kabupaten/kota yang melakukan efisiensi anggaran dengan mengistirahatkan honorer ataupun memangkas gaji honorer juga turut menyokong penurunan jumlah tenaga kerja. Lebih lanjut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginformasikan bahwa terdapat ratusan honorer yang dirumahkan.

Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan penurunan rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan periode Agustus 2024. Tingkat rasio Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,63% dengan jumlah angkatan yang tidak bekerja (pengangguran terbuka) sebanyak 37.210 orang. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan lapangan kerja seiring dengan perbaikan pertumbuhan lapangan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik peningkatan jumlah tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha dipengaruhi oleh tren kenaikan harga Tanda Buah Segara (TBS) sehingga mendorong peningkatan jumlah petani dan pekerja di perkebunan kelapa sawit serta terdapat peningkatan produksi padi karena memasuki musim panen pada bulan Desember 2024 dan Februari 2025. Faktor lainnya seperti peningkatan produksi industri makanan dan perdagangan seiring dengan adanya momentum hari besar seperti Imlek, tradisi ruwah

Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak, Feb 2022-Feb 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEGIATAN UTAMA	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	AGS 2024	FEB 2025	*GROWTH* AGS 2024 - 2025 (%)
Penduduk Usia Kerja	1.124.190	1.139.170	1.145.060	1.149.570	1.158.550	1.166.360	1.176.586	1,56
Angkatan Kerja	788.770	767.603	805.350	785.630	818.630	803.290	796.206	-2,74
a. Bekerja	755.810	730.972	774.010	749.820	787.140	766.080	762.982	-3,07
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	32.950	36.630	31.340	35.810	31.490	37.210	33.224	5,51
Bukan Angkatan Kerja	335.420	371.570	339.710	363.950	339.930	363.070	380.380	11,90
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	70,16	67,38	70,33	68,34	70,66	68,87	67,67	-4,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,18	4,77	3,89	4,56	3,85	4,63	4,17	8,31

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

menjelang Ramadan, perayaan Isra Mi'raj di Februari dan bulan Ramadan. Selain itu, telah didapatkannya persetujuan ekspor logam timah yang berdampak pada pengoperasian kembali smelter pengolahan bijih timah.

Penurunan indikator ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang melemah terkonfirmasi melalui hasil Survei Konsumen. Berdasarkan Survei Konsumen pada triwulan I 2025, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini sebesar 117,50, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 122,17. Meskipun demikian, hasil survei tersebut masih berada pada zona positif yang menunjukkan tetap kuatnya optimisme masyarakat.

Jumlah tenaga kerja pada periode Februari 2025 menurut lapangan pekerjaan utama mencapai 762.980 orang atau menurun sebesar 3,07% dibandingkan periode Februari 2024 yang mencapai 787.140 orang. Penurunan jumlah tenaga kerja terjadi pada beberapa sektor lapangan usaha seperti Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta sektor Administrasi Pemerintahan. LU dengan pengurangan jumlah tenaga kerja terbanyak terjadi pada LU Administrasi Pemerintahan sebanyak 8.754 tenaga kerja, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 8.545 tenaga kerja, dan LU Konstruksi berkurang 4.644 tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Konstruksi terjadi akibat adanya PHK/merumahkan pekerja di bidang perhotelan akibat okupansi hotel dan restoran mengalami penurunan serta terhentinya proyek infrastruktur seiring dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini juga sejalan dengan laju pertumbuhan pada LU tersebut yang terkontraksi dan lebih rendah pada triwulan I 2025 dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

Namun demikian, penurunan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak tertahan oleh penambahan jumlah tenaga kerja pada beberapa sektor lapangan usaha utama khususnya pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdapat penambahan tenaga kerja hingga mencapai 5.789 orang, LU Industri Pengolahan terdapat penambahan sebanyak 2.836 tenaga kerja dan LU Perdagangan Besar dan Eceran terdapat penambahan sebanyak 2.514 tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja tersebut didorong oleh peningkatan minat masyarakat untuk bekerja pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan khususnya perkebunan kelapa sawit atau tandan buah segar (TBS) imbas tren peningkatan harga TBS yang masih berlanjut dampak tren peningkatan harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar global. Kondisi tersebut juga didukung oleh adanya pembukaan beberapa perusahaan pabrik industri pengolahan CPO yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara, peningkatan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran didorong oleh ekspansi pelaku usaha dalam pembukaan gerai retail modern ataupun gerai penjualan lainnya.

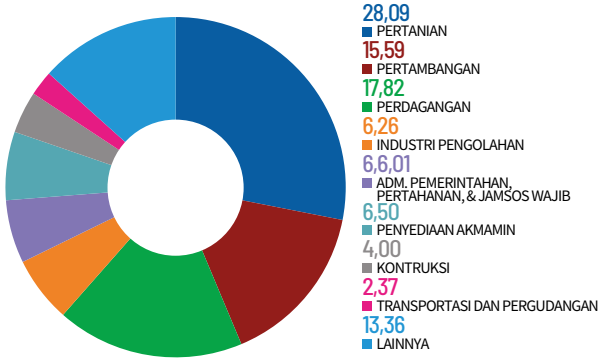

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bloomberg, diolah

Grafik 6.2 Persentase Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Kerja periode Februari 2025 (%)

Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Feb 2022-Feb 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 22	AGS 22	FEB 23	AGS 23	FEB 24	AGS 24	FEB 25	*GROWTH* FEB 24 - FEB 25
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Jumlah	173.268	183.100	178.997	188.090	208.561	190.830	214.350	2,78%
	%	22,92	25,05	23,13	25,08	26,50	24,91	28,09	
Pertambangan dan Penggalian	Jumlah	153.579	138.970	151.780	124.030	117.020	117.200	118.960	1,66%
	%	20,32	19,01	19,61	16,54	14,87	15,30	15,59	
Industri Pengolahan	Jumlah	55.322	50.190	59.318	53.820	44.924	61.250	47.760	6,31%
	%	7,32	6,87	7,66	7,18	5,71	7,99	6,26	
Pengadaan Listrik, Gas dan Air	Jumlah	4.914	2.260	11.276	7.020	11.841	5.890	6.250	-47,22%
	%	0,65	0,31	1,45	0,93	1,50	0,77	0,82	
Konstruksi	Jumlah	27.123	33.380	34.492	36.680	35.194	34.300	30.550	-13,20%
	%	3,59	4,57	4,46	4,89	4,47	4,48	4,00	
Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah	120.088	128.710	131.268	125.490	134.450	135.400	135.950	1,12%
	%	15,89	17,61	16,96	16,74	17,08	17,67	17,82	
Transportasi dan Pergudangan	Jumlah	19.605	15.140	15.184	16.850	15.576	13.850	18.090	16,14%
	%	2,59	2,07	1,96	2,25	1,98	1,81	2,37	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Jumlah	40.944	36.730	42.901	47.810	58.165	52.650	49.620	-14,69%
	%	5,42	5,03	5,54	6,38	7,39	6,87	6,50	
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	Jumlah	17.345	13.170	13.549	12.620	23.265	17.320	14.530	-37,55%
	%	2,29	1,81	1,74	1,69	2,95	2,26	1,91	
Jasa Perusahaan	Jumlah	6.828	7.930	8.555	7.770	8.611	10.000	8.140	-5,47%
	%	0,90	1,09	1,11	1,04	1,09	1,31	1,07	
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Jumlah	47.857	40.360	48.697	46.430	54.584	47.570	45.830	-16,04%
	%	6,33	5,52	6,29	6,19	6,94	6,21	6,01	
Jasa Pendidikan	Jumlah	40.387	37.190	32.580	40.980	39.555	35.320	37.450	-5,32%
	%	5,34	5,09	4,21	5,46	5,03	4,61	4,91	
Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	Jumlah	15.484	16.270	18.397	14.370	9.387	13.820	7.550	-19,57%
	%	2,05	2,23	2,38	1,92	1,19	1,80	0,99	
Jasa Lainnya	Jumlah	33.070	27.570	27.017	27.860	26.007	30.690	27.950	7,47%
	%	4,38	3,77	3,49	3,72	3,30	4,01	3,66	
Total	**Jumlah**	**755.814**	**730.970**	**774.011**	**749.820**	**787.140**	**766.090**	**762.980**	**-3,07%**
	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Februari 2025 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa sebesar 28,09% atau sebanyak 214.350 orang dari total 762.980 tenaga kerja (Grafik 6.2). Sementara itu, pangsa tenaga kerja terkecil menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Feb 2022-Feb 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	AGS 2024	FEB 2025	*GROWTH FEB 24 - FEB 25 (%)*
Formal	Jml	373.676	368.190	388.454	366.890	378.149	374.330	362.060	-4,25
	%	49,44	50,37	50,18	48,93	48,04	48,86	47,45	-1,23
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jml	37.195	43.140	48.478	37.100	45.627	34.920	43.120	-5,49
	%	4,92	5,90	6,26	4,95	5,80	4,56	5,65	-2,59
Buruh Karyawan	Jml	336.481	325.050	339.976	32.979	332.522	339.400	318.950	-4,08
	%	44,52	44,47	43,92	43,98	42,24	44,30	41,80	-1,04
Informal	Total	382.138	362.790	385.557	382.930	408.991	391.760	400.920	-1,97
	%	50,56	49,63	49,82	51,07	51,96	51,14	52,55	1,14
Berusaha sendiri	Jml	197.443	206.870	219.092	218.630	220.280	210.040	190.900	-13,34
	%	26,12	28,30	28,31	29,16	27,99	27,42	25,02	-10,61
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jml	84.597	63.210	59.450	60.290	60.411	68.910	87.330	44,56
	%	11,19	8,65	7,68	8,04	7,67	9,00	11,45	49,28
Pekerja bebas	Jml	40.824	33.200	34.401	38.990	42.090	36.870	42.410	0,76
	%	5,40	4,54	4,45	5,20	5,35	4,81	5,56	3,93
Pekerja tak dibayar	Jml	59.274	59.520	72.614	65.010	86.210	75.950	80.270	-6,89
	%	7,84	8,14	9,38	8,67	10,95	9,91	10,52	-3,93
Jumlah total	Jml	755.814	730.972	774.011	749.820	787.140	766.080	762.980	-3,07

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.4 Perbandingan NTP Berdasarkan Subsektor, 2022–2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUB SEKTOR	2022				2023				2024				2025	*GROWTH*(%)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	YOY	QTQ
Umum	136,93	127,31	116,82	123,28	122,95	115,77	115,79	118,83	124,80	131,18	137,69	141,53	152,83	22,46	7,98
Tanaman Pangan	96,95	94,90	94,05	91,52	90,79	93,17	94,98	99,25	101,33	100,97	101,70	100,54	100,43	-0,89	-0,10
Hortikultura	110,74	117,07	121,42	112,43	105,12	103,91	105,45	116,60	115,47	111,18	106,73	99,07	108,89	-5,70	9,92
Perkebunan Rakyat	144,02	131,41	118,26	127,54	127,86	118,42	118,04	121,27	128,61	137,35	145,87	151,65	164,92	28,24	8,75
Peternakan	111,92	115,78	108,66	106,60	104,60	107,36	106,32	106,41	109,90	110,12	110,01	111,11	115,06	4,69	3,55
Perikanan	115,55	113,04	110,65	109,75	109,42	111,00	113,19	109,30	110,57	108,44	109,68	107,57	108,92	-1,49	1,25

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Februari 2025 adalah LU *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi yaitu sebesar 0,11% atau sebanyak 850 tenaga kerja.

Distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Februari 2025 terdiri dari sektor formal dan informal dengan pangsa yang relatif sama. Jumlah tenaga kerja formal mencapai 362.060 orang atau mencapai 47,45% dari total pekerja. Sementara itu, jumlah tenaga kerja informal mencapai 400.920 orang atau mencapai 52,25% dari total pekerja (Tabel 6.3).

6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN PETANI

Kondisi kesejahteraan petani pada triwulan I 2025[11] **meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik dari 124,80 pada triwulan I 2024 menjadi 152,83 pada triwulan I 2025.** Peningkatan ini merupakan pengaruh dari peningkatan NTP pada sub sektor perkebunan rakyat dan peternakan. NTP subsektor perkebunan rakyat meningkat dari 128,61 pada triwulan I 2024 menjadi sebesar 164,92 pada triwulan I 2025. Kenaikan NTP yang cukup tinggi pada sub sektor ini didorong oleh tren peningkatan harga jual Tandan Buah Segar (TBS). Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rerata harga jual TBS sebesar Rp3.408 pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan I 2024 sebesar Rp2.420. Sementara pada sub sektor peternakan, peternakan komoditas ayam ras pedaging yang menjadi penyumbang terbesar komoditas terbesar dalam peningkatan NTP. Nilai NTP sub sektor peternakan pada triwulan I 2024 sebesar 109,90, naik menjadi 115,06 pada triwulan I 2025.

11 Merupakan angka rata-rata bulan Januari – Maret 2025

Di sisi lain, NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perikanan menurun pada periode laporan. Pada triwulan I 2025 NTP sub sektor tanaman pangan sebesar 100,43, lebih rendah dibandingkan NTP pada triwulan I 2024 sebesar 101,33. Faktor pendorong penurunan NTP tersebut yaitu adanya kenaikan indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal. Penurunan NTP juga terjadi pada sub sektor tanaman hortikultura seiring dengan deflasi (yoy) yang terjadi pada mayoritas komoditas sayuran seperti bayam, kol putih, sawi hijau, sawi putih, ketimun dan cabai. NTP hortikultura turun dari 115,47 pada triwulan I 2024 menjadi 108,89 pada triwulan I 2025. Lebih lanjut, NTP subsektor perikanan mengalami penurunan dari 110,57 pada triwulan I 2024 menjadi 108,92 pada triwulan I 2025. Hal tersebut didukung oleh beberapa komoditas perikanan pada triwulan I 2025 yang tercatat deflasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), yakni ikan pari, ikan sungkur, ikap kakap merah, ikan tenggiri, ikan kerapu dan ikan lele.

INDEKS KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN

Pada triwulan I 2025, baik secara agregat maupun pada semua sub sektor nilai NTP berada pada nilai di atas 100. Kondisi tersebut mengindikasikan kelompok petani tersebut masih memiliki tingkat kemampuan/ daya beli yang baik karena indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayar petani.

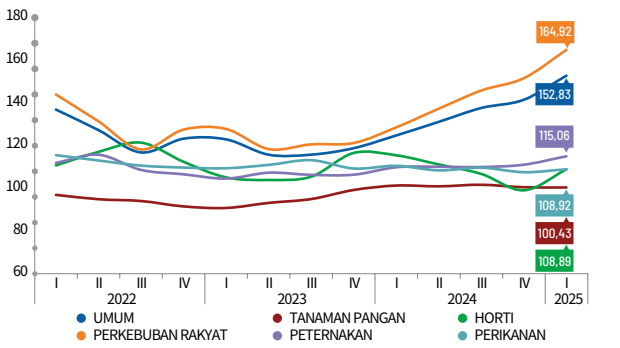

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani

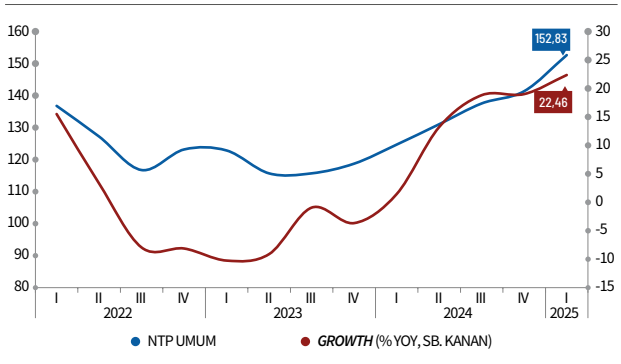

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.4 Nilai Tukar Petani dan *Growth*

Pada triwulan I tahun 2025, indeks konsumsi rumah tangga perdesaan mengalami inflasi sebesar 119,40. Mayoritas kelompok konsumsi rumah tangga mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi tercatat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,35% (yoy). Sementara, pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi tertinggi sebesar 20,75% (yoy).

6.3 INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN SURVEI KONSUMEN

Survei Konsumen (SK) di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat setidaknya ada 2 (dua) pengukuran yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Survei yang dilakukan secara bulanan tersebut melibatkan 200 responden setiap bulannya dari berbagai kalangan pendidikan dan profesi pekerjaan.

6.3.1 Indikator Ketersediaan Lapangan Kerja

Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilaksanakan Bank Indonesia pada triwulan I 2025, masyarakat menilai kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, perkiraan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan 6 bulan yang akan datang turut menurun dibandingkan periode triwulan I 2024.

Hasil Survei Konsumen di Kota Pangkalpinang pada triwulan I 2025 mencatat 31,00% responden menyatakan bahwa ketersediaan lapangan kerja pada periode laporan meningkat dibandingkan enam bulan yang lalu. Terdapat 55,50% responden menyatakan kondisi saat ini relatif sama dengan enam bulan yang lalu. Sementara itu, sebanyak 13,50% responden menyatakan ketersediaan kerja saat ini lebih sedikit dibandingkan enam bulan yang lalu. Dengan demikian, indeks saldo bersih ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu mencapai 117,50, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 127,33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu mengalami penurunan.

Pada triwulan I 2025, sebanyak 28,17% responden memperkirakan bahwa ketersediaan lapangan kerja akan lebih banyak dalam enam bulan mendatang.

Tabel 6.5 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Triwulanan, 2022-2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KELOMPOK	2022				2023				2024				2025	*GROWTH* (%QTQ)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Konsumsi RT	109,41	112,51	113,66	113,64	115,38	116,34	117,08	118,03	119,23	120,31	119,20	119,26	119,40	0,14
- Makanan, Minuman dan Tembakau	111,83	115,85	116,81	115,18	117,98	119,40	120,47	122,07	123,83	125,54	123,54	123,74	126,74	2,35
- Pakaian dan Alas Kaki	113,09	114,09	114,81	115,13	115,72	116,39	117,10	117,30	117,66	118,03	118,53	118,63	118,93	1,08
- Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	102,37	103,80	104,61	105,37	105,56	105,69	105,88	105,71	105,64	105,61	105,76	105,82	83,72	-20,75
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT	108,37	109,50	110,78	111,51	112,58	112,92	113,12	113,75	114,34	114,60	114,98	115,27	115,57	1,07
- Kesehatan	106,78	107,84	108,64	109,22	109,75	110,06	110,29	110,54	110,68	110,75	110,89	111,13	112,04	1,23
- Transportasi	107,21	110,41	113,95	120,79	120,33	120,45	120,50	120,59	120,96	121,08	120,97	120,01	120,46	-0,42
- Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,49	100,51	100,55	100,56	100,62	100,65	100,83	100,84	100,86	100,80	100,79	100,81	100,82	-0,04
- Rekreasi, Olahraga dan Budaya	108,23	109,09	110,45	110,75	111,38	111,55	112,47	112,27	112,29	112,30	112,83	112,79	113,08	0,70
- Pendidikan	102,61	102,61	102,88	103,02	103,02	103,02	103,06	103,25	103,34	103,36	103,48	103,65	103,71	0,36
- Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	101,65	103,19	104,13	105,18	105,43	105,99	106,41	106,66	107,54	107,68	108,14	108,42	108,72	1,10
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,54	109,51	110,64	111,65	113,02	113,83	114,44	114,62	114,98	115,88	116,07	116,34	117,39	2,10

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.6 Pendapat Konsumen Terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dan Enam Bulan YAD (2022-2024)

KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BULAN YANG LALU							PERKIRAAN KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 6 BULAN MENDATANG DIBANDING SAAT INI						
PERIODE		PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH	PERIODE		PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH
		LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH				LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH	
2022	I	32,67	33,33	34,00	100	98,67	2022	I	44,83	41,83	13,33	100	131,50
	II	37,67	33,50	28,83	100	108,83		II	42,83	48,33	8,83	100	134,00
	III	32,00	46,50	21,50	100	110,50		III	39,33	55,67	5,00	100	134,33
	IV	34,83	38,67	26,50	100	108,33		IV	40,83	52,67	6,50	100	134,33
2023	I	36,67	41,50	21,83	100	114,83	2023	I	37,67	57,67	4,67	100	133,00
	II	38,33	41,33	20,33	100	118,00		II	45,83	47,67	6,33	100	139,33
	III	45,17	40,67	14,17	100	131,00		III	47,67	48,17	4,17	100	143,50
	IV	48,50	42,00	9,50	100	139,00		IV	49,33	47,67	3,00	100	146,33
2023	I	40,17	47,00	12,83	100	127,33	2024	I	45,33	50,17	4,50	100	140,83
	II	35,83	45,67	18,50	100	117,33		II	40,00	55,50	4,50	100	135,50
	III	31,50	51,67	16,83	100	114,67		III	26,83	68,83	4,33	100	122,50
	IV	35,83	50,50	13,67	100	122,17		IV	28,83	66,17	5,00	100	123,83
2025	I	31,00	55,50	13,50	100	117,50	2025	I	28,17	66,83	5,00	100	123,17

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain itu, terdapat 66,83% responden lainnya memperkirakan kondisi saat ini relatif sama dengan enam bulan mendatang. Sementara itu, sebanyak 5% responden menyatakan ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang lebih sedikit dibandingkan saat ini. Dengan demikian, indeks saldo bersih perkiraan ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang dibandingkan saat ini mencapai 123,17, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 140,83. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat optimisme masyarakat mengalami penurunan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan 6 bulan mendatang.

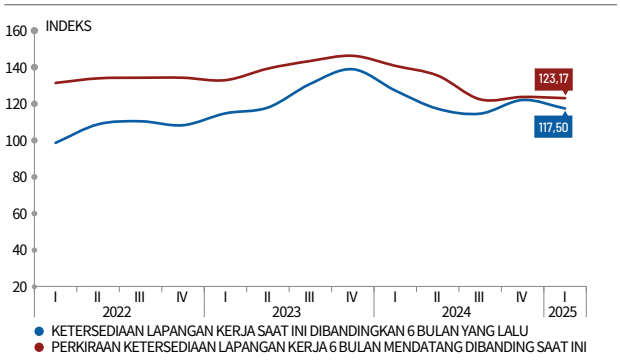

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

6.3.2 Indikator Penghasilan

Indeks penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan lalu sebesar 115,83 lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 122,33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun mengalami penurunan, masyarakat masih tetap optimis (indeks di atas 100) terhadap penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan lalu. Berdasarkan hasil survei pada triwulan I 2025, sebanyak 27,83% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka saat ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi

Tabel 6.7 Pendapat Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini dan Penghasilan Enam Bulan YAD (2022-2025)

PENGHASILAN SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BULAN YANG LALU							PERKIRAAN PENGHASILAN 6 BULAN MENDATANG DIBANDING SAAT INI						
PERIODE		PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH	PERIODE		PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH
		LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH				LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH	
2022	I	33,00	42,50	24,50	100	108,50	2022	I	42,83	51,50	5,67	100	137,17
	II	39,17	45,33	15,50	100	123,67		II	37,83	58,33	3,83	100	134,00
	III	29,33	51,83	18,83	100	110,50		III	38,67	59,33	2,00	100	136,67
	IV	30,00	50,83	19,17	100	110,83		IV	42,83	53,67	3,50	100	139,33
2023	I	29,33	51,67	19,00	100	110,33	2023	I	37,33	59,67	3,00	100	134,33
	II	39,13	48,17	12,70	100	126,43		II	41,80	56,20	2,00	100	139,80
	III	37,17	45,17	17,67	100	119,50		III	44,67	50,83	4,50	100	140,17
	IV	35,07	50,57	14,20	100	120,87		IV	45,17	50,33	4,50	100	140,67
2023	I	35,00	52,33	12,67	100	122,33	2024	I	39,33	58,00	2,67	100	136,67
	II	35,67	48,50	15,83	100	119,83		II	38,00	59,17	2,83	100	135,17
	III	29,00	58,33	12,67	100	116,33		III	30,67	67,83	1,50	100	129,17
	IV	25,50	62,67	11,83	100	113,67		IV	30,17	67,50	2,33	100	127,83
2025	I	27,83	60,17	12,00	100	115,83	2025	I	30,67	65,50	3,83	100	126,83

Sumber: Bank Indonesia, diolah

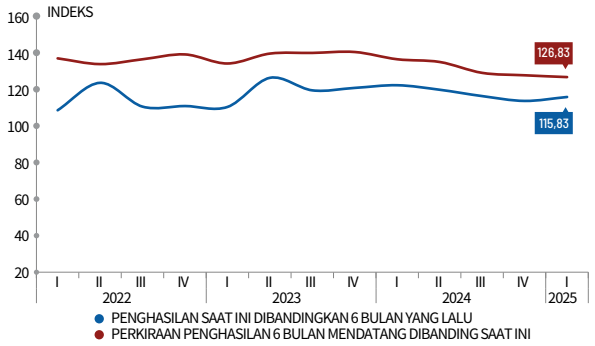

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.6 Indeks Penghasilan

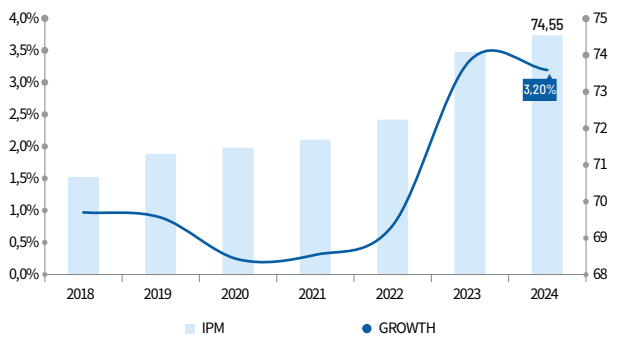

Sumber: BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung,diolah

Grafik 6.7 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

enam bulan sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 60,17% responden berpendapat penghasilan saat ini relatif sama dibandingkan enam bulan yang lalu.

Indeks perkiraan penghasilan enam bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 126,83, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 136,67. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat optimis (indeks di atas 100) penghasilan ke depan akan meningkat dibandingkan saat ini. Berdasarkan hasil survei, jumlah responden yang berpendapat bahwa penghasilan 6 bulan ke depan akan lebih baik sebesar 30,67% pada triwulan I 2025. Sebagian besar responden yakni sebanyak 65,50% berpendapat bahwa penghasilan enam bulan yang akan datang akan sama dengan saat ini.

6.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia[12] di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,91% (selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2024). Nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 74,55 pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar 0,62% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,09. Peningkatan IPM pada 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,12 tahun, meningkat 0,22 tahun atau lebih lama 2 bulan 19 hari dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,18 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,31 tahun menjadi 12,49 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,25 tahun menjadi 8,33 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 78 ribu rupiah (0,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas indikator-indikator dan meningkatnya standar hidup layak sebagai salah satu dimensi dasar yang menjadi indikator dan tolok ukur pertumbuhan IPM suatu daerah.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 74,55 masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 75,02 pada 2024. Akan tetapi, nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih lebih tinggi dari Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 74,36, 74,28, dan 73,87. Namun demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih rendah dari Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dengan IPM masing-masing sebesar 74,91, 74,92 dan 75,18.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2024 dapat terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Daerah dengan IPM tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dengan IPM sebesar 80,9 pada tahun 2024, tumbuh sebesar 0,56% dibandingkan tahun 2023. Status pembangunan manusia di Kota

12 Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice), yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUB SEKTOR	PERIODE/TAHUN							G (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Bangka	71,8	72,39	72,4	72,46	72,95	74,34	74,66	0,43%
Belitung	71,7	72,46	72,51	72,57	73,38	74,49	74,96	0,63%
Bangka Barat	68,68	69,05	69,08	69,6	70,12	71,13	71,36	0,32%
Bangka Tengah	69,52	70,33	70,45	70,89	71,4	72,36	72,54	0,25%
Bangka Selatan	65,98	66,54	66,9	67,06	67,95	69,67	70,01	0,49%
Belitung Timur	70,22	70,84	70,92	71,42	72,29	73,31	73,62	0,42%
Pangkalpinang	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24	80,45	80,90	0,56%
Provinsi	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24	74,09	74,55	0,62%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Pangkalpinang adalah “sangat tinggi”, sementara Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM kategori “tinggi”. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari kategori ”sedang” menjadi ”tinggi”.

Kabupaten Bangka dengan indeks sebesar 74,66 tumbuh sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2023, Kabupaten Belitung dengan indeks sebesar 74,96 tumbuh sebesar 0,63% dibandingkan tahun 2023, dan Kabupaten Bangka Barat dengan indeks sebesar 71,36 tumbuh sebesar 0,32% dibanding tahun 2023. Selanjutnya, Kabupaten Bangka Tengah dengan indeks sebesar 72,54 tumbuh sebesar 0,25% dibandingkan tahun 2023, Kabupaten Bangka Selatan dengan indeks sebesar 70,01 tumbuh sebesar 0,49% dibandingkan tahun 2023, dan Kabupaten Belitung Timur dengan indeks sebesar 73,62 tumbuh sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2023.

6.5 TINGKAT KEMISKINAN

Secara nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah ke-5 pada September 2024. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ialah melalui tingkat kemiskinan[13]. Persentase penduduk miskin[14] di Bangka Belitung pada September 2024 sebesar 5,08%, mengalami peningkatan

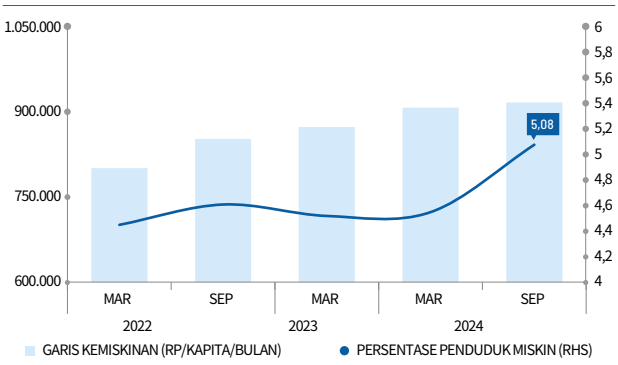

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

0,53% dibandingkan periode Maret 2024 sebesar 4,55%. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di BProvinsi Kepulauan Bangka Belitung periode September 2024 sebesar 78,58 ribu orang, meningkat 8,63 ribu orang dibandingkan periode Maret 2024 sebesar 69,95 ribu orang. Kondisi ini sejalan dengan tren penurunan pendapatan masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergolong rendah pada tahun 2024 dampak adanya gangguan pada lapangan usaha utama yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dibandingkan rerata nasional yang mencapai 8,57%. Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menduduki tingkat kemiskinan terendah ke-5 nasional setelah Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.

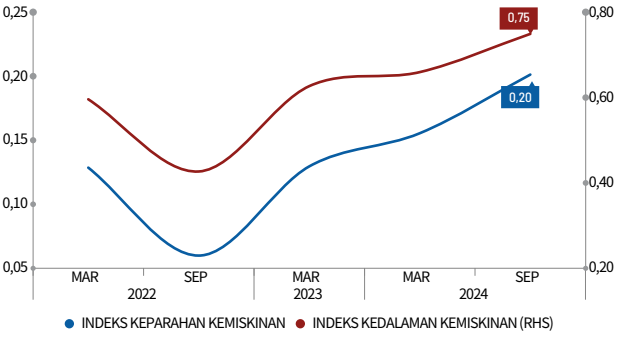

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.9 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

13 Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita. Berdasarkan pendekatan ini, dapat dihitung jumlah penduduk yang hidup di bawah GK (Garis Kemiskinan) yang dinyatakan sebagai penduduk miskin.

14 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dengan peranan GKM dalam menentukan besaran GK lebih besar dibanding peranan GKBM (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

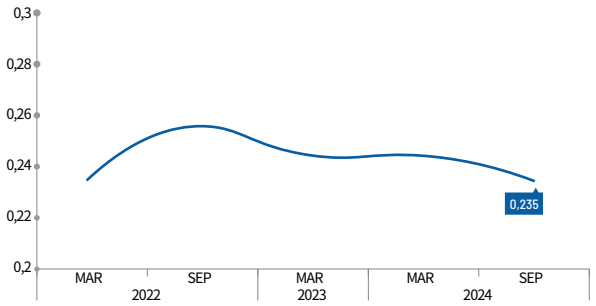

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.10 Perkembangan Gini Ratio

Garis kemiskinan per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp917.673,-/kapita/bulan pada September 2024. Garis kemiskinan tersebut merupakan yang kedua tertinggi secara nasional setelah Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, rata-rata garis kemiskinan nasional hanya sebesar Rp582.932,-. Sejalan dengan itu, Bangka Belitung juga tercatat memiliki *gini ratio* terendah se Indonesia yaitu sebesar 0,235 pada September 2024. Hal tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup rendah. Garis kemiskinan naik 1,02% dari Rp908.397,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2024 menjadi Rp917.673,- per kapita per bulan pada bulan September 2024. Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari sebesar 0,66 pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,75 pada September 2024. Sementara itu, nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,16 pada Maret 2024, meningkat menjadi 0,20 pada Maret 2024.

Jika dilihat dari wilayahnya, nilai indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Hal tersebut disebabkan lebih tingginya harga bahan pokok di perdesaan dibandingkan perkotaan terutama disebabkan oleh biaya distribusi harga bahan pokok dari perkotaan (distributor besar) menuju perdesaan (pasar tradisional, warung).

Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan sebesar 1,12, sementara di daerah perkotaan sebesar 0,49 pada September 2024. Hal ini lebih tinggi dari indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,93 di wilayah pedesaan dan 0,47 di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin daerah perdesaan lebih menjauhi/lebih dalam jika diukur dari garis kemiskinan dibandingkan daerah perkotaan. Demikian juga dengan nilai indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi di daerah perdesaan sebesar 0,38, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 0,08 pada September 2024.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode September 2024 baik di perkotaan maupun di perdesaan. Komoditas makanan menyumbang 72,00% pada garis kemiskinan di perkotaan, sementara itu di perdesaan komoditas makanan menyumbang 74,44% pada garis kemiskinan. Beras dan Sigaret Kretek Mesin menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan pada jenis komoditas makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sisi lain, komoditas bukan makanan menyumbang 28,00% terhadap garis kemiskinan di perkotaan, sementara di perdesaan komoditas bukan makanan menyumbang 25,56% terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode September 2024. Perumahan menjadi penyumbang terbesar komoditas bukan makanan terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 6.9 Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Kep Bangka Belitung September 2024

JENIS KOMODITI	PERKOTAAN	JENIS KOMODITI	PEDESAAN
Makanan	**72,00**	**Makanan**	**74,44**
Beras	17,86	Beras	20,23
Rokok Kretek Filter	12,54	Rokok Kretek Filter	13,51
Daging ayam ras	5,29	Daging ayam ras	6,23
Telur ayam ras	4,16	Telur ayam ras	3,18
Kue Basah	3,02	Mie instan	3,05
Mie instan	2,82	Kue basah	2,53
Tongkol/tuna/cakalang	2,74	Susu bubuk	2,43
Kembung	1,85	Cabe rawit	2,39
Cabe rawit	1,83	Bawang merah	1,78
Gula pasir	1,81	Gula pasir	1,63
Kopi bubuk & kopi instan (\sachet)	1,73	Kopi bubuk & kopi instan (\sachet)	1,57
Cabe merah	1,54	Tongkol/tuna/cakalang	1,39
Lainnya	14,83	Lainnya	14,52
Bukan Makanan:	**28,00**	**Bukan Makanan:**	**25,56**
Perumahan	8,58	Perumahan	9,65
Bensin	4,56	Bensin	3,82
Listrik	4,29	Listrik	2,57
Pendidikan	2,19	Kesehatan	1,50
Perlengkapan mandi	1,21	Perlengkapan mandi	1,11
Pakaian jadi anak-anak	0,74	Pendidikan	0,95
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,73	Pakaian jadi anak-anak	0,81
Lainnya	5,69	Lainnya	5,16

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Foto : Vihara Dewi Kwan Im, Belitung

BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan akan membaik secara bertahap, pasca dinamika komoditas unggulan timah pada tahun sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian diprakirakan ditopang oleh LU utama, antara lain LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diprakirakan berasal dari komponen Ekspor Barang dan Jasa, serta kuatnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy).

Dari sisi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 direvisi lebih rendah menjadi sebesar 2,8% (yoy)[12]**.** Pada *World Economic Outlook* (WEO) periode April 2025, *International Monetary Fund* (IMF) merevisi angka pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 cukup dalam, dari sebelumnya sebesar 3,3% (yoy) pada WEO periode Januari 2025. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diprakirakan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,3% (yoy) (Tabel 7.1). Cukup dalamnya revisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global utamanya dipengaruhi semakin tingginya kompleksitas dan ketidakpastian global. Rangkaian kebijakan tarif oleh Amerika Serikat sejak awal tahun 2025, yang kemudian mencapai puncaknya pada *Liberation Day* 2 April 2025, serta tindakan balasan oleh mitra dagang menjadi *shock* besar bagi perekonomian global dan mengakibatkan terjadinya ketegangan perdagangan.

***Downside risk* terhadap prospek perekonomian global terus meningkat.** Eskalasi perang dagang dan tingginya ketidakpastian kebijakan berisiko menekan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka pendek dan panjang, serta mengurangi ketahanan ekonomi terhadap berbagai *shocks* atau guncangan lanjutan yang berisiko muncul. Ketidakstabilan nilai tukar, tekanan utang, dan berkurangnya bantuan pembangunan dapat memperburuk kondisi berbagai negara, utamanya negara dengan kategori pendapatan rendah (*low-income countries*). Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama internasional untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil, mendorong restrukturisasi utang, dan memperkuat ketahanan domestik melalui reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Kejelasan kebijakan dan koordinasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan prospek pertumbuhan jangka menengah.

Dari sisi perkembangan harga, rata-rata inflasi global diprakirakan terus menurun. Pada *World Economic Outlook* (WEO) IMF April 2025, inflasi global pada tahun 2025 diprakirakan turun menjadi 4,3% (yoy) dari sebelumnya 5,8% (yoy) pada tahun 2024. Meksipun demikian, proyeksi inflasi global pada WEO April 2025 revisi bias atas dari proyeksi WEO Januari 2025

Tabel 7.1 *Outlook* Perekonomian Global

NEGARA	2023	2024*	2025*	2026**
Dunia	3,3	3,3	2,8	3,0
Advanced Economies	**1,7**	**1,8**	**1,4**	**1,5**
Amerika Serikat	2,9	2,8	1,8	1,7
Inggris	0,3	1,1	1,1	1,4
Jepang	1,5	0,1	0,6	0,6
Kawasan Eropa	0,4	0,9	0,8	1,2
Emerging Market and Developing Economies	4,4	4,3	3,7	3,9
Tiongkok	5,2	5,0	4,0	4,0
India	8,2	6,5	6,2	6,3

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF April 2025; *)estimasi **)proyeksi, %yoy

akibat meningkatnya perkembangan ketidakpastian perdagangan global. Pada tahun 2026, rata-rata inflasi global diproyeksikan kembali turun mencapai 3,6% (yoy), di tengah negara-negara maju (*advanced economies*) yang melakukan revisi ke atas, sedangkan negara-negara berkembang (*emerging market* dan *developing economies*) melakukan revisi ke bawah. Hal ini sejalan dengan perkiraan IMF pada Januari 2025, bahwa negara-negara maju akan kembali lebih cepat untuk mencapai inflasi dalam rentang sasarannya dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Namun, dari sisi harga, inflasi cenderung masih tetap tinggi di banyak negara jika dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Secara khusus, dampak tarif resiprokal AS mulai diberlakukan pada awal April 2025 juga turut berdampak kepada prakiraan dari negara-negara akibat ketidakpastian yang meningkat pada perdagangan, tergantung bagaimana pemberlakuan tarif akan dianggap sementara atau permanen, sejauh mana perusahaan perlu menyesuaikan margin untuk mengimbangi peningkatan biaya impor, serta mata uang penagihan tarif tersebut dalam dolar AS atau mata uang lokal. Ketidakpastian perdagangan tersebut akan menambah *shock* dari sisi permintaan dan pasokan sehingga dapat berdampak pada penundaan investasi dan *spending*, yang juga berpengaruh pada peningkatan volatilitas nilai tukar mata uang.

Kinerja perekonomian Indonesia masih tetap terjaga ditengah ketidakpastian global yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 4,87% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi

12 World Economic Outlook (WEO) IMF April 2025

domestik dan kinerja ekspor. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja perekonomian nasional pada triwulan I 2025 dipengaruhi LU Industri Pengolahan; LU Perdagangan; serta LU Transportasi dan Pergudangan. Hal ini didukung oleh permintaan domestik pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri, yang diikuti peningkatan permintaan eksternal. LU Pertanian turut mencatatkan pertumbuhan yang positif, didukung oleh berlangsungnya panen raya komoditas padi dan jagung. Adapun secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 secara tahunan (*year-on-year*) tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), diikuti wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Bali Nusa Tenggara.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian triwulan I 2025 ditopang oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4,89% (yoy). Capaian tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat selama periode HBKN Imlek dan Idulfitri. Adapun komponen Investasi tumbuh sebesar 2,12% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tumbuh positif. Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 1,38% (yoy), sejalan dengan normalisasi belanja Pemerintah dibandingkan dengan belanja triwulan I 2024 yang tercatat tinggi untuk pelaksanaan Pemilu. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh positif sebesar 3,07% (yoy). Sementara itu, komponen Ekspor tumbuh sebesar 6,78% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama, serta ekspor jasa yang tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara.

Dengan berbagai perkembangan terkini, kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran 4,7% – 5,5% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perkiraan dampak langsung kebijakan tarif Amerika Serikat yang menurunkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Selain itu, pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat turut akan memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia, seiring dengan akan penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama Tiongkok. Sehubungan dengan berbagai risiko tersebut, berbagai kebijakan perlu diperkuat guna memitigasi dampak dari menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dengan mendorong permintaan domestik dan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia senantiasa mempererat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dukungan penuh terhadap implementasi berbagai program Pemerintah dalam Asta Cita.

Inflasi domestik diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Berdasarkan perkembangan terkini, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2025 tercatat 1,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan inflasi April 2025 didorong utamanya oleh kelompok inti (*core inflation*) sebesar 2,50% (yoy), meningkat dibandingkan bulan Maret 2025. Peningkatan realisasi kelompok inti dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar dan harga emas global yang masih lebih tinggi, dampak mulai berlakunya tarif resiprokal AS pada awal April 2025. Sementara itu, inflasi juga didorong kelompok *Administered Price* (AP) sebesar 1,25% (yoy), lebih tinggi dari bulan Maret 2025 didorong dengan berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik 50% oleh PLN untuk pelanggan dengan daya dibawah 2.200 VA. Laju inflasi pada kelompok AP sedikit tertahan dampak adanya kebijakan diskon tarif angkutan udara sebesar 14% pada perayaan HBKN Idulfitri untuk periode penerbangan hingga 7 April 2025. Selanjutnya, kelompok *volatile food juga* mengalami inflasi sebesar 0,64% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dampak peningkatan permintaan masyarakat dalam rangka HBKN Idulfitri dan Ceng Beng pada awal April 2025. Selanjutnya dari sisi spasial, inflasi IHK tahunan pada April 2025 meningkat di semua wilayah dibandingkan bulan sebelumnya namun tetap terjaga. Capaian inflasi tersebut sebagai hasil dari upaya pengendalian inflasi melalui konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2025.

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan tumbuh menguat, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan berada pada kisaran 2,3% – 3,1% (yoy). Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan akan membaik secara bertahap, pasca mengalami perlambatan akibat dinamika komoditas unggulan timah yang terjadi pada tahun 2024. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 utamanya akan ditopang oleh LU utama antara lain LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diprakirakan utamanya berasal dari komponen Ekspor Barang dan Jasa, serta Konsumsi Rumah Tangga.

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini utamanya bersumber dari komoditas unggulan timah seiring dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mulai tahun 2024. Melalui aturan ini, persetujuan RKAB mineral dan batu bara (minerba), termasuk timah akan diberikan untuk per 3 tahun, dari sebelumnya yang harus diajukan setiap tahun. Implementasi aturan tersebut memberikan prospek positif dan kepastian hukum bagi para perusahaan timah, sehingga akan segera dapat memulai kegiatan produksi maupun ekspor timah pada periode awal tahun. Sebelumnya secara historis, kegiatan produksi maupun ekspor timah cenderung akan mengalami perlambatan pada periode awal tahun seiring dengan masih berlangsungnya proses administrasi persetujuan RKAB. Dengan demikian, dengan sudah diperolehnya persetujuan RKAB untuk 3 tahun kedepan (2024 – 2026), diharapkan dapat mendorong kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2025.

LU Pertambangan dan Penggalian pada sepanjang tahun 2025 diprakirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2024. Sebagaimana sejalan dengan LU Industri Pengolahan, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian ditopang oleh komoditas bijih timah. Kepastian aktivitas ekspor timah yang sudah dapat dimulai sejak awal tahun 2025 diprakirakan akan mendorong tingginya permintaan terhadap bijih timah, dan mendukung kinerja LU Pertambangan dan Penggalian lebih lanjut.

Selanjutnya, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diprakirakan tetap tumbuh positif. Capaian tersebut didorong oleh peningkatan produksi komoditas perikanan. Hal ini didukung oleh baiknya prospek iklim dan cuaca, dimana berdasarkan Analisis ENSO *(El Nino Southern Oscillation)* BMKG, diprediksi bahwa indeks ENSO di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada rentang netral sampai dengan semester kedua tahun 2025. Selain itu, komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit juga berpotensi melanjutkan pertumbuhan positif. Sejalan dengan baiknya keadaan iklim serta cuaca, implementasi program Biodiesel 40 (B40) menjadi salah satu faktor positif pendorong kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2025.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga diprakirakan tetap kuat menopang perekonomian seiring dengan perbaikan kinerja komoditas utama logam timah, yang berpotensi mendorong pemulihan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikasi mulai membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat sebagaimana tecermin pada data Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada triwulan I 2025, DPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Lokasi Bank tumbuh 12,68% (yoy), mencatatkan pertumbuhan tertinggi setelah sebelumnya pada Januari – November 2024 selalu mengalami pertumbuhan negatif. Dari sisi komponen Tabungan, turut tumbuh sebesar 12,86% (yoy), tertinggi setelah mengalami kontraksi pada Januari – September 2024. Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,5% (yoy) diharapkan turut mendorong daya beli masyarakat lebih lanjut.

Kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa diprakirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Capaian yang baik ini utamanya dipengaruhi oleh ekspor

logam timah, yang didukung kepastian produksi dan ekspor timah oleh smelter sejak periode awal tahun. Hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2023, dimana RKAB telah dapat diperoleh untuk 3 tahun (2024 – 2026). Prospek yang cukup positif juga berasal dari pasar global, dimana permintaan timah dari negara-negara tujuan ekspor utama diprakirakan tetap solid, sejalan dengan tren global atas penggunaan *electric vehicle*, *green sector energy,* maupun semikonduktor untuk barang elektronik. Meski demikian, tingginya ketidakpastian global dan berlanjutnya eskalasi perang dagang, berisiko menahan kinerja harga timah lebih lanjut.

Sementara itu, pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan PMTB diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko ini dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, untuk menjaga ketersediaan anggaran daerah, Pemerintah melakukan *tagging* rekening belanja tertentu, serta melakukan efisiensi belanja modal yang dinilai belum prioritas.

Meski demikian, penurunan Konsumsi Pemerintah berpotensi tertahan oleh kenaikan royalti komoditas pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk timah. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta PP Nomor 18 Tahun 2025 yang merevisi ketentuan perpajakan dan/atau PNBP pada usaha pertambangan batu bara dalam PP Nomor 15 Tahun 2022, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif royalti terhadap sejumlah komoditas pertambangan mineral dan batu bara strategis yang akan berlaku efektif mulai 26 April 2025. Adapun untuk komoditas timah, tarif royalti yang sebelumnya bersifat tunggal atau *flat* sebesar 3%, disesuaikan menjadi tarif progresif antara 3 hingga 10% berdasarkan perkembangan harga pasar. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, untuk selanjutnya akan dibagi ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH), sehingga dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meskipun perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh semakin kuat dengan prospek yang optimis, Pemerintah Daerah bersama seluruh mitra strategis serta segenap lapisan masyarakat tetap dituntut untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Ke depan, perekonomian masih berpotensi menghadapi berbagai tantangan dan risiko, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global serta semakin kompleksnya ketidakpastian global akibat perang dagang, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perlambatan volume perdagangan internasional. Hal tersebut, yang pada akhirnya dikhawatirkan berisiko memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor komoditas strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, dari sisi internal, kondisi tata kelola dan tata niaga komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hingga tahun 2025 masih belum sepenuhnya pulih, ditambah dengan kecenderungan menurunnya kapasitas fiskal daerah, menjadi faktor risiko tambahan yang dapat semakin membebani dan memberikan tekanan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.2 PROSPEK INFLASI TAHUN 2025

Berdasarkan perkembangan indikator perekonomian terkini, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sehingga berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Prakiraan capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat seiring normalisasi kondisi perekonomian masyarakat pasca mengalami perlambatan akibat ketidakpastian sektor unggulan logam dasar timah pada 2024. Dari sisi permintaan, secara global permintaan terhadap logam timah diprakirakan tetap kuat, terutama dari sektor industri semi-konduktor dan transisi energi. Selain itu, permintaan domestik juga diprakirakan akan tetap tumbuh dari sektor industri pengolahan silika. Risiko inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diprakirakan utamanya bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; serta kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran. Dalam mengantisipasi risiko tekanan inflasi tersebut, kerjasama TPID dan Satgas Pangan perlu untuk terus diperkuat melalui strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Berlanjutnya tren peningkatan harga emas global terus mendorong risiko inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada April 2025, harga emas global tercatat 3.152,11 USD per oz, atau tumbuh 35,04% (yoy) dibandingkan periode April 2024. Tren peningkatan emas global terjadi karena peningkatan permintaan emas sebagai *safe haven asset* ditengah ketidakpastian global yang terus meningkat seiring dengan faktor ketidakpastian geopolitik, salah satunya pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal AS yang mulai berlaku pada awal April 2025.

Selanjutnya, risiko kelompok makanan, minuman, dan tembakau, utamanya berasal dari komoditas horti-pangan. Berdasarkan prediksi BMKG[13], sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan dengan curah hujan berada di kriteria rendah – menengah hingga Mei 2025. Sementara, beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi masih berisiko mengalami curah hujan tinggi. Selanjutnya, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Kemarau di wilayah Bangka Belitung diprakirakan akan dimulai pada bulan Juni dan akan memasuki puncaknya pada Agustus 2025. Kondisi cuaca yang kering dan suhu yang tinggi dapat meningkatkan risiko komoditas horti-pangan seperti bawang merah dan cabai merah mengalami gangguan penyakit seperti virus dan jamur.

Seiring dengan peningkatan harga beras nasional di tahun 2024, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Juni 2024 dan tidak terdapat perubahan di 2025. Rincian HET untuk beras medium di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp13.100/kg (sebelumnya Rp11.500/kg), sementara itu beras premium sebesar Rp15.400/kg (sebelumnya Rp14.400/kg). Di sisi lain, pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 15 Januari 2025. Melalui surat tersebut, HPP gabah kering panen (GKP) di petani dipatok menjadi Rp6.500 per kilogram, HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan menjadi Rp8.000 per kilogram, dan HPP gabah kering giling (GKG) di Bulos sebesar Rp8.200 per kilogram, serta HPP beras di Bulog sebesar Rp12.000 per kilogram. Kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu cara meningkatkan penyerapan GKG oleh Bulog. Selanjutnya, berdasarkan data dari Bulog Bangka, pada bulan April 2025 telah berhasil melakukan penyerapan GKP sebanyak 1.033,44 ton atau setara dengan 551,65 ton beras. Demikian pula dengan komoditas cabai merah, di mana jika diamati berdasarkan pola historis tahunan, produksi cabai merah masih sangat tergantung musim yang hanya akan meningkat ketika sedang dalam masa panen. Seiring dengan kondisi tersebut, harga cabai merah cenderung meningkat di luar masa panen.

Risiko inflasi komoditas pangan lainnya pada tahun 2025 turut bersumber dari komoditas gula seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor gula konsumsi, sehingga berpotensi kembali terjadi relaksasi harga acuan pembelian (HAP) gula pasir di tingkat konsumen, yang sebelumnya telah direlaksasi pada April 2024 sebesar Rp17.500 per kg. Namun demikian, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 12 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 200.000 ton gula mentah sebagai upaya untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025. Selain itu, risiko peningkatan harga komoditas minyak goreng juga masih berlangsung sejalan dengan peningkatan harga CPO global yang tumbuh hingga 28% (yoy) pada Januari 2025, seiring peningkatan HET Minyakita menjadi Rp15.700 per liter sejak Agustus 2024.

Selain komoditas pangan, risiko inflasi bersumber dari rokok dan bahan bakar minyak (bensin). Laju inflasi rokok didorong oleh penyesuaian harga jual eceran (HJE) rokok yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Harga jual eceran rokok yang mengalami penyesuaian antara lain adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I minimal Rp2.375/batang dan Golongan II minimal Rp1.485/batang, Sigaret Putih Mesin (SPM) Golongan I minimal Rp2.495/batang dan Golongan II minimal

13 Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian I Februari 2025

Rp1.565/batang, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT) minimal Rp1.555/batang. Penyesuaian HJE ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan melindungi industri tembakau padat karya, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Sementara itu, laju inflasi komoditas pangan berpotensi ditahan oleh penurunan harga pada bahan bakar bensin. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan harga BBM Non-Subsidi selama dua bulan berturut-turut yaitu April dan Mei 2025, meliputi produk BBM jenis *gasoline* yaitu Pertamax dan Pertamax Turbo, serta produk *gasoil* yaitu Pertamina Dex dan Dexlite.

Dari sisi kelompok transportasi, laju inflasi berisiko akan terdorong pada momentum libur panjang hari besar keagamaan yang bertepatan dengan *long weekend* dan cuti bersama pada triwulan II 2025 seperti HBKN Waisak dan Kenaikan Yesus Kristus (Mei 2025) serta Idul Adha (Juni 2025) yang berpotensi meningkatkan harga tiket angkutan udara akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan terbatasnya jumlah penerbangan dari/ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan seluruh TPID Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil melalui pelaksanaan program unggulan GNPIP dengan memperhatikan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

7.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

   Berdasarkan data historis, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya bergantung kepada sektor logam dasar timah. Di sisi lain, sektor logam dasar timah sangat dinamis, sehingga sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan. Untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sektor logam dasar timah yang cukup dinamis, perlu dilakukan percepatan diversifikasi ekonomi produktif yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui:

   a) **Pengembangan industrialisasi dan hilirisasi komoditas strategis unggulan lokal** untuk memberikan nilai tambah dan *multiplier* yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan industrialisasi dan hilirisasi perlu difokuskan secara menyeluruh pada komoditas pertanian, perkebunan khususnya kelapa sawit, lada dan karet, komoditas hasil laut dan perikanan, serta mineral potensial (timah).

   b) **Optimalisasi peluang ekspor komoditas unggulan non-timah melalui Ekonomi Kreatif dan UMKM** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lebih dari 80% ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh timah. Untuk itu, diversifikasi ekspor diperlukan untuk mengurangi risiko ekonomi. Optimalisasi komoditas ekspor potensial non-timah seperti CPO, karet, lada, dan produk perikanan (termasuk cumi-cumi dan udang vaname) diperlukan dalam jangka panjang. Penguatan ekspor juga ditujukan untuk produk UMKM potensial seperti produk olahan ikan khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (getas, keritcu) dan kerajinan (batik cual, tenun, dan kerajinan kriya).

   c) **Prioritisasi sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan baru yang berkelanjutan**, utamanya di kawasan Pulau Belitung.

      - Promosi pariwisata berbasis event perlu diperkuat secara masif, strategis, dan berbasis data, dengan menyasar segmen wisatawan yang relevan. Fokus utama diarahkan pada destinasi unggulan seperti Geopark Belitung, yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark UNESCO, untuk memperkuat posisi Belitung di peta pariwisata nasional maupun global.

- Pengembangan destinasi harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai dan berkualitas, termasuk penambahan penerbangan langsung (*direct*) kelas premium dari dan ke Belitung, perluasan rute domestik dan internasional, serta penyediaan atraksi wisata yang otentik dan berstandar tinggi, seperti ekowisata, wisata sejarah, dan pengalaman budaya lokal yang terintegrasi dengan pelaku UMKM.

d) Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui Akses Pembiayaan dan Perluasan Pasar.

- Penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Bangka Belitung perlu diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan yang inklusif dan efisien, sekaligus memperluas cakupan pasar lokal dan ekspor. Optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR super mikro dan KUR klaster, menjadi strategi utama dalam mendorong kapasitas permodalan pelaku usaha kecil.
- Perluasan akses pasar dilakukan melalui promosi terpadu produk unggulan lokal, kemitraan dagang antar daerah, serta fasilitasi peningkatan daya saing ekspor. Pemanfaatan teknologi digital dan *e-commerce* juga perlu terus didorong agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

e) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Pilar Pertumbuhan Baru.

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, sejalan dengan arah nasional. Fokus pengembangan diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi bagian dari rantai nilai industri halal (*Halal Value Chain*/HVC), seperti makanan dan minuman halal khas daerah, produk kosmetik berbahan alami, fesyen muslim lokal, media dan konten Islami, serta pariwisata ramah muslim berbasis budaya dan ekowisata.
- Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan literasi dan kapasitas pelaku usaha terhadap standar halal, serta fasilitasi akses sertifikasi halal khususnya bagi pelaku UMKM, sejalan dengan arahan pemerintah yang mewajibkan berbagai kategori produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal khususnya bagi UMKM paling lambat hingga Oktober 2026. Selain itu, penguatan kelembagaan ekonomi syariah, seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, perlu menjadi bagian dari strategi inklusif membangun ekonomi umat di Bangka Belitung.

2. Reformasi Kebijakan dan Penciptaan Iklim Investasi yang Lebih Kondusif. Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong masuknya investasi baru, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah.

a) Pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak daerah dan penyederhanaan perizinan perlu dioptimalkan bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor-sektor prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pertanian berbasis komoditas lokal (lada, sawit, hortikultura), perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari dan ekowisata, serta manufaktur berbasis sumber daya lokal.

b) Membangun kemitraan strategis dengan BUMN, BUMDes, dan perusahaan swasta nasional maupun multinasional, guna membuka investasi di sektor-sektor bernilai tambah, seperti pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan, energi terbarukan, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.

c) Upaya reformasi yang telah dijalankan, seperti implementasi Sistem Perizinan Terpadu (OSS), simplifikasi regulasi, pemberian insentif kepada investor potensial, dan kemudahan pembebasan lahan, harus terus diperkuat. Selain itu, pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Pariwisata di Belitung, menjadi krusial untuk menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta maupun BUMN, serta membuka lapangan kerja berkualitas di tingkat lokal.

3. **Optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter**
   a) **Mendorong efektivitas dan percepatan realisasi belanja APBD serta penyaluran stimulus fiskal** yang tepat waktu dan sasaran, guna menguatkan daya beli masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pemerintah dapat menawarkan insentif fiskal kepada sektor pendorong ekonomi berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
   b) **Menguatkan fungsi intermediasi perbankan** melalui perluasan akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memfasilitasi *business matching* pembiayaan antara perbankan dan pelaku usaha. Di tengah peningkatan kualitas kredit oleh perbankan, upaya menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap menjadi fokus untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mendukung pembiayaan sektor riil yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
4. **Akselerasi Digitalisasi dan Inklusi Keuangan untuk Efisiensi dan Perluasan Ekonomi Lokal.** Seiring perkembangan ekonomi digital nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mempercepat adopsi teknologi digital di seluruh sektor ekonomi dan layanan publik, guna meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
   - Transformasi digital perlu dipercepat di berbagai sektor, melalui penguatan sistem pembayaran non-tunai (*cashless*), digitalisasi produk lokal UMKM, dan integrasi layanan publik berbasis digital, seperti pelayanan perizinan, bantuan sosial, dan layanan desa digital.
   - Pembangunan dan perluasan infrastruktur digital, khususnya akses internet di wilayah pesisir, pulau terluar, dan pedesaan terpencil, menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengakses layanan keuangan digital dan ikut serta dalam aktivitas ekonomi daring (*online*).
   - Percepatan pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di tingkat daerah, termasuk perluasan penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM, pasar tradisional, dan pariwisata lokal, harus terus didorong. Optimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi penting agar seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempertahankan status "Digital" dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dan meningkatkan efektivitas tata kelola fiskal digital.

B. PENGENDALIAN INFLASI

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong berbagai upaya pengendalian inflasi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah diperkuat dan ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan sinergi dan koordinasi semua pihak, serta memperkuat implementasi strategi 4K ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif, yang sesuai dengan langkah strategis hasil perumusan dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 31 Januari 2025 sebagai dasar peta jalan Pengendalian Inflasi Daerah (PID) tahun 2025-2027 yang masih dalam tahap penyusunan.

1. **Keterjangkauan Harga**
   a) Memperkuat efektivitas operasi pasar murah/ gerakan pangan murah/program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dan distributor untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan utama, seperti beras dan minyak goreng. Operasi pasar harus dilaksanakan secara intensif dan *targeted* untuk mencegah terjadinya gejolak harga komoditas, terutama mendekati HBKN.
   b) Penguatan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) khususnya untuk komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir.
   c) Memberikan sanksi tegas terhadap praktik penimbunan barang dan pembatasan pembelian bahan makanan pokok tertentu.
2. **Ketersediaan Pasokan**
   a) Memperluas dan meningkatkan kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan

pangan, baik intra maupun antarprovinsi. Selain itu, perlu untuk meninjau kembali kerjasama antar daerah yang telah tertuang dalam nota kesepahaman/MoU agar dapat direalisasikan, terutama pada komoditas seperti daging sapi, beras, bawang merah, dan aneka cabai.

b) Memperkuat program kemandirian pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bertahap untuk mengurangi defisit pangan, sekaligus mendukung program Asta Cita untuk swasembada pangan. Penguatan produksi lokal juga didorong melalui program Ketahanan Pangan Bergerak Bersama (Ketapang Bergema) yang telah diinisiasi pada Oktober 2024 oleh Ketua TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mendukung penguatan produksi lokal, Bank Indonesia juga mengembangkan dan memperluas klaster ketahanan pangan binaan/ mitra melalui peningkatan sarana dan prasarana, dukungan logistik, serta pendampingan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kelompok wanita tani (KWT), gabungan kelompok tani (gapoktan) potensial, pondok pesantren, serta kelurahan/desa tanggap inflasi yang telah terbentuk di 4 Kota/Kab IHK.

c) Mengoptimalkan penggunaan *cold storage* untuk memperpanjang masa simpan produk pangan, terutama komoditas yang mudah rusak seperti hortikultura dan daging.

d) Mendorong pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan perumda/BUMD/Bumdes/ koperasi yang bergerak di sektor pangan. Lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam hal pengendalian inflasi di daerah, seperti sebagai *offtaker* produk pertanian, pelaksana KAD B2B, dan pelaksana operasi pasar.

3. Kelancaran Distribusi

a) Mendirikan pasar induk sebagai pusat transaksi perdagangan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasar ini diharapkan menjadi titik distribusi kebutuhan yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di pasar-pasar lain, baik dalam provinsi maupun antarprovinsi.

b) Memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar dengan menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke daerah sumber pasokan utama, seperti Pulau Jawa dan Sumatera, melalui prioritisasi antrean penyeberangan muatan logistik untuk komoditas pangan di pelabuhan, terutama pada masa puncak permintaan (*peak season*).

c) Meningkatkan infrastruktur pelabuhan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk dari risiko pendangkalan dermaga labuh, mengingat peran strategis jalur laut sebagai sarana utama distribusi di daerah Kepulauan Bangka Belitung.

4. Komunikasi Efektif

a) Menjaga ekspektasi masyarakat tetap positif dengan mengoptimalkan penggunaan media komunikasi, serta menghimbau masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar dan bijak berbelanja.

b) Meninjau dengan saksama dan melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan penyesuaian tarif-tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti tarif air minum PAM, tarif parkir, serta tarif-tarif komoditas lain yang berdampak terhadap peningkatan inflasi secara umum di daerah.

c) Pemantauan dan penguatan akurasi data pasokan pangan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efektif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

Aktiva Produktif	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bamk berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
***Capital Adequacy Ratio* (CAR)**	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
Ekspor	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
***Financing to Deposit Ratio* (FDR)**	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
Gross Margin	Persentase *value added* dikurangi biaya tenaga kerja dibagi *output*
Input	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya diluar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
Industri	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (*assembling*) dari bagian suatu industri
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*)
Intensitas Tenaga Kerja	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
Jasa Industri	Kegiatan dari suatu usaha yang melayani sebagian proses industri suatu usaha industri atas dasar kontrak atau balas jasa *(fee)*
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kliring Debet	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional

Daftar Istilah

Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
***Loan to Deposit Ratio* (LDR)**	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
Migas	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
Mtm	*Month to month.* Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari *Netcash Outflows* bila terjadi *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan *cash inflows*, dan *Netcash Inflows* bila terjadi sebaliknya
Nilai Tambah/*Value Added*	Selisih nilai output dengan nilai input atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar
***Non Performing Loans/Financing* (NPLs/Ls)**	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
Omset	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
Output	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, pertambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya
PDRB atas dasar harga berlaku	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
PDRB atas dasar harga konstan	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
Pekerja	Orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut
Pekerja Dibayar	Orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang
Pekerja Tidak Dibayar	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi
Perusahaan Industri	Diklasifikasikan menjadi empat lapangan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan penggunaan mesin maupun nilai dari aset yang dimiliki
Produktivitas	Rasio antara nilai output dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar
Qtq	*Quarter to quarter* perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya
***Rasio Non Performing Loans* (NPLs) – NET**	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
***Rasio Non Performing Loans/Financing* (NPLs/Fs)**	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
Share effect	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB
Share of Growth	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika *(real time)* dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional
Tingkat Efisiensi	Rasio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap *output* produksi
Usaha	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko
Yoy	*Year on year*. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
No. Telp : 0717-422411. Fax : 0717-422311